

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

- **Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Keamanan Nasional**
Denik Iswardani Witarti
 - **Politik Islam Transnasional: Kajian Perbandingan Antara Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir dan Negara-Bangsa**
Fahlesa Munabari
 - **Faktor-Faktor Penyebab Krisis Ekonomi Di Korea Selatan Periode 1997-1998**
Jeanie Annissa
 - **Kajian Negara Gagal**
R.M. Aria Ranggakusumah
 - **Republikanisme, Hantu Kedaulatan dan Primasi Perlawanan Demokrasi**
Hizkia Yosias S. Polimpung
 - **Telaan Neoliberalisme Dalam Memahami Reaksi Amerika Serikat Terhadap Nasionalisasi Perusahaan Minyak Di Venezuela**
-



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Penanggung jawab:
Dekan FISIP

Pemimpin Redaksi:
Rusdiyanta

Dewan Redaksi:
Bambang Pujiyono
Denik Iswardani Witarti
Arin Fithriana
Doddy Wihardi
Yusran

Reviewer
Dato' Dr. Junaidi Abubakar
(Universiti Kebangsaan Malaysia)
Dr. Syahrial Syarbaini, MA
(Universitas Indonusa Esa Unggul)
Dr. Lili Romli
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Sekretariat
Samsinar, M.Kom

Alamat Redaksi:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur, Jln. Ciledug Raya, Petukangan Utara,

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman,

Beberapa tanggapan telah kami terima, sehubungan dengan beberapa edisi penerbitan jurnal ini sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas saran, kritik dan komentar yang konstruktif demi perbaikan jurnal ini.

Penerbitan pada edisi ini mengalami keterlambatan, mengingat minimnya tulisan yang masuk. oleh karena itu, kami mohon maaf atas keterlambatan tersebut.

Kami telah berusaha mengelaborasi ruang lingkup studi hubungan internasional pada setiap edisinya. Untuk edisi ini, kami menampilkan ragam topik di antaranya tulisan DenikIswardani Witarti tentang Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Keamanan Nasional, Fahlesa Munabari tentang Politik Islam Transnasional, Jeanie Annissa tentang Faktor-Faktor Penyebab Krisis Ekonomi Di Korea Selatan Periode 1997-1998, R.M. Aria Ranggakusumah tentang Kajian Negara Gagal, Hizkia Yosias Polimpung tentang Republikanisme, Hantu Kedaulatan dan Primasi Perlawanan Demokrasi, Yusran tentang Telaah Neoliberalisme Dalam Memahami Reaksi Amerika Serikat Terhadap Nasionalisasi Perusahaan Minyak Di Venezuela.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi bagi para pembaca. Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Juni 2011

Salam kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

<i>Denik Iswardari Witarti</i>	Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Keamanan Nasional	1-13
<i>Fahlesa Munabari</i>	Politik Islam Transnasional: Kajian Perbandingan Antara Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir dan Negara- Bangsa	14-26
<i>Jeanie Annissa</i>	Faktor-Faktor Penyebab Krisis Ekonomi Di Korea Selatan Periode 1997-1998	27-38
<i>R.M. Aria Ranggakusumah</i>	Kajian Negara Gagal	39-50
<i>Hizkia Yosias S. Polimpung</i>	Republikanisme, Hantu Kedaulatan dan Primasi Perlawanan Demokrasi	51-70
<i>Yusran</i>	Telaah Neoliberalisme Dalam Memahami Reaksi Amerika Serikat Terhadap Nasionalisasi Perusahaan Minyak Di Venezuela	71-94

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KONSEP KEAMANAN NASIONAL

Dr. Denik Iswardani Witarti¹

deni_kiss@yahoo.com, denik.iswardani@budiluhur.ac.id

Abstract

This paper aims to examine the development of theoretical concepts of national security, by discovering its main elements. This study is carried by preliminary assumption that each country has a different concept of national security. This is a qualitative approach and using secondary data. It concludes that although the concept of security of each country is different but there is the same main components namely sovereignty, national interests, conceptions of security and environmental threats.

Keywords : *National Security, Security, Security Studies*

Tinjauan teoritis kemanan nasional seringkali dikembangkan berdasarkan keadaan yang terjadi di Barat (*western concept*) sehingga tidak sesuai apabila diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Hal demikian membuat konseptualisasi tersebut kurang sesuai digunakan untuk menganalisa masalah-masalah keamanan di negara-negara sedang berkembang. Tulisan berikut menjelaskan secara terperinci mengenai perumusan konsep keamanan nasional yang mengacu pada elemen-elemen utama yang harus dipertimbangkan.

Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah arti keamanan nasional itu?, dan bagaimana sebuah bangsa dapat dikatakan aman (*secure*). Istilah keamanan nasional terdiri daripada dua kata, iaitu keamanan (*security*) dan nasional (*national*). Kedua-duanya memiliki makna yang luas dan berubah menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Istilah keamanan nasional seringkali rancu dengan istilah keamanan negara, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda.

Perkembangan Terminologi Keamanan

Terjadi perkembangan yang cukup penting di dalam memaknai arti keamanan pasca Perang Dingin berakhir. Perubahan-perubahan situasi dunia sangat mempengaruhi pemaknaan keamanan. Selama berlangsung Perang Dingin, bahkan jauh sebelumnya, fokus utama dalam objek pembicaraan mengenai keamanan selalu negara. Ini merupakan hasil

¹ Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Budi Luhur

dominasi perspektif realisme dalam hubungan internasional. Realisme memandang dunia ini dalam keadaan anarki sehingga negara senantiasa dalam suasana persaingan dengan negara lain demi keamanan, pasar, pengaruh dan lain sebagainya (Baylis 2006). Dalam konteks seperti ini, keamanan selalu dihubungkan dengan masalah ancaman maupun penggunaan dan kontrol terhadap kekuatan militer. Definisi ini tidak cukup memberikan gambaran keamanan yang menyeluruh terhadap seluruh entitas bangsa yang ada di dalamnya.

Istilah negara-bangsa (*nation state*) muncul sejak ditanda tangannya perjanjian Westphalia tahun 1648. Konsep negara-bangsa terdiri dari dua komponen yaitu negara (*state*) dan bangsa (*nation*). Dorff (2004) mendefinisikan konsep negara secara umum sebagai sekumpulan manusia yang memiliki wilayah dan pemerintahan. Ini mewakili aspek fisik dan politik sebuah negara. Sedangkan bangsa merujuk kepada aspek manusia suatu negara, atau merujuk kepada konsep kebangsaan (*nationality*). Dewasa ini, di dunia yang modern, istilah bangsa didefinisikan sebagai sebuah kelompok besar orang yang memiliki budaya yang sama, atau mempunyai kesamaan ras, etnik maupun warisan sejarah (Buzan 1991).

Dari apa yang telah digambarkan di atas, terlihat bahwa keamanan negara tidak selalu sama dengan istilah keamanan bangsa. Keamanan negara hanyalah menunjukkan kepada situasi aman secara fisik, sedangkan bangsa yang aman (*secure-nation*) merujuk kepada; (Deutsman 1991)

1. Sebuah bangsa yang dapat, dan percaya bahwa ia dapat menghadapi semua ancaman terhadap kehidupan mereka yang datang dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional.
2. Ia juga yakin terhadap kemampuannya (*ability*) sendiri untuk menghadapi pertentangan dan persaingan di dunia.
3. Sebuah bangsa yang dapat, dan percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk memerintah penduduk dan sumber-sumber lainnya untuk mempertahankan dirinya sendiri dan untuk menghalang serangan baik secara militer, ekonomi, penduduk maupun wilayahnya.
4. Sebuah bangsa yang dapat mengatasi persaingan internasional untuk kejayaan dan kekuasaan demi mendukung standar kehidupan masyarakatnya.
5. Sebuah bangsa yang dapat memikat sekutu dan bekerja secara efektif dengan mereka ke arah suatu lingkungan keamanan yang menguntungkan kedua belah pihak (*mutual security*).

Perbedaan antara keamanan negara dengan keamanan nasional terletak pada objek rujukan yang digunakan. Namun jika dilihat dari

komponen-komponen yang menyusun sebuah negara, keduanya mempunyai hubungan dan tidak dapat dipisahkan. Buzan (1991) menjelaskan tiga komponen negara yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah gagasan mengenai negara (*the idea of the state*), yang merupakan komponen paling abstrak dari bagian negara dan berkenaan dengan konsep suatu bangsa dan ideologi suatu bangsa. Komponen kedua adalah lembaga-lembaga negara (*the institutions of the state*) yaitu eksekutif, legislatif, administratif, yudikatif dan undang-undang serta bagaimana prosedur-prosedur dan norma-norma beroperasi. Komponen kedua ini bersifat lebih wujud (*tangible*) sebagai objek rujukan keamanan dan lebih rawan (*vulnerable*) secara fisik. Komponen ketiga adalah hal-hal yang bersifat fisik (*the physical base of the state*) yaitu penduduk, wilayah, termasuk ke dalamnya sumber-sumber alam, kekayaan yang berada di dalam wilayah kuasanya. Komponen ketiga ini eksistensinya paling nyata daripada kedua komponen lainnya sehingga paling mudah untuk dijadikan sebagai objek rujukan dalam merumuskan keamanan nasional.

Secara ringkas Buzan ingin menyampaikan bahwa setiap negara mudah terancam dalam bahaya baik bersumber dari militer dan lingkungan yang melingkupi sebuah negara maupun ancaman yang muncul dari keadaan ekonomi, politik dan sosial yang tidak aman. Setiap negara memiliki komponen yang berbeda sehingga peringkat ancaman di tiap-tiap negara berbeda pula. Perbedaan dalam mempersepsikan ancaman ini yang kemudian menghasilkan konsep keamanan nasional dalam berbagai dimensi.

Istilah keamanan nasional merujuk kepada upaya untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara-bangsa dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki baik ekonomi, militer, kekuatan politik dan upaya-upaya diplomasi. Jordan Taylor dan Mazaar dalam *the 1999 edition of the textbook American National* menjelaskan bahwa *national security*

“signifies protection of the nations people and territories against physical assault...National Security, however, has a more extensive meaning than protection from physical harm; it also implies protection, through a variety of means, of vital economic and political interests, the loss of which could threaten the fundamental values and vitality of state”

Ketidakmampuan negara dalam menciptakan dan mempertahankan keamanan nasional akan mengancam rakyatnya. Keamanan nasional dapat

tercipta bila didukung oleh kapabilitas negara dalam menciptakan *good governance* atau *clean governance*, dan dalam penciptaan kebijakan-kebijakan (*state policy*) yang menunjukkan respon negara terhadap ancaman yang dihadapinya.

Elemen-Elemen Utama Keamanan Nasional

Secara umum, keamanan nasional merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara-bangsa dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki baik ekonomi, militer, politik dan upaya-upaya diplomasi. Salah satu hal utama yang membedakan pengurusan keamanan di negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang adalah berkenaan dengan hal pembangunan bangsa (*nation-building*). Hampir semua negara berkembang masih bermasalah dengan pembangunan bangsa. Negara-negara maju telah selesai membangun bangsanya, sedangkan banyak dari negara berkembang masih sibuk dengan isu-isu politik domestik mereka.

Meskipun terdapat perbedaan diantara konsep keamanan nasional di negara-negara Barat dengan negara-negara berkembang, terdapat elemen-elemen yang sama yakni;

1. kedaulatan (*sovereignty*)
2. kepentingan nasional (*national interest*)
3. konsepsi ancaman (*national threats*)
4. lingkungan (*environment*) domestik dan internasional

Elemen-elemen di atas sangat menentukan konsepsi keamanan nasional yang dikembangkan sebuah negara. Masing-masing negara memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda.

1. Kedaulatan

Kedaulatan dalam arti yang paling luas diartikan sebagai: *the ability of a state to govern itself and ensure that this ability is not hostage to outside pressures or tensions within* (Kantha 2001). Snow (1987) mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme*) dan mandiri (*independent*). Ia membagi kedaulatan ke dalam dua istilah yaitu politik domestik dan internasional yang mana kedua makna memiliki akibat yang sangat berbeda. Dalam politik domestik, negara memiliki kedaulatan yang membenarkan pihak penguasa untuk menegakkan kebijakan-kebijakannya terhadap individu-individu yang berada di wilayah kekuasaannya. Sedangkan dalam politik internasional, masing-masing negara berusaha melanggengkan kedaulatan.

Lebih jelas mengenai kedaulatan, Krasner (1999) menyatakan bahwa istilah kedaulatan dapat digunakan dalam empat makna yang berbeda, yakni;

1. *International legal sovereignty* yaitu kedaulatan yang merujuk kepada praktek-praktek yang berhubungan dengan pengakuan dari semua pihak, biasanya antara entitas wilayah yang memiliki kemerdekaan undang-undang (*judicial*).
2. *Westphalian sovereignty* adalah kedaulatan yang merujuk kepada suatu organisasi politik yang berasas kepada ketidakberadaan aktor luar negara atau bebas dari campur tangan pihak luar di wilayahnya.
3. *Domestic sovereignty* ialah kedaulatan yang dimiliki oleh organisasi formal dari pihak-pihak penguasa politik di dalam negara dan merujuk kepada kemampuan kekuasaan publik untuk melaksanakan kontrol efektif terhadap perbatasan mereka.
4. *Interdependence sovereignty* yaitu kedaulatan yang merujuk kepada kemampuan kekuasaan umum untuk mengatur aliran berbagai informasi, ide, barang, orang, bahan-bahan polutan dan modal yang melintasi perbatasan negara mereka.

Kedaulatan internasional dan kedaulatan Westphalia hanya memiliki kekuasaan dan keabsahan, namun tidak mencakup kontrol. Sedangkan kedaulatan interdependensi lebih memperhatikan pada masalah kontrol bukan pada kekuasaan. Berbeda dengan ketiga konteks lainnya, kedaulatan domestik mempunyai keduanya, baik kekuasaan maupun kontrol.

Krasner (1999) juga menyatakan bahwa jika kekuasaan efektif, maka kekuatan atau pemaksaan tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya, kontrol dapat dicapai melalui penggunaan kekuatan tanpa pengakuan kepada kekuasaan. Namun demikian, hilangnya kontrol pada masa tertentu akan menjatuhkan kekuasaan.

Pada dasarnya, kedaulatan terikat pada satu set peraturan yang berdampak kepada negara sebagai pedoman bagaimana berinteraksi dengan yang lain, termasuk menolak segala bentuk campur tangan negara lain ke dalam urusan dalam negeri. Dalam konteks manajemen keamanan nasional, kedaulatan berhubungan dengan bagaimana kemampuan kekuasaan umum yang terorganisir di dalam negara dan bagaimana pelaksanaannya secara efektif. Kekuasaan dan kontrol akan mempengaruhi tingkah laku sebuah negara. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa negara yang memiliki kekuasaan besar kadang memilih bersikap satu pihak (*unilateral*).

2. Kepentingan nasional

Semua negara mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang dikenal sebagai kepentingan nasional. Setiap negara akan berusaha mempertahankan dan memajukan kepentingan-kepentingan negara masing-masing dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. "The ultimate purpose of national security is to protect or extend certain national values" (Treager 1979).

Kepentingan nasional menjadi pilar dan rujukan untuk mengurus kehidupan bangsa dan negara. Kepentingan yang utama (*vital*) bagi sebuah negara selalu berhubungan dengan keberadaan yang hakiki bagi sebuah negara yakni wilayah, penduduk dan kedaulatan. Oleh karena itu, negara tidak akan kompromi dan merespon dengan tegas setiap ancaman kepadanya. Sedangkan kepentingan lainnya barangkali masih dapat diperdebatkan penting tidaknya untuk direspon (Dorff 2004).

Masing-masing negara mendefinisikan kepentingan nasional vitalnya dengan berbagai cara yang berbeda. Kepentingan nasional yang utama lazimnya memiliki dua tipikal. Pertama, kepentingan nasional ini sangat penting bagi negara yang mana tidak akan rela untuk kompromi. Kedua, sebuah negara-bangsa biasanya akan bersedia melakukan perang demi mencapainya (Snow 1987).

Kemudian, kepentingan nasional ini dirumuskan menjadi strategi keamanan nasional. Strategi keamanan pada peringkat apapun terdiri dari objektif atau tujuan akhir (*ends*), konsep atau cara (*ways*), serta sumber daya yang dimiliki (*means*) untuk mencapainya (Jablonsky 2004). Apabila ketiganya dapat dirumuskan kemudian diterapkan dengan benar maka pengaturan keamanan nasional dapat menjadi pemersatu kehidupan masyarakat, karena setiap aktivitas yang mencoba menantang akan berhadapan dengan seluruh entitas kekuatan nasional.

Gagasan mengenai kepentingan nasional inilah yang hendak dikejar di dalam politik luar negeri oleh suatu negara. Pemerintah akan bertindak mengikuti kepentingan-kepentingan rakyatnya meskipun tidak sama atau bahkan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan negara lain (Hough 2004).

Beberapa tahun belakangan, politik luar negeri Amerika Serikat cenderung *unilateral*, seperti menolak bergabung ke dalam larangan internasional mengenai ranjau darat dan Protokol Kyoto mengenai pemanasan global. Malahan Amerika Serikat tidak ragu menggunakan kekuatan untuk menyerang Irak tanpa dukungan masyarakat internasional (Helis 2004). Begitu pula serangan Amerika Serikat terhadap Afganistan dilakukan atas nama perang melawan teroris (*war on terrorism*). Ini

merupakan bukti bahwa Amerika Serikat telah bertindak menurut kepentingan nasionalnya sendiri.

Politik luar negeri yang mengikuti kepentingan nasionalnya sendiri ini juga dilakukan oleh Australia. Dalam ucapannya tahun 2002 berjudul "*Advancing the National Interest*", Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer menyatakan "*the government has ensured that Australia's national interest is advanced in an ambitious yet pragmatic and clear-minded fashion. Because if we don't...no one else will*" (Downer 2002).

Nampak jelas disini bahwa tingkah laku negara berakar kepada upaya untuk mengejar, melindungi dan memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu, apabila sebuah negara dapat dengan tepat merumuskan kepentingannya, maka seharusnya negara tersebut dapat lebih memahami kelakuannya *vis-à-vis* negara lain dan pelaku-pelaku lain dalam sistem internasional (Dorff 2004).

3. Ancaman

Bagi Kenneth Waltz (1991) dan kaum realis lainnya, masalah keamanan selalu mempunyai hubungan dengan upaya negara-negara untuk mencari keamanan, penggunaan kekuatan militer, perlombaan senjata dan perang. Ini semua oleh karena mereka memiliki pandangan bahwa ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara adalah ancaman militer. Namun, sejak Perang Dingin berakhir banyak tulisan para pakar mengenai munculnya ancaman-ancaman keamanan baru. Aspek non militer mulai masuk dan dipertimbangkan sebagai isu yang dapat membahayakan keamanan.

High level panel on threats, challenges and change dalam laporannya tahun 2005 kepada Sekjend PBB saat itu, Kofi Annan menyatakan bahwa ancaman yang seharusnya menjadi agenda PBB tidak saja terbatas kepada masalah terorisme internasional dan pengembangan senjata-senjata pemusnah massal; tetapi lebih luas lagi termasuk juga fenomena mengenai kegagalan sebuah negara (*failure state*) yang dapat membawa ketidakstabilan dan konflik di kawasan; juga kepada masalah-masalah non tradisional yang menjadi bagian dari isu perdamaian dan keamanan. Isu-isu tersebut antara lain kemiskinan, degradasi lingkungan, penyakit yang merupakan pandemic, dan meluasnya jaringan kejahatan trans-nasional. Mereka menyebutnya sebagai '*soft-threat*', yang mana ancaman-ancaman itu dipandang lebih mengancam dan mematikan daripada ancaman fisik atau '*hard-threat*' (Hannay 2005).

Brown (2003) menyajikan sebuah *landscape* baru mengenai agenda ancaman yang dapat membahayakan keamanan. Ia menyakini bahwa yang menjadi pusat dari isu-isu keamanan ialah masalah konflik kekerasan. Berikut adalah tabel agenda keamanan dalam arti luas yang memasukkan

baik aspek militer maupun non militer. Faktor-faktor ini merupakan faktor yang dapat menyumbang sebagai penyebab konflik-konflik kekerasan

Table 1. *Landscape* baru keamanan

	Masalah Interstate	Masalah Intrastate	Masalah Transnational
Tantangan Militer	Perang interstate	Kudeta militer	Pemberontakan lintas-batas
	Kompetisi <i>Great-power</i>	Konflik etnik	Terorisme transnational
	Proliferasi senjata ke negara-negara atau kawasan yang tidak stabil	Perang sipil	Proliferasi senjata melalui atau kepada aktor non-negara
Tantangan Non- Militer	Persengketaan dagang	Pertumbuhan populasi	Media trans-nasional
	Konflik sumber daya	Migrasi ekonomi	Kejahatan trans-nasional
	Kompetisi energi	Kompetisi sumber daya	Proliferasi teknologi

Sumber: Brown 2003

Konflik-konflik kekerasan yang ada dan merupakan konflik domestik akan mengancam kekekalan keamanan nasional. Berdasarkan sejarah, hampir semua negara Dunia Ketiga pernah mengalami penjajahan. Pasca kemerdekaan, mereka masih menderita dengan masalah-masalah kemajemukan komunal warisan penjajah seperti perbedaan etnik, bahasa, agama dan budaya yang dipaksa untuk bergabung menjadi satu wilayah dan pemerintahan (Holsti 1998). Inilah yang dimaksud dengan proses integrasi. Menurut Nazzaruddin Sjamsuddin (1996), integrasi merupakan proses penyatuan keragaman kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara sosial, budaya maupun politik ke dalam satu kesatuan wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional.

Melalui proses integrasi inilah nasionalisme sebuah bangsa akan dibangun. Walter S. Jones (1982) berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara emosional mengikat orang

banyak menjadi satu bangsa. Bangsa menjadi sumber rujukan dan kepatuhan tertinggi bagi setiap individu, sekaligus sebagai identitas nasional.

Kepatuhan masyarakat maupun individu kepada negaranya, sebagai wujud penerimaan kebangsaannya sangat berpengaruh kepada kekuatan keamanan nasional. Harry Tjan Silalahi (2005) menyatakan bahwa peringkat rasa kebangsaan atau nasionalisme suatu bangsa yang hadir dalam sikap cinta tanah air dan patriotisme adalah pendukung utama suatu strategi keamanan nasional. Semakin tinggi rasa kebangsaan dan cinta tanah air, akan memberikan sumbangan yang positif terhadap strategi keamanan nasional. Hal ini dapat menafikan timbulnya konflik-konflik kekerasan yang muncul akibat adanya sekelompok masyarakat atau individu yang tidak puas dengan pemerintah. Menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk senantiasa memuaskan tuntutan dari seluruh entitasnya apabila hendak menjaga keamanan nasionalnya. Jika tuntutan ini terpenuhi ia akan berubah menjadi dukungan kepada pemerintah, jika tidak maka ia akan menjadi ancaman yang siap membahayakan keamanan.

Seperti telah disampaikan bahwa persepsi mengenai ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara sangat berpengaruh terhadap keamanan nasional. Baylis (1997) mendefinisikan keamanan nasional sebagai: "...absence of threats to acquired values, ability to maintain independent identity and functional integrity, and being able to preserve core values." Dalam hal ini negara yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Negara juga sebagai aktor utama dalam proses sekuritisasi ancaman-ancaman non militer yang membahayakan seluruh entitasnya.

4. Lingkungan keamanan

Keamanan nasional, kawasan dan global saling berkaitan. Keamanan kawasan merupakan perpanjangan yang masuk akal dari keamanan nasional. Tindakan suatu negara di bidang keamanan dapat membawa dampak yang merumitkan baik bagi keamanan kawasan maupun keamanan global. Disamping itu, isu-isu keamanan yang ada seringkali di luar kekuasaan suatu negara untuk menyelesaikannya secara sendirian. Sebagai contoh, ketidaksabihan politik domestik dapat melimpah (*spill over*) ke negara-negara yang berbatasan dengannya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk senantiasa menjaga kestabilan politik dalam negerinya (Tan 2004).

Sejak bebas dari penjajahan, negara-negara lebih memiliki otonomi untuk mengurus keamanannya masing-masing. Namun ketika terjadi Perang Dingin yang mana sistem global terbagi ke dalam sistem dua kutub (*bipolar*), mereka terpaksa harus memilih berada di pihak mana.

Selama masa Perang Dingin, struktur kekuasaan dunia terbagi menjadi 2+3 dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai *super-power*, serta Cina, Jepang dan negara-negara Uni Eropa sebagai *great-power*. Setelah Perang Dingin berakhir, permusuhan di antara mereka telah pudar sehingga kekuasaan lokal (*local power*) lebih memiliki tempat untuk melakukan tindakan. Untuk masa satu dekade setelah Perang Dingin, negara-negara besar mulai mengurangi insentif dan keinginannya untuk campur tangan kepada masalah-masalah keamanan di luar kawasan mereka (Barry Buzan & Ole Wæver 2003).

Runtuhnya sistem bipolar membawa keamanan dunia kepada situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Masing-masing negara harus mengurus keamanan nasionalnya sendiri dan tidak lagi bergantung kepada negara-negara besar. Pada saat yang bersamaan, mereka mulai berhadapan dengan konflik-konflik domestik yang selama Perang Dingin berhasil ditekan. Sejak konfrontasi ideologi tidak menjadi fokus, ancaman-ancaman baru yang bersifat bukan ancaman militer mulai diperhitungkan.

Dalam laporan Sekjen PBB, Kofi Annan tahun 2005 yang bertajuk "*in larger freedom*" dinyatakan secara tegas bahwa ancaman terhadap perdamaian dan keamanan tidak saja perang internasional dan konflik melainkan kekerasan terhadap orang umum, kejahatan terorganisir, terorisme dan senjata pemusnah massal. Selain itu juga termasuk kemiskinan, penyakit yang mematikan dan degradasi lingkungan ketika mereka dapat menimbulkan akibat-akibat yang membawa bencana (Annan 2005).

Namun, persepsi ancaman, dalam menanggapi apakah suatu hal itu mendesak, berbeda di setiap negara. Hal tersebut tergantung kepada kekayaan, letak geografi dan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut. Annan juga menjelaskan bahwa di era globalisasi ancaman-ancaman ini saling berkaitan. Bagi mereka yang kaya mudah terancam oleh bahaya akibat ancaman yang menyerang yang miskin dan yang kuat juga berbahaya bagi yang lemah kekuasaannya, begitu pula sebaliknya. Ia memberi contoh terjadinya serangan nuklir teroris di Amerika Serikat atau Eropa dapat membinasakan seluruh dunia. Sama halnya apabila timbul penyakit-penyakit pandemik di negara-negara miskin yang tidak memiliki sistem kesehatan yang efektif. Oleh karena itu, penting adanya persetujuan keamanan baru untuk menyelesaikan masalah-masalah ini.

Di era yang mana ancaman-ancaman terhadap keamanan nasional senantiasa berubah, isu-isu trans-nasional yang secara alami berpasangan dengan senjata-senjata yang tersembunyi dan berbahaya yang memiliki kemampuan memusnahkan, maka langkah ke depan yang mesti diambil ialah melalui kerjasama, bersiap, berjaga-jaga dan diplomasi yang kreatif.

Panduan-panduan untuk menjaga keamanan dunia telah ada yaitu forum-forum politik, undang-undang internasional, kerjasama ekonomi, aset-aset intelijen, dan apabila diperlukan juga kekuatan militer (Beal 2002).

Penutup

Sebagai penutup, tulisan ini menyimpulkan bahwa ada beberapa hal utama yang harus diputuskan dulu sebelum merumuskan suatu konsep keamanan nasional sebuah negara;

Pertama, menetapkan terlebih dahulu siapa aktor utamanya, apakah negara (*state*) atau pelaku bukan negara (*non-state*). Ini penting untuk mengetahui sampai mana peringkat analisisnya. Apakah pada peringkat individu, negara atau sistem. Idealnya, konsep keamanan nasional tidak hanya dipandang sebagai keamanan negara saja, tetapi juga keamanan dari seluruh entitas yang berada di dalamnya. Dengan demikian, warga negara sebagai bagian dari sebuah negara juga akan terlindungi tidak hanya secara fisik tetapi juga seluruh aspek kehidupannya.

Kedua, menentukan makna kedaulatan bagi sebuah negara. Ini penting karena berkenaan dengan masalah kekuasaan dan kontrol suatu negara sehingga akan menunjukkan kapabilitasnya. Secara domestik, kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh penguasa akan menjamin ketentraman dan kesejahteraan seluruh entitas negara. Sedangkan dalam konteks hubungan internasional dapat menunjukkan kemampuan sebuah negara untuk mengatasi dan bereaksi terhadap kejadian-kejadian yang berlaku secara global.

Ketiga, menentukan apa yang menjadi kepentingan nasional sebuah negara. Kepentingan nasional sangat mempengaruhi tingkah laku suatu negara. Apabila tujuan utama dari negara adalah untuk melindungi warga negaranya maka keamanan manusia akan berada di peringkat paling atas dari daftar kepentingan nasional, serta akan menjadi dasar kebijakan keamanan.

Keempat, konsep keamanan nasional harus lebih dari sekedar masalah ancaman militer terhadap eksistensi politik suatu negara. Munculnya ancaman-ancaman non militer yang trans-nasional juga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan dalam merumuskan konsep keamanan nasional.

Kemampuan negara untuk mempersepsikan ancaman-ancaman yang akan membahayakan keamanan bangsanya juga penting. Negara harus memiliki kepekaan terhadap tuntutan-tuntutan dari dalam dan tidak menafikannya. Masing-masing negara memiliki persepsi yang berbeda

terhadap ancaman-ancaman yang eksis sesuai dengan keadaan yang berlaku di dalam negara. Kemampuan dan kepekaan untuk menanggapi ancaman-ancaman yang datang dapat mendatangkan dukungan dari seluruh entitas negara yang merasa tenteram.

Oleh karena keadaan lingkungan sekitar juga berpengaruh kepada keamanan sebuah negara dan dapat menjadi sumber ancaman, maka kerjasama negara-negara sekawasan maupun internasional sangat diperlukan. Di dalam hubungan internasional hanya ada dua pilihan bila mereka menghadapi masalah bersama yaitu berkonflik atau bekerjasama. Apabila keamanan nasional salah satu negara akan diganggu maka mereka akan siap-siap untuk berperang. Sebaliknya, apabila mereka merasa tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang trans-nasional sendirian, maka mereka akan bekerjasama dengan negara lain. Mengingat akhir-akhir ini isu-isu keamanan yang sifatnya trans-nasional semakin marak, maka kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut merupakan pilihan rasional suatu negara.

Daftar Pustaka

- Andrew T. H. Tan. 2004. *Security perspectives of the Malay archipelago. Security linkages in the second front in the war on terrorism*. Cheltenham: Edwar Elgar
- Alexander Downer. 2002. *Advancing the National Interest*. Dlm. Peter Hough. 2004. *Understanding global security*. London: Routledge.
- Ayoob M. 1984. *Security in the third world*. *International Affairs* 60 (1)
- Barry Buzan. 1991. *People State and Fear: the National security problem in the Third world*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Bill Mcsweenwy. 1999. *Security identity and interest. A sociology of international relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clifford Beal. 2002. *Everything has changed, nothing has change*. http://www.janes.com/security/international_security/news/jdw/jdw020911_1_n.shtml
- Conceptual Framework for the Commission on Human Security*, Sabine Alkire, 6 Desember 2001.
- David Hannay. 2005. *A more secure world: our shared responsibility- thereport of the High Level Panel on Threats, Challenges and Changes*. Dlm. Felix Doods (pnyt) *Human & environmental security. An agenda for change*. London: Earthscan.
- Donald M. Snow. 1987. *National Security: enduring problems*. New York: St. Martin's Press, Inc.

- Edward E. Azar & Chung-in Moon. 1988. *National security in the third world the management of internal and external threats*. Aldershot: Hans Edward Elgar
- F. N Treager & Philip S. 1979. *An introduction to study of national security*. New Jersey: Prentice Hall
- Harry Tjan Silalahi. 2005. *Nasionalisme dan strategi keamanan nasional*. Dlm. Bantarto Bandoro (pnyt.). *Perspektif baru keamanan nasional*. Jakarta: CSIS.
- John Baylis & Steve Smith. 1997. *The globalization of world politics. An introduction to international relations*. New York: Oxford University Press.
- . 2006. *The globalization of world politics. An introduction to international relations*. New York: Oxford University Press.
- K.J Holsti. 1972. *International politics: a framework for analysis*. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall.
- Kofi A. Annan. 2005. *In larger freedom. Toward development, security and human rights for all*. New York: United Nations
- Landry H. S. *Konsep Human Security : Tinjauan dan Prospek*. Analisis CSIS. Tahun XXXI/2002, No. 1, April 2002
- Michael M Brown (pnyt.). 2003. *Grave new world. Security challenges in the 21st century*. Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi. 2007 3rd. *International relations and world politics: security, economy, identity*. New Jersey: Pearson, Prentice Hall.
- Peter Hough. 2004. *Understanding global security*. London: Routledge.
- Peter J. Katzenstein. 1994. *The culture of national security. Norms and identity in world politics*. New York: Columbia.
- S. J. Deutsman. 1991. *Beyond the thaw, a new national strategy*. Colorado: West View Press.
- Stephen D Krasner. 1999. *Sovereignty. Organized Hypocrisy*. New Jersey: Princenton University Press.
- Tara Kartha. June 2001. *Small Arms and Security in Southeast Asia. Small Arms and South East Asian Security. Confidence Building and Conflict Reduction*. 15th Asia-Pasific Roundtable, Kuala Lumpur.
- Nazaruddin Sjamsuddin. 1996. *Dimensi Politik Dari Integrasi Nasional : Tinjauan Teoritis*. Dlm. Safroedin Bahar dan A.B. Tangdililing (pnyt.) *Integrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Walter S Jones & Steve J. Rosen. 1982. *The Logic of International Relation*. Boston: Little Brown.
- <http://www.whitehouse.gov/homeland/book/index.html>: 8 April 2007

POLITIK ISLAM TRANSNASIONAL: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR DAN NEGARA-BANGSA

Fahlesa Munabari, MA¹
Fahlesa.munabari@yahoo.com

Abstract

This article attempts to analyze underlying differences between the concept of the nation-state and the caliphate according to an Islamic transnational movement called Hizbut Tahrir. This article begins to discuss the profile of Hizbut Tahrir. It then describes the basic characteristics of both the caliphate and the nation-state in order to account for their underlying differences. To examine the concept of the nation-state, this article employs the perspectives of the nation-state proposed by Benedict Anderson and Anthony D. Smith. The author argues that the underlying differences between the concept of the nation-state and the caliphate lie on such aspects as territorial boundaries, sources of law, and sources of sovereignty and power.

Keywords : *Political Islam, Hizbut Tahrir, Transnational Movement, Caliphate, Nation-state*

Pendahuluan

Hizbut Tahrir atau yang secara bahasa berarti Partai Pembebasan adalah organisasi gerakan Islam yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hizbut Tahrir Indonesia sendiri adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Hizbut Tahrir internasional yang berpusat di Timur Tengah. Hizbut Tahrir Indonesia mengkategorikan aktivitasnya sebagai aktivitas politik, bukan sosial maupun budaya. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukannya memiliki tujuan politik. Tujuan politik dari organisasi ini adalah untuk mendirikan khilafah atau negara yang berlandaskan Islam serta untuk menerapkan syariah (hukum Islam). Penegakan khilafah dan syariah adalah slogan yang selalu didengungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam setiap aktivitasnya seperti demonstrasi, diskusi publik, konferensi, dan lain sebagainya (Antara 2008; Detikfoto 2011). Penegakan khilafah yang berdasarkan syariat Islam dianggap sebagai solusi berbagai persoalan umat Islam.

¹ Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Budi Luhur dan penerima beasiswa Endeavour Postgraduate Award untuk menempuh program Doktor di Southeast Asian Studies, University of New South Wales, Australia.

Jika Hizbut Tahrir memiliki tujuan politik penegakan entitas politik yang dinamakannya dengan khilafah yang berlandaskan syariah, dapat disimpulkan bahwa organisasi gerakan Islam transnasional ini tidak menyetujui bentuk entitas politik modern saat ini, yaitu negara-bangsa (*nation-state*). Kita mengetahui bahwa negara-bangsa adalah entitas politik modern yang saat ini berlaku secara global. Keberadaannya menggantikan entitas politik sebelumnya yang disebut dengan periode kerajaan atau dinasti. Benedict Anderson (1991) mengungkapkan bahwa negara-bangsa lahir di era dimana kedaulatan Tuhan telah berakhir sehingga sekulerisme menjadi karakter utama yang menonjol. Di samping itu, Anderson (*ibid*) juga mengatakan bahwa negara-bangsa memiliki batas teritorial yang tetap. Yang terakhir, Anderson meyakini bahwa diantara sesama warga negara-bangsa terdapat imajinasi kolektif yang menyatukan mereka sehingga dapat membangkitkan ikatan solidaritas dan ikatan kesetiaan terhadap negara-bangsanya.

Artikel ini akan menjawab pertanyaan mengenai apa perbedaan mendasar diantara entitas politik khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir dengan entitas politik negara-bangsa.

Profil Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiuddin an-Nabhani,² seorang aktivis gerakan Islam, hakim, sekaligus ulama, di Al-Quds (Palestina) pada tahun 1953. Hizbut Tahrir lahir di tengah suasana global dimana dominasi Barat, yang di dalamnya terdapat negara-negara seperti Inggris, Perancis, dan lain sebagainya, telah merubah tatanan dunia Islam yang dahulu menyatu dalam negara Islam yang bernama khilafah Islam Turki Usmani (Ottoman). Kerinduan kuat untuk kembali menghidupkan tatanan masyarakat berlandaskan Islam dibawah dominasi pemikiran non-Islam yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemikiran dan budaya Barat, ditambah dengan pendudukan Israel terhadap Palestina – secara sosial historis – telah menjadi faktor pemicu utama berdirinya Hizbut Tahrir.³

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang memberlakukan Islam sebagai ruhnya, sehingga semua kebijakannya dikeluarkan atas dasar aturan-aturan Islam. Karena Hizbut Tahrir meyakini bahwa Islam adalah landasan yang membentuk ciri khas partai, maka secara otomatis Hizbut Tahrir juga mendasarkan aktivitasnya pada dua buah sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi wahyu-wahyu Allah SWT yang kemudian disampaikan kepada

² Untuk profil yang lebih lengkap tentang Taqiuddin an-Nabhani, lihat Commins (1991).

³ Hizbut Tahrir Indonesia, "Tentang Kami", <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> (akses 23 Januari 2012).

manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sementara itu Al-Hadits adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perbuatan maupun perkataan selama masa kenabiannya. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW tersebut kemudian diingat dan diwariskan secara turun temurun kepada generasi umat Islam berikutnya melalui tradisi lisan.⁴

Hizbut Tahrir adalah murni sebuah partai politik dan berkomitmen bahwa politik adalah wilayah kerjanya. Hizbut Tahrir bukanlah organisasi kemanusiaan maupun institusi pendidikan non-formal yang kerap kali menyelenggarakan penggalangan dana kemanusiaan untuk musibah bencana alam ataupun bentuk-bentuk lain yang tidak bersesuaian dengan perjuangan politik. Karena platform tersebut telah secara jelas meletakkan politik sebagai tujuan, metode aksi yang digunakan juga berdasarkan metode-metode politik, seperti misalnya membentuk opini publik melalui berbagai cara yang mungkin.⁵

Hizbut Tahrir memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali khilafah Islam yang telah runtuh sejak pemerintahan Islam yang terakhir di bawah khilafah Turki Usmani pada tanggal 29 Oktober 1923. Tujuan politik Hizbut Tahrir adalah untuk menyebarkan da'wah sehingga bisa sampai kepada umat. Tujuan dari da'wah tersebut adalah untuk mengganti pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari tatanan masyarakat. Hizbut Tahrir menolak semua ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itulah sebabnya mengapa metode Hizbut Tahrir dalam menyampaikan da'wahnya dilakukan melalui pembentukan opini publik yang diantaranya melalui internet, selebaran, audio maupun video yang berisi tentang seruan yang menegaskan bahwa ide-ide seperti demokrasi, nasionalisme, maupun kapitalisme tidaklah sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Hizbut Tahrir menerima Muslim baik pria maupun wanita sebagai anggotanya dengan tidak membedakan apakah orang itu berasal dari keturunan Arab atau bukan. Keanggotaan terbuka bagi setiap muslim tanpa membedakan kewarganegaraan dan aliran pemikiran dalam Islam (*mahzab*). Kelompok studi wanita Hizbut Tahrir terpisah dengan pria. Anggota wanita dipimpin dan dibina oleh sesama wanita, suami mereka, atau saudaranya yang tidak dapat dinikahi.⁷ Dana Hizbut Tahrir didapatkan dari iuran anggota Hizbut Tahrir. Dalam hal ini Hizbut Tahrir

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

berusaha untuk independen dan tidak terikat dari lembaga donor atau kepentingan manapun.⁸

Hizbut Tahrir adalah organisasi internasional yang memiliki banyak cabang di berbagai dunia. Hizbut Tahrir mengadopsi struktur organisasi dengan hirarkis yang ketat. Struktur organisasinya yang paling puncak bernama Majelis al-Qiyadh yang dipimpin oleh seorang *'amir*. Struktur ini adalah pusat dari cabang Hizbut Tahrir yang ada di seluruh dunia. Saat ini *'amir* Hizbut Tahrir dipegang oleh Ata Abu Rashtah. Struktur di bawah Majelis al-Qiyadah adalah Majelis al-Wilayah yang terdapat di ibu kota di berbagai negara dimana Hizbut Tahrir memiliki aktivitasnya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrir Inggris, Hizbut Tahrir Malaysia, Hizbut Tahrir Sudan, Hizbut Tahrir Australia, dan lain sebagainya. Orang yang memimpin Majelis al-Wilayah disebut dengan *mu'tamad*. Mu'tamad Hizbut Tahrir Indonesia saat ini dipegang oleh Hafidz Abdurrahman. Di bawah Majelis al-Wilayah adalah Majelis al-Mahaliyah dengan pemimpinnya yang bernama *naqib*. Struktur ini berada pada tingkat yang setara dengan provinsi, seperti provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan lain sebagainya (Farouki 2005: 63; Munabari 2010: 183-186).

Hizbut Tahrir sendiri mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Abdurrahman al-Baghdadi diyakini sebagai tokoh awal Hizbut Tahrir yang berasal dari Yordania yang kemudian mengembangkan Hizbut Tahrir di kota Bogor melalui jaringan dakwah kampus atau Lembaga Dakwah Kampus, khususnya di masjid Institut Pertanian Bogor. Hizbut Tahrir Indonesia sendiri mulai memproklamasikan diri di depan publik melalui konferensi yang digelarnya pada tanggal 28 Mei 2000 di Stadion Tenis Indor, Senayan, Jakarta. Sebelum konferensinya yang pertama ini, aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia tetap berjalan melalui lembaga-lembaga pengajian baik di kampus maupun di luar kampus. Hanya saja identitas atau nama Hizbut Tahrir ketika itu memang sengaja tidak digunakan untuk menghindari tekanan dari rezim Presiden Suharto (Rahmat 2005: 125; Munabari 2010). Pada konferensi tersebut Hizbut Tahrir untuk pertama kalinya secara publik menggelorakan gagasan khilafah Islam sekaligus juga mengkritik paham nasionalisme yang dianggapnya memiliki andil dalam menceraiberaikan umat Islam di seluruh dunia dan mengkotak-kotakannya ke dalam etnitas negara-bangsa (Munabari 2010: 179).

⁸ Tindiyo (Humas Hizbut Tahrir DIY), wawancara, 4 Desember 2005.

Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir

Khilafah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada entitas politik yang didasarkan atas aturan dan nilai-nilai agama Islam. Keberadaannya dimulai pada periode Khilafah Rasyidin (632-661). Setelah Nabi Muhammad SAW (570-632) meninggal, kepemimpinannya diganti oleh para sahabat dekatnya. Periode sepeninggal Nabi Muhammad SAW tersebut disebut dengan periode Khilafah Rasyidin. Para sahabat tersebut adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pencalonan khalifah (pemimpin) dalam periode Khilafah Rasyidin didasarkan pada kesepakatan diantara sahabat Nabi Muhammad SAW.

Setelah periode Usman bin Affan, terjadi perang saudara diantara umat Islam pada waktu itu. Ali bin Abi Thalib memimpin tampuk kekuasaan selama kurang lebih lima tahun sebelum akhirnya Muawiyah memegang kekuasaan dan mengganti ibu kota khilafah dari Madinah ke Damaskus di Suriah. Periode khilafah di bawah Muawiyah lebih dikenal dengan Khilafah Umayyah yang berlangsung dari abad ke-7 hingga ke-8. Khilafah berikutnya adalah Khilafah Abbasiyah (abad ke-8 hingga ke-13) dengan ibu kota di Baghdad dan yang terakhir adalah Khilafah Turki Usmani atau dikenal juga dengan Ottoman (abad ke-13 hingga ke-20) dengan pusat kekuasaan di Istanbul.

Menurut Hizbut Tahrir, dari kurun waktu Khilafah Rasyidin hingga Khilafah Turki Usmani, entitas politik khilafah tersebut dijalankan dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa entitas politik khilafah adalah negara kesatuan yang secara administratif terdiri dari ibu kota dan sejumlah provinsi. Hizbut Tahrir menilai bahwa runtuhnya khilafah Turki Usmani pada tanggal 3 Maret 1924 merupakan awal kehancuran dan perpecahan umat Islam sedunia. Atas pertimbangan itulah Hizbut Tahrir berkeinginan kuat untuk kembali mendirikan khilafah.

Untuk lebih memperjelas karakteristik entitas politik khilafah menurut Hizbut Tahrir, berikut ini diketengahkan dua buah pasal dari naskah konstitusi khilafah yang diusulkan oleh Hizbut Tahrir yang terkait dengan konsep khilafah (An-Nabhani 2002):

Pasal 1:

“Akidah Islam adalah landasan negara. Tidak diperbolehkan untuk mengambil atau menerapkan landasan-landasan lain di dalam struktur dan aspek-aspek pemerintahan kecuali Islam. Islam juga merupakan sumber dari konstitusi dan pertaturan hukum negara. Tidak ada sumber-sumber hukum lain yang diperbolehkan untuk diterapkan kecuali berasal dari Islam.”

Pasal 22:

“Sistem pemerintahan dibangun atas dasar empat prinsip:

- 1) Kedaulatan (*sovereignty*) berada di tangan hukum Islam;
- 2) Kekuasaan (*power*) berada di tangan umat (rakyat);
- 3) Seluruh umat Islam berkewajiban untuk memilih seorang khalifah (pemimpin negara);
- 4) Hanya khalifah yang berhak untuk mengadopsi peraturan hukum yang didasarkan atas hukum Islam.”

Disamping itu menurut Hizbut Tahrir, batas teritori entitas politik di era khilafah pada kenyataannya dapat meluas dan menyempit. Dikatakan dapat meluas karena entitas politik tersebut berhasil memperluas daerah kekuasaannya yang sebagian besar ditempuh melalui peperangan dengan entitas politik lainnya pada masa itu. Selain dapat meluas, batas teritorial entitas politik ini juga dapat mengecil atau menyempit yang disebabkan karena hilangnya daerah kekuasaan. Hilangnya daerah kekuasaan ini dapat disebabkan karena, misal: kalah dalam peperangan dengan entitas politik lainnya yang menyebabkan entitas politik khilafah harus menyerahkan daerah kekuasaannya tersebut kepada entitas politik lain.⁹ Dengan demikian, karakteristik dari batas teritorial entitas politik khilafah bersifat tidak tetap alias elastis.¹⁰

Konsep Negara-bangsa

Negara-bangsa telah menjadi entitas politik universal masa kini yang menandai berakhirnya entitas politik kerajaan di akhir abad ke-19. Untuk memudahkan pemahaman konsep negara-bangsa, penulis menggunakan perspektif tentang negara-bangsa yang diajukan oleh Benedict Anderson (*ibid*)¹¹ dan Anthony D. Smith¹² (1991, 1999, 2004). Anderson mendefinisikan negara-bangsa sebagai sebuah komunitas politik imajiner dan dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas dan berdaulat. Mengacu pada pendapat tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa warga

⁹ Untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah perluasan periode awal khilafah Islam, lihat Al-Baladhuri (2002)

¹⁰ Tindiyo (*ibid*).

¹¹ Benedict Anderson adalah Profesor Emeritus dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Cornell. Anderson menulis buku bersejarah tentang nasionalisme yang dijadikan rujukan oleh banyak ilmuwan sosial dan politik berjudul: “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism” (1991).

¹² Anthony D. Smith adalah Profesor di bidang Sosiologi di London School of Economic and Political Science. Smith telah menelurkan banyak buku yang berkaitan dengan wacana nasionalisme. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul, “The Ethnic Origins of Nations” (1991).

yang menempati suatu entitas politik yang dinamakan dengan negara-bangsa mampu membayangkan keberadaannya di dalam suatu entitas politik bersama dengan warga negara-bangsa yang lain, meskipun antara warga yang satu dengan yang lainnya belum pernah bertemu secara langsung. "Negara-bangsa itu merupakan hasil imajinasi, karena warga dari sebuah negara dengan luas geografis terkecil sekalipun tidak akan pernah mengenal seluruh warga negaranya; tidak pernah bertemu atau bahkan mendengar secara langsung. Akan tetapi, dalam benak kesadaran setiap warga negara-bangsa tersebut terdapat imajinasi (bayangan) tentang anggota warga negara-bangsa yang lain" (Anderson, *ibid.*).

Anderson berpendapat bahwa negara-bangsa itu memiliki batas, karena di luar negara-bangsa tersebut terletak kedaulatan negara-bangsa yang lain. Negara-bangsa memiliki batas geografis yang jelas, sehingga menjadi mudah untuk membedakan batas geografis antara negara-bangsa yang satu dengan yang lain.

"Negara-bangsa itu dibayangkan memiliki luas geografis yang terbatas, karena negara-bangsa dengan luas geografis terluas sekalipun, dan memiliki penduduk sebanyak satu miliar jiwa sekali pun, negara-bangsa tetap memiliki batas, dan di luar batas tersebut terdapat negara-bangsa yang lain" (*ibid.*).

Pendapat terakhir tentang negara-bangsa yang diungkapkan Anderson berikut ini dititikberatkan pada aspek kedaulatan (*sovereignty*). Ia mengatakan bahwa aspek kedaulatan dalam hal ini mengacu kepada kemerdekaan atau keadaan melepaskan diri dari kedaulatan Tuhan yang termanifestasikan ke dalam sistem kerajaan atau monarki yang lazim di era sebelum kebangkitan nasionalisme. Periode ini ditandai oleh kewenangan raja yang berhubungan erat dengan agama tertentu. Dengan kata lain, sumber hukum negara pada era monarki didasarkan pada hukum agama. Dengan demikian, warga entitas politik kerajaan pada masa itu harus mematuhi hukum negara yang tidak lain juga merupakan hukum Tuhan. Namun demikian, di era nasionalisme, hukum yang berlaku di sebagian besar negara-bangsa yang ada tidak mengacu kepada hukum agama tertentu.

"Negara-bangsa dibayangkan sebagai entitas yang berdaulat, karena konsep negara-bangsa tersebut lahir di abad pencerahan dan revolusi yang menghancurkan legitimasi kedaulatan Tuhan dan sistem monarki. Konsep ini memasuki kemapanan dalam tahapan sejarah umat manusia: bahkan para pengikut agama manapun yang taat dan fanatik sekalipun tidak bisa melarikan diri dari kehidupan masyarakat yang plural. Simbol dari kebebasan tersebut adalah negara-bangsa yang berdaulat" (*ibid.*).

Sementara itu, Anthony D. Smith berpendapat bahwa sentimen kepemilikan (ikatan solidaritas) sesama warga negara-bangsa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor itu diantaranya adalah: nama kolektif, mitos kolektif, sejarah kolektif, kebudayaan kolektif, identifikasi dengan suatu wilayah (teritori) tertentu, dan semangat persaudaraan.

Negara-bangsa cenderung untuk melanggengkan faktor-faktor pembentuk nasionalisme itu dengan berbagai media yang mungkin untuk kemudian dikembangkan atau diwariskan secara kultural di dalam masyarakat. Fondasi dari nasionalisme tersebut sangat penting dan merupakan fenomena alami yang ada dalam setiap periode sejarah umat manusia. Sentimen kesamaan terhadap nenek moyang, tanah air, bahasa, agama, dan sebagainya, adalah hal yang alami karena tidak hanya warga negara menemui sentimen-sentimen tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga karena sentimen kesamaan tersebut termanifestasi dalam sebuah kesatuan: masing-masing sentimen kesamaan itu saling mendukung satu sama lain.

“...negara-bangsa adalah sesuatu yang membutuhkan interpretasi ulang tanpa henti, penemuan kembali; masing-masing generasi harus menyesuaikan institusi-institusi nasional dan sistem stratifikasi berdasarkan mitos, ingatan, nilai, dan simbol masa lalu; yang mampu membantu memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari institusi dan kelompok sosial yang dominan” (Smith 1991).

Perbedaan Mendasar antara Khilafah dengan Negara-bangsa

Setidaknya terdapat empat perbedaan mendasar antara entitas politik khilafah dengan negara-bangsa. Perbedaan yang pertama adalah elemen batasan teritorial. Sudah menjadi hal yang lazim bahwa seluruh negara-bangsa di dunia ini memiliki garis batas teritorial fisik yang diimajinasikan oleh warga negaranya yang dijadikan landasan klaim warga negara tersebut terhadap negara-bangsanya, sebagaimana argumentasi Anderson (1991) bahwa negara-bangsa adalah entitas politik yang terbatas dan di luar batas teritorial negara-bangsa tersebut, terdapat negara-bangsa yang lain. Berbeda dengan negara-bangsa, khilafah tidak memiliki batas teritorial yang pasti (*finite*) dalam periode yang lama. Batas teritorial khilafah bersifat elastis: bisa mengecil dan meluas. Teritorial dapat meluas diartikan bahwa khilafah berhasil memperluas daerah kekuasaannya dan diartikan mengecil karena kehilangan daerah kekuasaannya yang disebabkan karena, misalnya, kalah perang dengan entitas politik lain.¹³

¹³ Tindiyo (ibid).

Elemen perbedaan kedua adalah sumber hukum yang berlaku. Dasar aturan hukum negara khilafah adalah hukum Islam, sebagaimana tertulis dalam pasal 7 naskah konstitusi negara khilafah yang menyatakan bahwa:

“Negara menerapkan hukum Islam kepada seluruh warga yang memiliki status kewarganegaraan tanpa kecuali, baik itu Muslim maupun bukan ...” (An-Nabhani 2002, hlm. 116).

Berbeda dengan entitas khilafah, negara-bangsa lahir akibat dari Revolusi Perancis dimana peran agama dan lembaga agama dipinggirkan secara radikal.¹⁴ Pada umumnya yang terjadi pada entitas negara-bangsa, agama dipinggirkan menjadi ranah individu, bukan ranah publik, sebagaimana diungkapkan oleh Anderson (ibid):

“...karena konsep negara-bangsa tersebut lahir di abad pencerahan dan revolusi yang menghancurkan legitimasi kedaulatan Tuhan dan sistem monarki ... bahkan para pengikut agama manapun yang taat dan fanatik sekalipun tidak bisa melarikan diri dari kehidupan masyarakat yang plural...”

Beberapa kalangan mungkin saja berpendapat bahwa Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum Islam sebagai hukum publik. Namun, menurut Hizbut Tahrir, kedua negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai representasi negara Islam (khilafah) karena untuk konteks Arab Saudi, hukum Islam tidak diterapkan secara total. Sementara untuk Iran, Hizbut Tahrir menyatakan bahwa bentuk kenegaraan Iran berbentuk republik. Bentuk republik dinilai tidak bersesuaian dengan konsep khilafah (Abidin 2004).

Elemen perbedaan ketiga adalah keberadaan paham nasionalisme di dalam entitas negara-bangsa. Nasionalisme diyakini sebagai suatu sentimen yang tidak terpisahkan dari entitas negara-bangsa. Nasionalisme didefinisikan sebagai sentimen kesetiaan atau kepemilikan diantara warga terhadap negara-bangsanya (Smith 2000). Smith (1991) berpendapat bahwa elemen kesetiaan atau kepemilikan terhadap negara-bangsa (nasionalisme) tersebut ditumbuhkan melalui memori kolektif dan sejarah masa lalu yang terus menerus dikembangkan dan diwariskan oleh pemerintah entitas negara-bangsa. Elemen nasionalisme itulah yang menjadi landasan ikatan solidaritas yang menyatukan sesama warga negara di dalam entitas negara-bangsa.

¹⁴ Revolusi Perancis dianggap berperan dalam merubah tatanan politik dari entitas kerajaan menjadi negara-bangsa. Untuk sejarah Revolusi Perancis, lihat Doyle (2003).

Berbeda dengan entitas negara-bangsa, ikatan solidaritas entitas khilafah tidak dibangun atas dasar sentimen nasionalisme, melainkan atas dasar Islam yang tidak saja dipahami sebagai ritual, tetapi juga sebagai ideologi. Hizbut Tahrir bahkan secara tegas mengutuk paham nasionalisme dan menjadikannya sebagai biang keladi perpecahan umat Islam sedunia. Hizbut Tahrir mengutuk nasionalisme dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Nasionalisme adalah ikatan kesukuan yang dapat menciptakan konflik diantara sesama manusia demi pencapaian dominasi kekuasaan;
- 2) Nasionalisme adalah ikatan emosional yang muncul akibat kebutuhan untuk mempertahankan hidup, sehingga melahirkan sentimen kecintaan yang tidak pada tempatnya;
- 3) Nasionalisme adalah landasan ikatan sesama manusia yang tidak manusiawi karena menyebabkan konflik demi pencapaian dominasi kekuasaan (An-Nabhani 2002, hlm. 34). Hizbut Tahrir kembali mempertegas bahwa Islam adalah landasan pemersatu warga atau umat di dalam entitas khilafah di dalam pasal 1 naskah konstitusi negara khilafah yang menyatakan bahwa akidah (keyakinan) Islam adalah landasan negara. Landasan negara disini tidak hanya dimaksudkan sebagai landasan hukum negara/publik, melainkan juga landasan sosial, budaya, dan bahkan ideologi warga khilafah yang sekaligus berfungsi sebagai landasan pemersatu atau pengikat solidaritas. Elemen perbedaan keempat adalah perbedaan pemahaman konsep kedaulatan (*sovereignty*) dan kekuasaan (*power*) antara entitas khilafah dengan negara-bangsa. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa negara-bangsa tidak mengenal pembedaan antara kedua konsep tersebut. Entitas negara-bangsa – sebagaimana telah diyakini secara umum – meletakkan sumber kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat (*the people*).¹⁵ Berbeda dengan negara-bangsa, entitas khilafah menyatakan bahwa sumber kedaulatan (*sovereignty*) berada di tangan hukum Islam, sementara sumber kekuasaan (*power*) berada di tangan umat (warga) yang diwakilkan melalui khalifah (pemimpin).

¹⁵ Untuk analisis tentang relasi negara-bangsa (*nation-state*) dan kedaulatan (*sovereignty*), lihat Benoist (1999).

Tabel: Perbedaan Elemen Dasar antara Entitas Khilafah dengan Negara-bangsa

No.	Elemen Dasar	Khilafah	Negara-bangsa
1.	Batas Teritorial	Elastis	Relatif Tetap
2.	Sumber Ikatan Solidaritas	Islam	Nasionalisme
3.	Sumber Hukum	Islam	Sekuler
4.	Sumber Kedaulatan	Hukum Islam	Rakyat
5.	Sumber Kekuasaan	Umat	Rakyat

Kesimpulan

Hizbut Tahrir sebagai organisasi gerakan Islam transnasional memiliki tujuan politik utama untuk menegakkan kembali khilafah, yaitu entitas politik yang berdasarkan hukum Islam. Penegakan khilafah, disamping penerapan syariah, adalah slogan utama yang selalu didengungkan organisasi ini dalam setiap aktivitasnya seperti demonstrasi, diskusi publik, konferensi, dan lain sebagainya. Gagasan tentang pendirian khilafah membuktikan bahwa organisasi ini tidak menyetujui konsep entitas politik modern yang telah berlaku universal saat ini, yaitu negara-bangsa.

Setelah dilakukan analisis terhadap karakteristik konsep khilafah menurut Hizbut Tahrir dan negara-bangsa, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Pertama, sementara khilafah didasarkan atas syariah atau hukum Islam sebagai panduan bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sebagian besar negara-bangsa pada kenyataannya tidak merujuk agama sebagai landasan hukum. Bagi sebagian besar negara-bangsa, agama adalah urusan yang bersifat privat, bukan publik. Kedua, entitas negara-bangsa memiliki batas teritorial yang relatif tetap. Jika ada suatu negara-bangsa yang mencoba menginvasi negara-bangsa lain dengan tujuan untuk memperluas batas teritorialnya tentu akan mendapat tentangan dari lembaga internasional Perserikatan Bangsa-bangsa. Berbeda dengan negara-bangsa, entitas khilafah dalam sejarahnya mengenal dan mengalami istilah perluasan maupun berkurangnya wilayah teritorial akibat peperangan, sehingga dapat dikatakan batas teritorialnya bersifat tidak tetap alias elastis.

Ketiga, sudah lazim di dalam entitas negara-bangsa, warga negara memiliki sentimen nasionalisme yang merupakan sentimen pengikat solidaritas (kebangsaan) sesama warga negara sekaligus juga sentimen kesetiaan terhadap negara-bangsanya.

Khilafah tidak mengenal sentimen nasionalisme sebagai sumber ikatan solidaritas warga negaranya. Menurut khilafah, Islam adalah landasan dan panduan dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, negara-bangsa meletakkan unsur rakyat sebagai sumber kedaulatan (*source of sovereignty*) dan sumber kekuasaan (*source of power*), sementara sumber kedaulatan menurut konsep khilafah adalah hukum Islam dan sumber kekuasaan adalah rakyat (umat).

Daftar Pustaka

- Abedin, Mahan. 2004. "Inside Hizb ut-Tahrir: An Interview with Jalaluddin Patel, Leader of the Hizb ut -Tahrir in the UK." *Terrorism Monitor* 2(8): 1-2.
- Al Baladhuri, Abul Abbas Ahmad Ibnu Jabir. Trans. Philip Khuri Hitti. *The Origins of the Islamic State - Kitab Futuh al-Buldan*. Georgia Press, 2002.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- An-Nabhani, Taqiuddin. 2002. *The- System of Islam: Nidham ul Islam*. London: Al-Khilafah Publications.
- Benoist, Alain de. 1999. "What is Sovereignty." *Telos* 1999 (116): 99-118.
- Commins, David. 1991. "Taqi al-Din al-Nabhani and The Islamic Liberation Party." *The- Muslim World* 81(3-4): 194-211.
- Doyle, William. 2003. *The Oxford History of The French Revolution*. Oxford University Press.
- Munabari, Fahlesa. 2010. "Hizbut Tahrir Indonesia: The Rhetorical Struggle for Survival." In *Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia*, edited by Atsushi Ota, Okamoto Masaaki, and Ahmad Suaedy, pp. 173-217. Kyoto-Taiwan-Jakarta: CSEAS, Academia Sinica, and the Wahid Institute.
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Re-vivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Smith, Anthony D. 1991. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell Publishing.
- _____. 1999. *Myths and Memories of The Nation*. Oxford: Oxford University Press
- _____. 2004. *Nationalism*. Cambridge: Polity Press.

Sumber Internet

Antara. 19 Desember 2008. "Muslimah HTI Tuntut Penegakan Khilafah." <http://www.antaraneews.com/view/?i=1229683022&c=NAS&s=> (diakses 27 Januari 2012).

Detikfoto. 21 April 2011. "HTI Kampanye Hidup Sejahtera di Bawah Khilafah." <http://foto.detik.com/readfoto/2011/04/21/153040/1622930/157/4/hti-kampanye-hidup-sejahtera-di-bawah-khilafah> (diakses 27 Januari 2012).

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KRISIS EKONOMI DI KOREA SELATAN PERIODE 1997-1998

Jeanie Annissa, S.IP, M.Si¹

Jenny_unas@yahoo.com

Abstract

In the principle, this paper indicates about the crisis in Asia, particularly in South Korea did not surprise many, as some observers who see the condition of South Korea explained that the country is experiencing a severe crisis. Over the last five years, since the crisis has been a lot of analysis and hypotheses about the causes of the economic crisis affecting multidimensional both in general and specifically the focus of the economic crisis of South Korea. In the early days of the crisis, this is still a speculative analysis of competing hypotheses and assume that one has been able to explain the cause rather than another hypothesis. South Korean experts say, that the cause of the crisis factor of the trigger factor, intermediate factors, and a deep causes.

Keywords : *Economy Crisis, South Korea*

Kronologis Krisis Ekonomi Di Korea Selatan

Sejak tahun 1996, krisis ekonomi di Korea Selatan sebenarnya sudah bisa dirasakan. *Far Eastern Economic Review* pada tahun tersebut mencatat bahwa ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa perekonomian Korea Selatan menurun kinerjanya² dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang impresif yaitu sekitar 9,0% pada tahun 1995. Kemudian mengalami penurunan hingga 7,0% pada tahun 1996. Penurunan ini juga ditandai dengan defisit anggaran belanja yang sangat besar hingga mencapai \$15,2 milyar hanya dalam waktu 8 bulan pertama di tahun 1996. Kondisi ini jumlahnya dua kali lipat dari anggaran di tahun 1995. Pada kenyataannya defisit mencapai \$23,7 % untuk keseluruhan tahun tersebut.³

Selanjutnya, untuk menunjukkan fenomena penurunan kinerja perekonomian Korea Selatan pada tahun 1996, sektor eksternal juga menunjukkan kontraksi yang besar karena harga komoditi ekspor Korea Selatan juga mengalami penurunan. Kinerja ekspor ini semakin parah akibat penurunan nilai produk lain seperti petrokimia, baja, dan pembuatan kapal.

¹ Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Budi Luhur

² *Far Eastern Economic Review*, Asia Year Book, 1997, hal. 153.

³ *Ibid.*

Kondisi ini yang disalahkan adalah depresiasi Yen Jepang. Mata uang Jepang mengalami penurunan sebanyak 17 % pada mata uang Won, sehingga membuat harga barang-barang Korea Selatan menjadi mahal di pasaran negara berkembang. Padahal, harga impor barang yang masuk ke Korea Selatan tidak berubah, meskipun volumenya turun sebanyak 11% sampai pertengahan tahun.

Tanda-tanda lain yang menunjukkan bertambah parahnya perekonomian Korea Selatan adalah meningkatnya hutang luar negeri secara cepat karena defisit perdagangan yang terjadi. Pada tahun 1996, hutang Korea Selatan diperkirakan sekitar \$100 milyar terhadap kreditor internasional. Hal ini semakin membuat Korea Selatan menjadi negara ketujuh dengan jumlah hutang terbesar. Pada tahun ini banyak pengamat yang menyatakan bahwa Korea Selatan terlalu cepat mengembangkan industrinya di Luar Negeri dengan terlalu banyak bergantung pada sumber pembiayaan hutang.⁴

Tahun 1997, dimulai dengan timbulnya demonstrasi dan mogok kerja besar-besaran oleh pekerja yang tidak menyetujui rencana pengesahan Undang-Undang yang melegalkan pemutusan kerja, tetapi tetap membatasi kegiatan serikat pekerja dengan ketat. Mogok kerja ini mengakibatkan kehilangan *output* nasional sebesar \$3,15 milyar sebelum pemerintah akhirnya mengalah dengan Undang-Undang yang lebih lunak. Tetapi, tahun ini lebih dikenal sebagai tahun kebangkrutan. Bahkan, sebelum bangsa Korea Selatan bisa bernafas lega setelah masalah pemogokan tersebut, salah satu kelompok konglomerasi nomor 14 terbesar di Korea Selatan, Hanbo mengalami kemacetan dalam membayar hutang dengan jumlah 5 trilyun Won, jumlah ini dinilai 16 kali lebih besar dari modal Hanbo.

Kasus ini kemudian berkembang menjadi isu nasional ketika diketahui bahwa pemilik Hanbo, Cheng Tai So, telah menyogok banyak bankir dan politisi untuk mendapatkan jumlah hutang sebanyak itu guna membangun pabrik bajanya. Diantara nama-nama yang terlibat diantaranya adalah Kim Hyun Chul yang merupakan anak seorang mantan presiden Kim Young Sam, meskipun keterlibatannya gagal dibuktikan tetapi dia tetap dipenjara selama tiga tahun dengan tuduhan melakukan penggelapan pajak. Dari latar belakang masalah inilah, maka para pengamat Korea Selatan menganggap bahwa perekonomian Korea Selatan masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dianggap menjadi awal kebangkrutan dari banyak kelompok Chaebol (Konglomerat) lainnya.

Pada tanggal 20 Maret 1997 salah satu pabrik pembuat baja mengalami kebangkrutan karena gagal membayar hutangnya kemudian

⁴ *Ibid*

disusul lagi dengan kelompok usaha terbesar nomor 19 di Korea Selatan yaitu Jinro yang tidak dapat membayar hutangnya sebanyak 3 triliun Won. Akhirnya pemerintah melakukan campur tangannya dengan membentuk tim aliansi anti kebangkrutan untuk menyelamatkan para pengusaha lainnya dari kebangkrutan dengan cara menunda pembayaran hutang yang jatuh tempo dan menambah pinjaman darurat supaya operasi perusahaan terus berjalan.

Selanjutnya di pertengahan Juli tahun 1997, Kelompok Konglomerasi KIA, pabrik pembuat mobil terbesar ketiga di Korea Selatan mengalami kebangkrutan, kesehatan keuangan KIA telah lama dilakukan spekulasi ketika KIA harus bersaing dan kalah dengan industri lainnya seperti Daewoo dan Hyundai, kemudian masalah operasi konstruksi dan baja yang mengalami kerugian. Ketika Samsung berniat mengambil alih KIA dan mengkritik manajemen keuangannya yang akhirnya membuat para kreditor menarik uangnya dari perusahaan mereka. Masalah lainnya adalah bahwa KIA tidak bersedia memberikan manajemen control, padahal kreditor pada saat itu tidak akan menyetujui paket penyelamatan tanpa peralihan manajemen dan hingga bulan September masalah ini masih belum selesai.

Pada akhir musim panas, pasar keuangan Korea Selatan mengalami kepanikan karena para investor bersiap-siap menarik uang mereka. Hal ini ditambah lagi dengan krisis mata uang yang terjadi di Asia Tenggara yang efeknya telah mengepung Korea Selatan. Kondisi ini dapat dimengerti karena sebagian besar produk Korea Selatan di ekspor ke wilayah Asia Tenggara, sehingga kekacauan ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara pasti memberikan dampak yang cukup berarti bagi Korea Selatan.

Sementara itu di dunia internasional telah tersiar kabar bahwa cadangan devisa di Korea Selatan jauh lebih rendah dari yang telah diumumkan oleh pemerintah. Terutama isu-isu yang berkembang di *wall street* yang menyatakan bahwa Korea Selatan berada dalam masalah. Negara ini tidak akan memperpanjang pinjamannya dari Bank-Bank Eropa dan Amerika yang sudah jatuh tempo dan juga tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk membayar semua hutang-hutang tersebut. Isu-isu ini akhirnya menjadi kenyataan yang menyebabkan bank-bank internasional dan para kreditor menolak untuk memperpanjang pinjaman mereka. Akibatnya, pelarian modal secara besar-besaran dari Korea Selatan menjadi tidak terhindarkan, sama seperti yang dialami negara-negara Asia Tenggara. Sebagai perbandingan masuk dan keluarnya modal antara tahun 1994-1996, negara-negara Asia kemasukan modal sebesar \$184 milyar pada tahun 1996 saja modal masuk sebesar \$94 Milyar dan menurun lagi tahun 1997 menjadi sebesar US\$ 70 miliar. Di lain pihak, modal yang keluar pada tahun 1997 semester kedua saja mencapai US\$102

Milliar.⁵ Efeknya pada Korea Selatan adalah US\$1 milyar ditarik dari pasar saham Korea Selatan hanya selama bulan oktober 1997 saja.⁶

Kondisi yang terjadi diatas, akhirnya memberikan dampak pada tekanan kestabilan mata uang Won Korea Selatan yang sebagaimana diketahui rezim *Fixed Rate*⁷ para spekulan mulai melancarkan serangannya terhadap mata uang ini karena mereka mempercayai isu bahwa cadangan devisa pemerintah untuk mempertahankan nilai Won tidak akan cukup. Mata uang Won akhirnya Collapse. Pertama-tama melewati batas 100 Won per dollar kemudian mencapai angka 2000 pada awal tahun 1998.⁸ Pemerintah akhirnya membiarkan mata uang Won mengambang tanpa berusaha mengintervensi karena kehabisan cadangan devisa.

Efek dari kejadian tersebut membawa Korea Selatan terkena dampak krisis Asia yang telah mulai sejak jatuhnya mata uang Bath pada tanggal 2 Juli 1997. Tabel dibawah ini menggambarkan kondisi Korea Selatan pada saat akan dan awal terjadinya Krisis sebelum Korea Selatan meminta bantuan IMF.

Tabel I
Pergerakan Mata Uang Dan Pasar Saham Korea Selatan presentase perubahan, 01 Juli 1997-15 September 1998

Mata Uang Terhadap US \$	Stock Market	
	Dalam Won	Dalam US
-36	-59	-74

Sumber : Hall Hill mengutip dari Evans (1998)⁹

Tabel II
Indikator Ekonomi Yang berhubungan Dengan Krisis Ekonomi (Dalam Persentase)

	1995	1996	1997
GDP Growth Rate (%)	8,9	6,8	5,0
Terms Of trade (1994=100)	90,5	88,1	84,2
Current Account (US\$ bil)	-8,5	-23,0	-8,2
Foreign Reverse (US\$ bil)	32,7	33,2	20,4
Current Account/ GDP(%)	-1,9	-4,7	-1,9
Fiscal Account/ GDP (%)	0,5	0,0	-0,0

⁵ Kim In Jun, *One Year Under IMF*, Korea Focus, (Vol.6/6, Nov-Des, 1998), hal.3.

⁶ Taufiq Tanahsaldy, *Kebijakan Pembaharuan Ekonomi Korea Selatan Dalam Mengatasi Krisis: Restrukturisasi Bidang Finansial Dan Korporasi*, Global, 7/2001, hal. 34.

⁷ Ross Garnaut, *Exchange Rate In The East Asia Crisis*, ASEAN Economic Bulletin, Vol. 15, No.3, Desember 1998.

⁸ *Ibid*, Taufiq Tanahsaldy, hal. 31.

⁹ Hal Hill, *An OverView Of the Issues*, ASEAN Economic Bulletin, Vol.15 No.3, Desember 1998.

Total External debt (US\$ bil)	127,5	163,5	159,2
Long Term (US\$bil)	55,6	70,2	95,7
Short Term (US\$ bil)	71,9	93,3	63,6

Sumber : Doo-Yong Yang mengutip Bank Sentral Korea Selatan, 2002.

Pada tabel I diatas terlihat bahwa pada semester akhir 1997 sampai dengan semester awal tahun 1998, mata uang Won mengalami depresiasi sebesar 36% terhadap dollar AS dari nilai awalnya. Sedangkan pasar saham mengalami penurunan yang juga sangat drastis yaitu sebesar 59% (dalam mata uang won) dan penurunan sebesar 74 % (dalam dollar AS). Hal ini mengindikasikan tingginya tekanan terhadap mata uang lokal dan tingginya penarikan modal (*capital flight*) dalam pasar saham Korea Selatan.

Tabel II diatas menunjukkan bahwa secara umum semua indikator ekonomi Korea Selatan memburuk pada tahun 1996 dan 1997. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai hampir 9% pada tahun 1995 menurun menjadi hanya 6,8% pada tahun 1996 dan lebih buruk lagi hanya mencapai 5,0% pada tahun 1997. *Terms of trade* juga memburuk dibandingkan dengan indikator yang sama tahun 1995. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri Korea Selatan tidak memberi nilai tambah bahkan lebih banyak mengurangi nilai yang ada seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa *current account*, *capital account* dan devisa luar negeri mengalami penurunan karena ekspor yang terus menurun nilainya dibandingkan impor pembayaran hutang jangka pendek dan juga pemerintah mencoba mempertahankan nilai won terhadap depresiasi terutama terhadap serangan spekulasi. Disisi lain, hutang jangka pendek terus bertambah dari US\$ 71,9 milyar pada tahun 1995 menjadi US\$93,3 miliar pada tahun 1996 meskipun di tahun 1997 mengalami penurunan menjadi US\$63,6. Tetapi hal ini mungkin lebih disebabkan oleh pengalihan hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang dan sudah jatuh temponya hutang-hutang tersebut serta sudah terbatasnya sumber hutang pada saat itu akibat ketidakpercayaan. Seperti yang telah digambarkan pada halaman sebelumnya, bahwa hutang yang jatuh tempo dan hutang jangka pendek menjadi penyebab banyaknya perusahaan Korea Selatan *collapse*.

Usaha-usaha darurat dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan moneter yang ketat, kebijakan fiskal yang hati-hati dan penutupan lembaga keuangan yang tidak sehat segera mungkin. Pemerintah Korea juga diminta melakukan reformasi ekonomi dalam bidang korporasi dan pasar tenaga kerja. Akibat krisis Korea Selatan mempunyai akar pada melemahnya fundamental perekonomiannya, maka usaha menstabilisasi hanya pada sektor keuangan tanpa suatu usaha untuk

mereformasi struktur. Hal ini seperti mengobati gejala tanpa melihat sebab-sebabnya. Jadi, sejak timbulnya krisis Korea Selatan tahun 1997, pemerintah Korea Selatan telah melaksanakan usaha reformasi sektor publik untuk mencapai efisiensi yang dibutuhkan sebagai penyeimbang reformasi sektor lain.

Penyebab Krisis ekonomi Korea Selatan Secara umum

Bagian kronologis krisis berguna untuk menggambarkan situasi dan latar belakang terjadinya krisis yang merupakan bagian awal dari tinjauan umum krisis Korea Selatan. Selanjutnya akan dipaparkan faktor-faktor terjadinya krisis menurut pakar ekonomi. Pendapat para pakar tersebut dimasukkan kedalam klasifikasi Joseph S. Nye, Jr. yaitu faktor-faktor penyebab yang lebih dalam, faktor penyebab utama, dan terakhir adalah faktor pemicu. Kebanyakan pendapat ahli menganalisis sesuatu yang dilakukan ketika krisis telah selesai sehingga analisis tentang penyebab krisis yang lebih mendalam dan lebih dapat diterima oleh dunia akademis. Diharapkan paparan ini akan berguna sebagai kerangka yang lebih umum dan referensi bagi pembahasan tentang sudut pandang IMF dan negara tentang penyebab krisis.

1. Kelompok Faktor Pemicu Sebagai Penyebab Krisis

faktor yang selama ini dianggap sebagai penyebab langsung, antara lain adalah *Pertama*, kepanikan dalam sektor finansial yang disebabkan oleh berbagai macam *intermediate causes*. Banyak pengamat yang menganggap bahwa pangkal krisis Korea Selatan adalah kepanikan yang berlebihan dari para kreditor dan pemilik modal asing. Kepanikan ini menyebabkan penolakan kreditor asing untuk memperpanjang pinjamannya, *capital outflow serta currency crisis* (pemegang won akan cepat-cepat menukarkan uangnya kedalam dollar sehingga meningkatkan tekanan yang besar terhadap won.

Kedua, penolakan kreditor luar negeri untuk memperpanjang hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo dari perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Penolakan ini mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak mampu membayar hutang yang sudah jatuh tempo tersebut.¹⁰

Ketiga, Capital outflow oleh investor baik dalam pasar uang dalam bentuk *short term loan* yang sangat singkat, pasar modal dalam bursa saham perusahaan dalam negeri (seperti para spekulasi) atau investor dalam bentuk FDI yang mencurigai akan terjadinya krisis, dan dengan cepat akan meninggalkan Korea Selatan.

¹⁰ *Op.Cit*, Stiglitz, hal. 94.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut maka dapat menyebabkan berbagai macam krisis yang terdiri atas krisis likuiditas, krisis perbankan, krisis mata uang, dan pengurangan cadangan devisa. Kombinasi dari krisis besar ini secara bersamaan membawa Korea Selatan meminta bantuan IMF dan masuk ke dalam krisis ekonomi yang parah di akhir tahun 1997 dan awal 1998. Menurut para ahli krisis ini disebabkan berdasarkan multifactor, meskipun keadaan fundamental ekonomi Korea Selatan sedang menurun tetapi krisis ekonomi tidak terjadi begitu saja tanpa terjadi kepanikan yang berlebihan. Sedangkan kepanikan yang berlebihan tidak akan dengan sendirinya menimbulkan krisis jika tidak disertai dengan penolakan memperpanjang hutang dan pelarian modal serta tindakan pemerintah untuk mempertahankan tingkat mata uang dan perusahaan yang bermasalah.

2. Kelompok Faktor Antara Sebagai Penyebab Krisis

Faktor penyebab krisis lainnya adalah faktor antara yang diduga juga sebagai penyebab terjadinya faktor pemicu. Meskipun demikian, interaksi antara faktor dapat saling mempengaruhi dan juga bisa langsung mempengaruhi krisis. Faktor yang termasuk dalam kelompok ini terdiri atas:

Pertama, Cadangan devisa tidak mencukupi. Kemudian terungkap bahwa jumlah cadangan devisa yang ada tidak setinggi cadangan devisa yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. *Kedua*, rezim nilai tukar yang dianut juga mempengaruhi terjadinya krisis. Korea Selatan secara de facto menganut nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah.¹¹ Dengan demikian pemerintah mempunyai komitmen untuk mempertahankan nilai won pada tingkat tertentu. Pada tahun-tahun sebelum terjadinya krisis, sistem ini membantu terciptanya stabilitas mata uang dan perekonomian secara umum sehingga menambah kepercayaan investor luar negeri. Dengan demikian sedikit banyak sistem mata uang yang dianut menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang menakjubkan. Mata uang won tidak akan dibiarkan terdepresiasi secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar tetapi usaha untuk mempertahankan mata uang ini menghabiskan devisa. Serangan terhadap nilai won juga mengakibatkan krisis mata uang. Pada akhirnya pemerintah membiarkan mata uang mengambang.

Ketiga, isu-isu yang bersifat *self-fulfilling prophecies* juga berperan dalam menimbulkan kepanikan secara finansial. Konsep ini sendiri berarti berita-berita atau ramalan yang belum diketahui kebenarannya tetapi karena diyakini kebenarannya oleh para pelaku ekonomi maka berita

¹¹ Ross Garnout, *exchange Rate In The East Asia Crisis*, Asean Economic Bulletin, Vol. 15 no. 3 tahun 1998, hal. 329.

tersebut lambat laun menjadi kenyataan. Dalam kasus Korea Selatan isu yang menyatakan bahwa Korea Selatan tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk membayar hutang yang jatuh tempo dan mempertahankan mata uangnya, kondisi ini akhirnya membawa spekulasi menyerang won, kreditor menolak memperpanjang hutang-hutang di Korea Selatan dan para investor menarik modalnya secara besar-besaran sehingga membawa kondisi Korea Selatan menjadi *Collapse*.

Kejadian ini sama seperti yang digambarkan oleh Diamond & Dybvig mengenai kesulitan likuiditas bank karena diserbu nasabah yang menarik simpanan mereka di bank (*bank runs*)¹² banyak hal yang membuat isu-isu timbul, diantaranya :

1. Terungkap kabar bahwa cadangan devisa Korea Selatan jauh lebih kecil dari yang diumumkan pemerintah secara resmi;
2. Jumlah hutang jangka pendek yang besar dengan jumlah jatuh tempo yang singkat, kondisi ini secara tidak langsung akan menjadi polemik yang sulit untuk dikendalikan nantinya;
3. Efek domino dari krisis Asia Tenggara, membuat banyak kreditor luar negeri di Korea Selatan menjadi sensitif dan reaktif terhadap berbagai macam berita.
4. Ketiga kombinasi di atas membawa dampak terhadap ketidakpercayaan para pelaku ekonomi terhadap kemampuan ekonomi Korea Selatan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Ketidakpercayaan ini dicerminkan dengan penolakan perpanjangan hutang dan pelarian modal keluar negeri.

Keempat, adanya efek berantai dari krisis yang terjadi di Asia Tenggara akhirnya dirasakan juga oleh Korea Selatan. Penurunan ekspor Korea Selatan di wilayah Asia Tenggara mempengaruhi kinerja perekonomian Korea Selatan.

Kelima, tingginya hutang jangka pendek (kurang dari setahun) sektor swasta yang telah jatuh tempo merupakan timbulnya penyebab krisis. Pada tahun 1996, jumlah total hutang luar negeri Korea Selatan adalah US\$163,5 billion dengan hutang jangka pendek berjumlah US\$93,3 billion. Pada tahun 1997, total hutang Korea Selatan turun sedikit menjadi US\$159,2 billion dimana US\$63,6 billion merupakan hutang jangka pendek. Dari angka-angka ini terlihat bahwa jumlah hutang jangka pendek Korea Selatan cukup besar. Dari tahun 1996 ke 1997 hutang jangka pendek berkurang US\$29,7 billion, berarti perekonomian pada tahun itu telah mengeluarkan jumlah yang besar sekali untuk membayar hutang.

¹² *Ibid*, Ross Garnout, hal. 329.

3. Kelompok Faktor yang lebih dalam sebagai penyebab krisis

Kelompok penyebab ketiga adalah *Deep factors* yaitu penyebab-penyebab yang sudah berjalan jauh sebelum krisis meledak. faktor ini merupakan kondisi penting untuk menyebabkan krisis. Tanpa kondisi ini, krisis tidak akan terjadi tetapi faktor-faktor ini tidak cukup untuk menyebabkan meledaknya krisis, diperlukan sebab-sebab antara dan sebab-sebab pemicu. Kelompok faktor ini terdiri atas:

Pertama, kinerja perekonomian Korea Selatan menjelang terjadinya krisis yang telah mengalami penurunan, paling tidak sejak tahun 1996, indikator makro ekonomi menunjukkan bahwa kinerja perekonomian semakin memburuk yang ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan GDP. Demikian juga faktor eksternal, yaitu *terms of trade* yang menunjukkan keuantungan yang didapat dari perdagangan internasional yang terus jatuh dibawah indeks 100 (1994) menjadi 90,5 pada tahun 1995, menurun menjadi 88,1 di tahun 1996 dan turun lagi menjadi 84,2 pada tahun 1997. Di lain pihak *current account* terus menerus negatif setelah sempat positif pada tahun 1993. Angka negatif ini menunjukkan melemahnya ekspor dibandingkan impor. Sementara itu total hutang luar negeri terus meningkat, terutama hutang jangka pendek yang menunjukkan proporsi yang terus meningkat dibandingkan dengan hutang jangka panjang.

Kedua, terjadinya proses penurunan produktifitas dan kemampuan untuk mengembalikan *return* terhadap modal dari perekonomian Korea Selatan jauh sebelum krisis terjadi. Jim Rohwer menyebut proses ini sebagai proses penghancuran nilai modal, dimana modal yang ditanamkan kedalam perekonomian Korea Selatan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih rendah daripada ongkos modal tersebut.¹³ Hal ini mengakibatkan perekonomian Korea Selatan dalam waktu panjang, bahkan sejak pertengahan 1980-an sampai dengan tahun 1997 harus mengganti sebagian *cost of capital* karena usaha yang menggunakan modal ini tidak dapat menghasilkan *return* sebesar *cost of capital*nya.

Uraian indikator-indikator berikut memberikan bukti-bukti:

- a. Tanda pertama dari menurunnya produktifitas perekonomian Korea Selatan adalah seperti yang dilaporkan oleh bank Dunia bahwa pada periode antara pertengahan 1990-an Korea Selatan mengalami peningkatan *incremental capital-output ratio*. hal ini menandakan bahwa untuk mempertahankan output yang sama maka negara ini harus menanamkan modal yang semakin besar. Kenyataan ini terlihat dari perbandingan antara laju investasi (yang menunjukkan besarnya modal yang ditanamkan) dan peningkatan GDP (yang menunjukkan output

¹³ Jim Rohwer, *Remade In America: How Will Change Because America Boomed*, New York, Crown Business, 2001, hal. 49.

yang dihasilkan). Dari perbandingan yang ada terlihat bahwa investasi semakin lama semakin melampaui GDP dalam periode tersebut.

- b. berhubungan dengan point pertama, yaitu indikator pengembalian terhadap setiap modal yang ditanamkan, yang disebut *return on equity* (ROE). performa perusahaan biasanya diukur oleh banyak indikator, tetapi ROE ini akan menunjukkan apakah perusahaan akan mengalami kesuksesan atau tidak. Berikut ini adalah perkembangan ROE Korea Selatan dari Tahun 1991-1997 :

Tabel II.3
ROE Korea Selatan 1991-1997
Dalam Presentase

Tahun	ROE (%)
1991	8,5
1992	5,8
1993	5,0
1994	7,3
1995	8,6
1996	1,2
1997	-2,8

Sumber : Jim Rohwer yang mengutip dari Rjiv Lall & Warburg Pincus

Selama tiga tahun (1991-1993) terlihat bahwa ROE Korea Selatan menurun terus menerus. Meskipun selama dua tahun berikutnya yakni antara tahun 1994-1995 ROE meningkat menjadi 7,3 % pada tahun 1994 dan 8,6 % pada tahun 1995. Dua tahun berikutnya, ROE menurun drastis yaitu hanya 1,2 % pada tahun 1996 dan bahkan -2,8 % pada tahun 1997. Indikator diatas menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata perusahaan Korea Selatan untuk menghasilkan return dari modal yang diinvestasikan semakin berkurang.

Ketiga, penyebab selanjutnya yang cukup berpengaruh adalah dominasi dan tingkah laku para Chaebol di Korea Selatan. Munculnya Chaebol tidak dapat dipisahkan dengan strategi kebijakan pemerintah yang menyebabkan pertumbuhan Korea Selatan selama tiga puluh tahun dengan hasil yang menakjubkan. Dengan bantuan pemerintah, perbankan menyalurkan kredit kepada pihak-pihak yang dipilih yang nantinya menghasilkan Chaebol atau yang lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi.

Chaebol merupakan sumber pertumbuhan, tetapi juga Chaebol merupakan sumber inefisiensi yang pada gilirannya akan menimbulkan bibit-bibit krisis. Konsentrasi perekonomian Korea Selatan yang berpusat pada chaebol terlihat bahwa sebelum krisis 30 Chaebol teratas dalam

hitungan menguasai 40% output dalam sector manufaktur atau bahkan bisa mencapai 60 % total output. Dari jumlah tersebut lima Chaebol teratas yaitu , Hyundai, Samsung, Daewoo, LG, dan SK menguasai hampir 75 % serta hampir keseluruhan total perusahaan-perusahaan Korea Selatan. Semakin dekat ke krisis semakin proporsi penguasaan Chaebol semakin besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa para Chaebol lebih mementingkan ekspansi bisnis daripada *return on capital*, *return on equity*, serta *earning per share* yang mengakibatkan menurunnya tingkat produktifitas.

Keempat, adalah penyebab *deep causes* yang banyak disebut oleh pengamat yaitu penyebab yang bersifat struktural. Menurut Jim Rohwer¹⁴ penyebabnya cukup beragam, yaitu :

1. Sumber permodalan yang murah karena tabungan domestic yang tinggi;
2. Kelemahan institusi atau lembaga;
3. Negara *developmental state* menimbulkan kepercayaan dan anggapan yang berlebihan kepada pihak dalam dan luar negeri.

Kelemahan *system developmental state* sebagai bagian dari kelemahan structural menurut Stephen Haggard, yaitu :

1. Kelemahan struktural dimana ada kecenderungan terciptanya konsentrasi yang terlalu berlebihan pada suatu kelompok kekuatan ekonomi tertentu seperti Chaebol di Korea Selatan atau konglomerasi keturunan China di Indonesia. Konsentrasi menciptakan kekuasaan (*power*) yang berlebihan dapat mempengaruhi negara untuk berpihak pada kepentingan kelompok ini. Konsentrasi struktural ini bahkan beresiko merambah ke bidang-bidang lain dan menciptakan mafia-mafia politik serta konspirasi sosial budaya.
2. Kecenderungan terciptanya moral *hazard* dalam bentuk korupsi, kronisme, dan nepotisme yang sangat mempengaruhi alokasi sumber daya yang tidak efisien serta timbulnya ekonomi biaya tinggi. Dalam upaya melindungi perbankan pemerintah seringkali membiarkan para bankir lolos dari resiko kredit macet. Sebaliknya, kasus penyuaipan pejabat negara, proses rekrutmen eselon perusahaan yang diskriminatif dan tidak transparan, penggelapan uang untuk keperluan politik uang, juga kerap dilakukan oleh perusahaan dengan motif mempertahankan hubungan dekat dengan pemerintah atau birokrat yang berwenang.
3. Kecenderungan lain adalah kemungkinan gagalnya liberalisasi dan terjadinya mismanajemen antara hutang jangka pendek dengan hutang jangka panjang. Kebanyakan negara-negara Asia tahun 1990-an mulai meliberalisasi sektor perbankan sehingga terjadi aliran modal yang deras masuk kedalam negeri. Aliran ini tidak disertai dengan sektor

¹⁴ *Ibid*, Jim Rohwer, hal. 49.

perbankan yang cukup baik sehingga penyelewengan kredit kerap terjadi. Adanya proses rekrutmen yang tidak transparan sering menghasilkan kalangan profesional bisnis yang tidak profesional. Akibatnya kelemahan sector finansial menjadi agenda yang tersembunyi di banyak negara Asia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas kondisi krisis di Korea Selatan disebabkan oleh berbagai rangkaian faktor yang terbagi menjadi faktor pemicu, faktor *intermediate*, dan faktor yang lebih dalam (*deep causes*). Ketiganya merupakan faktor penting yang diuraikan pula oleh berbagai kalangan pengamat ekonomi yang menitik beratkan fokus kajian dalam sector ekonomi dalam negeri.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa krisis di Korea Selatan ditandai oleh 3 penyebab faktor utama, yaitu faktor utama, faktor antara, dan faktor mendalam. Ketiga faktor tersebut yang menjadi perhatian para analis ekonomi untuk memberi masukan kepada pemerintah Korea Selatan dalam mencari penyelesaian krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 1997-1998.

Kinerja perekonomian Korea Selatan pada masa penerapan kebijakan stabilisasi di pertengahan tahun 1998 mengalami penurunan kinerja yang lebih parah dengan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kebangkrutan, dan tingkat pengangguran yang makin memburuk. Dengan demikian dapat menimbulkan *social cost* yang tinggi pada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Far Eastern Economic Review*, Asia Year Book, 1997.
Kim In Jun, *One Year Under IMF*, Korea Focus, Vol.6/6, Nov-Des, 1998.
Taufiq Tanahsaldy, *Kebijakan Pembaharuan Ekonomi Korea Selatan Dalam Mengatasi Krisis: Restrukturisasi Bidang Finansial dan Korporasi*, Global, 7/2001.
Ross Garnaut, *Exchange Rate In The East Asia Crisis*, ASEAN Economic Bulletin, Vol. 15, No.3, Desember 1998.
Hal Hill, *An OverView Of he Issues*, ASEAN Economic Bulletin, Vol.15 No.3, Desember 1998.
Ross Garnaut, *exchange Rate In The East Asia Crisis*, Asean Economic Bulletin, Vol. 15 no. 3 tahun 1998.
Jim Rohwer, *Remade In America: How Will Change Because America Boomed*, New York, Crown Business, 2001.
Doo-Yong Yang mengutip Bank Sentral Korea Selatan, 2002.

KAJIAN NEGARA GAGAL

R.M Aria Ranggakusumah, SH, M.Si¹
Aria4rangga@yahoo.com

Abstract

The phenomena of new born states to failed states take its part in International relations. What is failed states? Which indicator that gives the authority to labeling that a country is failed? In this journal, the writer tries to explore and understand the concept of definition and indicators of failed states, by giving the concept by Rotberg, Martin Khor, dan Schnechener. Indicator from some NGO's such International Crisis Group or Fund for peace Organization also will be elaborated with the failed states concept from the scholar. Almost all believe that a weak states have the ability to become failing or collapse, but a weak states is not a failed states. There is a common variable in every definition and indicators of failed states, politics/sovereignty, economy and social/security. The writer hope this journal could give some explanation and understanding about failed states.

Keywords : Failed States, Nation Building

Pendahuluan

Perkembangan sistem internasional sejak perang dunia I dan II sampai pada pasca perang dingin beserta dinamika-dinamika internasional yang mulai muncul seperti globalisasi dan lain-lain didalamnya telah menciptakan dan memunculkan negara-negara baru khususnya di wilayah Afrika, Amerika selatan dan Asia yang mulai tumbuh dan berkembang, baik secara ekonomi maupun politik, yang dikenal dengan sebutan negara dunia ketiga. Namun problematika-problematika yang dihadapi negara-negara di dunia ketiga ini membuat negara-negara ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempatnya dan statusnya di dalam sistem internasional, bahkan mulai tumbuh pertanyaan apakah negara itu dapat bertahan atau tidak, dan yang kemudian mengarah pada negara yang gagal (*failed states*). Menurut Martin Khor :

"Many developing countries, can be categorized as having failed to generate growth or development of the type or rate to satisfy the basic food,

¹ Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Budi Luhur

employment, housing and education needs of the majority of people"²

(Banyak negara berkembang yang dapat dikategorikan gagal karena tidak dapat menumbuhkan atau memberikan kecukupan terhadap tingkat pembangunannya seperti penyediaan bahan dasar pokok, lapangan pekerjaan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat)

Banyak dari negara-negara baru maupun yang sudah ada di negara dunia ketiga berakhir dengan tragedi atau keadaan gagal, sehingga muncul sebuah *stereotype* bahwa negara kecil dan baru di dunia ketiga merupakan negara yang cenderung gagal atau *failed*. Kegagalan negara dunia ketiga pada dasarnya bukan disebabkan dari ketidakmampuan negara itu untuk bertahan. Kecendrungan akan pengelompokan atau pemberian status gagal terhadap negara-negara dunia ketiga, menurut Mohammed Ayooob dalam bukunya "*Third World Security Predicaments*", merupakan produk standarisasi atau akibat adanya hubungan "persaingan" atau perbedaan kekuatan (ekonomi dan militer) antara negara berkembang dengan negara-negara tidak berkembang atau negara dunia ketiga (yang dikenal dengan istilah *north and south*³) serta adanya perbedaan pemahaman konsep keamanan (*security*). Jadi negara-negara dunia ketiga akan selalu terikat oleh aturan-aturan yang dibentuk oleh negara-negara berkembang yang jauh lebih besar dan kuat sehingga menciptakan kelas-kelas negara dunia ketiga yang dipaksa untuk mengikuti aturan atau standarisasi dari negara-negara kuat yang pada akhirnya justru mengarahkan negara-negara dunia ketiga pada keadaan gagal.

Namun apa yang dimaksudkan dengan negara gagal atau *failed state*? Tidak ada definisi yang konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan dengan negara gagal, namun ada beberapa pendapat mengenai definisi negara gagal, antara lain pendapat dari Ulrich Schneckener yang menyebutkan negara gagal adalah Negara yang tidak mampu dalam menjalankan atau memberikan tiga fungsi dasar negara, yaitu: keamanan, kesejahteraan, dan legitimasi atau penegakan hukum⁴. Pendapat lain mengenai definisi negara gagal yang mirip atau hampir sama dengan pendapat Ulrich Schneckener adalah definisi dari Robert I. Rotberg. Ia mengatakan bahwa negara gagal adalah negara yang tidak dapat lagi menjalankan fungsi-fungsi dasarnya (pendidikan, keamanan dan pemerintahan) yang biasanya dikarenakan kekerasan, kemiskinan yang

² Martin Khor, "*Failed States' Theory Can Cause Global Anarchy*", 2002

³ Mohammed Ayooob, "*Third World Security Predicaments*", (Colorado, Lynne Rienner Publisher Inc, 1995), hal 1

⁴ Ulrich Schneckener, "*Fragile Statehood, Armed Non-State actors and Security Governance*", editorial Alan Bryden and Marina Caparini, *Private Actors and Security Governance* (Jenewa, LIT & DCAF, 2006), hal 31

ekstrim, dan vakumnya kekuasaan⁵. Namun ada juga pendapat bahwa negara gagal merupakan negara yang tidak memiliki pemerintahan (kekosongan kekuasaan) dan sudah tidak dapat lagi mempertahankan kedaulatannya, baik legitimasi wilayahnya maupun pemerintahannya terhadap rakyatnya. Dari beberapa definisi ini dapat dilihat bahwa kegagalan sebuah negara dapat dilihat atau dinilai berdasarkan tiga variabel, yaitu kedaulatannya (*sovereignty*) dimana negara tersebut kehilangan atau tidak lagi memiliki kedaulatan atas negaranya, berdasarkan tingkat kemakmurannya atau pembangunan ekonominya (*development*) dimana negara tersebut memiliki tingkat pembangunan atau pertumbuhan yang relatif sangat rendah atau bahkan tidak berkembang atau tumbuh sama sekali, dan juga berdasarkan keamanannya (*security*) dimana negara tersebut sudah tidak mampu lagi memberikan keamanan kepada warga negaranya.

Jadi dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa negara gagal yang ideal berdasarkan teori *failed states* bahwa negara yang tidak memiliki kedaulatan atau secara politik sangat lemah (*weak states*), tingkat pertumbuhannya sangat rendah atau tidak memiliki pertumbuhan ekonomi, dan keadaan dalam negara tersebut tidak aman atau negara tersebut tidak dapat memberikan keamanan kepada warga negaranya, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara yang gagal

(not-sovereign state/weak states + under-development + unsecure) = failed states

Hal tersebut di atas pada dasarnya juga merupakan karakteristik dari sebuah negara di dunia ketiga. Namun apakah negara yang memenuhi unsur-unsur tersebut (*not-sovereign state/weak state + under-development + unsecure*) merupakan negara yang gagal, karena pada realitanya sebuah negara yang memiliki kedaulatan atau dapat dikatakan sebagai negara yang lemah, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah (*miskin*), dan tidak aman (*unsecure*) bukanlah negara yang gagal atau tidak dapat dikatakan sebagai negara yang gagal.

Dibawah ini merupakan daftar negara gagal berdasarkan *failed states index* tahun 2010. Warna merah merupakan negara yang dianggap gagal (*alert status*), warna coklat merupakan negara yang dapat mengarah pada kegagalan (*warning status*), warna kuning merupakan negara yang dalam kondisi aman (*moderate status*) dan warna hijau merupakan negara yang stabil (*sustainable status*).

⁵ Robert I. Rotberg, "Failed States, Collapses States, Weak States: Causes And Indicators", (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2004) hal 4

1	Somalia	38	Tajikistan	130	Panama	165	Iceland
2	Chad	39	Mauritania	131	Croatia	166	Canada
3	Sudan	40	Laos	132	Bahamas	167	Netherlands
4	Zimbabwe	126	Bulgaria	133	Bahrain	168	Luxembourg
16	Burma	128	Romania	163	Belgium	176	Finland
37	Georgia	129	Mongolia	164	Japan	177	Norway

Gambar 1. Failed States Index Rating Myanmar tahun 2010⁶

Pembahasan

a. Konsep Kenegaraan

Untuk melihat sebuah fenomena negara gagal, ada baiknya jika kita melihat terlebih dahulu mengenai konsep negara sehingga kenapa sebuah negara bisa dikatakan gagal. Tinjauan pustaka yang pertama merupakan tulisan oleh Takeshi Negishiki dalam tulisannya "*The Concept of the State and Weber's Erroneous Reasoning*", tahun 1997, mengenai konsep kenegaraan Max Weber, salah satu ahli kenegaraan, yang menerangkan mengenai konsep negara itu sendiri. Di sini Weber menjelaskan mengenai definisi sebuah negara adalah suatu kesatuan organisasi kekuasaan terhadap masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik (*use of force*) secara sah dalam suatu wilayah. Agar negara dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kekuasaan (*authority*) yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Sarana serta alat yang dapat digunakan oleh negara untuk memaksakan peraturan antara lain adalah polisi, tentara dan alat penjamin hukum lainnya. Hal ini ditujukan agar negara dapat menjalankan tujuan serta fungsinya. Fungsi dan tujuan dari negara tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama⁷. C. Pierson, dalam tulisannya "*Modern State, A Commentary On Weber*", juga sependapat dengan definisi negara Weber dan selanjutnya berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa harus menjalankan fungsinya. Fungsi sebuah negara modern antara lain fungsi legislatif untuk membuat kebijakan (hukum dan peraturan lainnya), fungsi eksekutif untuk mengimplementasikan kebijakan, peraturan dan hukum untuk kepentingan negara, serta fungsi yudikatif sebagai penyelesaian masalah

⁶ Fund For Peace Organization index 2008

⁷ Takeshi Negishiki "*The Concept of...Op.Cit.*"

(*resolving disputes and interpreting laws*)⁸. Menurut pandangan Barry Buzan dalam " *The Idea of State and National Security*, dalam *Perspectives on World Politics*" tahun 1991 mengenai negara terdapat dua pemahaman mendasar yang harus diperhatikan, yaitu pemahaman fisik dan pemahaman konsep institusi dari negara serta perbedaan diantara keduanya. Konteks fisik yaitu keberadaan fisik atau geografis dari suatu negara, sedangkan konteks institusi memiliki pemahaman bahwa hal tersebut diciptakan untuk mengatur hal-hal mengenai jalannya suatu negara atau pemerintahan. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemahaman mengenai *sense of purpose* dari sebuah masyarakat. Menurut Buzan masyarakat dalam suatu negara harus memiliki konsensus mengenai tujuan-tujuan bersama mereka⁹.

b. Negara Gagal (*Failed States*)

Negara-negara gagal (*failed states*) merupakan istilah yang saat ini makin populer, terutama setelah Uni Soviet tumbang dan Yugoslavia runtuh. Wilayah suatu negara berubah, generasi berganti dan negara bukanlah sebuah bangunan yang konstan. Loyalitas warga kepada negara pada dasarnya merupakan sesuatu yang nisbi. Menurut Gunner Nielsen Bangsa dan negara bukanlah suatu entitas yang *conterminous*. Pertanyaan yang cukup mendasar mengenai negara gagal adalah kenapa harus ada pemberian status negara gagal? Apa tujuannya? Siapa yang berhak memberikan status tersebut? Pemberian status negara gagal pada dasarnya merupakan suatu hal yang bagus atau positif bagi sistim internasional. Seperti contohnya adalah Somalia dimana negara tersebut tidak memiliki pemerintahan yang efektif dengan tingkat kemakmuran yang sangat rendah serta banyaknya konflik bersenjata yang terjadi setiap harinya, termasuk masalah keamanan lain seperti pembajakan dan lain-lain, sehingga menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakatnya atau warganya karena negara (melalui pemerintahnya) yang seharusnya melakukan kewajiban untuk melindungi serta menciptakan keteraturan tidak ada. Oleh karena itu Somalia dianggap sebagai negara gagal sehingga negara lain bisa dan berkewajiban untuk membantu. Disatu sisi pemberian status negara gagal memiliki nilai yang positif, akan tetapi disisi lain muncul permasalahan-permasalahan baru mengenai standar apa yang digunakan dalam pemberian status negara gagal. Pemberian status negara gagal inipun ditakutkan menjadi sebuah cara atau alat bagi negara-negara maju dan berkembang untuk menekan negara-negara kecil di dunia ketiga demi

⁸ C. Pierson, "*Modern State...Op.Cit.*

⁹ Barry Buzan, *The Idea of State and National Security*, dalam *Perspectives on World Politics*. (London: Harvester Wheatsheaf) 1991

kebutuhannya. Memang belum ada satu teori khusus yang menjelaskan mengenai negara gagal. Terdapat beberapa pendapat mengenai apa itu negara gagal, Ulrich Schneckener yang menyebutkan negara gagal adalah negara yang tidak mampu dalam menjalankan atau memberikan tiga fungsi dasar negara, yaitu: keamanan, kesejahteraan, dan legitimasi atau penegakan hukum¹⁰. Pendapat lain mengenai definisi negara gagal yang mirip atau hampir sama dengan pendapat Ulrich Schneckener adalah definisi dari Robert I. Rotberg. Ia mengatakan bahwa negara gagal adalah negara yang tidak dapat lagi menjalankan fungsi-fungsi dasarnya (pendidikan, keamanan dan pemerintahan) yang biasanya dikarenakan kekerasan, kemiskinan yang ekstrim, dan vakumnya kekuasaan¹¹. Menurutnya negara gagal memiliki ciri seperti, adanya ketegangan etnik dan komunal lainnya yang mengarah menjadi tindakan kekerasan Peningkatan tingkat kejahatan di kota, kemampuan untuk menyediakan barang-barang publik dalam ukuran atau porsi yang memadai menurun atau menghilang, jaringan infrastruktur fisik memburuk, sekolah dan rumah sakit menunjukkan tanda-tanda penolakan atau penurunan, GDP perkapita dan indikator ekonomi lainnya menurun atau jatuh, tingkat korupsi tinggi, dan terjadi pelanggaran terhadap penegakan hukum.

Namun ada juga pendapat bahwa negara gagal merupakan negara yang tidak memiliki pemerintahan (kekosongan kekuasaan) dan sudah tidak dapat lagi mempertahankan kedaulatannya, baik legitimasi wilayahnya maupun pemerintahannya terhadap rakyatnya. Menurut Fund For Peace Organization:

*"...loss of physical control of its territory, or of the monopoly on the legitimate use of physical force therein, erosion of legitimate authority to make collective decisions, an inability to provide reasonable public services, an inability to interact with other states as a full member of the international community, Often a failed nation is characterized by social, political, and economic failure"*¹²

Fund For Peace Organization melihat negara gagal berdasarkan, hilangnya kontrol secara fisik terhadap wilayah teritorinya serta legitimasi terhadap penggunaan paksaan secara fisik (tentara atau polisi), terkikisnya atau berkurangnya kewenangan legitimasi pemerintah dalam membuat keputusan, ketidakmampuan untuk menyediakan jasa publik yang baik dan sesuai, hilangnya kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain sebagai bagian dari komunitas internasional¹³.

¹⁰ Ulrich Schneckener, *"Fragile Statehood...Loc.Cit*

¹¹ Robert I. Rotberg, *"Failed States, Collapses...Op.Cit*, hal 3

¹² Fund For Peace Organization...*Loc.Cit*

¹³ *Ibid*

Pada intinya karakter negara gagal dapat dilihat berdasarkan kegagalan sosial, politik dan ekonominya. International Crisis Group melihat negara gagal berdasarkan beberapa hal, yaitu:

*"...Mounting Demographic Pressures, Massive Movement of Refugees or Internally Displaced Persons creating Complex Humanitarian Emergencies, Legacy of Vengeance-Seeking Group Grievance or Group Paranoia, Chronic and Sustained Human Flight, Uneven Economic Development along Group Lines, Sharp and/or Severe Economic Decline, Criminalization and/or Delegitimization of the State, Progressive Deterioration of Public Services, Suspension or Arbitrary Application of the Rule of Law and Widespread Violation of Human Rights, Security Apparatus Operates as a "State Within a State", Rise of Factionalized Elites, Intervention of Other States or External Political Actors"*¹⁴

International Crisis Group melihat negara gagal berdasarkan indikator-indikator seperti peningkatan tekanan demografis, gerakan Pengungsi atau "*internally displaced persons*" yang menciptakan masalah kemanusiaan darurat yang sangat kompleks, budaya atau peninggalan balas dendam yang menimbulkan paranoia bagi beberapa kelompok masyarakat, pembatasan jumlah penerimaan manusia Penerbangan, tingkat pembangunan ekonomi yang tidak merata, penurunan secara tajam dalam perekonomian, kriminalisasi atau delegitimasi pemerintahan, kemerosotan dalam penyediaan jasa pelayanan publik, adanya ketidaksewenangan dalam penerapan hukum yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, penciptaan "negara dalam negara" oleh aparat keamanan, perpecahan atau konflik elit-elit politik, serta adanya intervensi dari pihak asing atau luar¹⁵.

Fund For Peace Organization maupun *International Crisis Group* melihat negara gagal berdasarkan indikator negara gagal (*failed states index*) yang membagi indikator tersebut ke dalam tiga kategori indikator, yaitu sosial indikator indeks, ekonomi indikator indeks dan politik indikator indeks¹⁶. Dari beberapa definisi ini dapat dilihat bahwa kegagalan sebuah negara dapat dilihat atau dinilai dengan tolok ukur berdasarkan tiga hal, yaitu kedaulatannya (*sovereignty / politics*) dimana negara tersebut kehilangan atau tidak lagi memiliki kedaulatan atas negaranya, berdasarkan tingkat kemakmurannya atau ekonominya (*development*) dimana negara tersebut memiliki tingkat perkembangan atau pertumbuhan yang sangat rendah atau bahkan tidak berkembang atau tumbuh sama sekali, dan juga berdasarkan keamanannya (*security*) dimana negara tersebut sudah tidak mampu lagi memberikan perlindungan dan

¹⁴ International Crisis Group index 2008

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Anonim, "Country Alert...Loc.Cit

rasa keamanan kepada warga negaranya. Namun perlu diingatkan kembali bahwa negara lemah bukanlah atau belum tentu sebuah negara gagal¹⁷.

Tulisan kedua adalah berasal dari Mohammad Ayoob dalam bukunya *Third World Security Predicaments*, 1995. Dalam tulisannya Mohammad Ayoob melihat fenomena *failed states* atau negara gagal merupakan sebuah diskriminasi bagi negara-negara di dunia ketiga karena standarisasi kegagalan yang digunakan tidak mencerminkan keadaan di negara dunia ketiga. Menurutnya ini merupakan bagian dari sebuah persaingan dalam sistem internasional antara negara besar dan maju dengan negara berkembang atau kecil. Persaingan ini lebih dikenal dengan istilah *north vs south*. Ayoob mengatakan bahwa karakteristik negara dunia ketiga tidak bisa disamakan dengan keadaan negara maju dan besar, belum lagi karena masih banyak negara-negara di dunia ketiga yang merupakan negara yang baru dan masih dalam proses pembentukan sebuah negara (*state making process*) sehingga pemberian status gagal tidaklah tepat. Sependapat dengan Ayoob, juga diakui oleh Robert I. Rotberg yang juga merupakan pemikir di aliran strukturalis dalam bukunya "*Failed States, Collapses States, Weak States: Causes and Indicators*", 2004, ia juga mengatakan bahwa negara lemah bukanlah negara yang gagal. Begitupun dengan tulisan Martin Khor dalam bukunya "*Failed States' Theory Can Cause Global Anarchy*" di tahun 2002 yang mengatakan banyak negara berkembang yang dapat dikategorikan gagal karena tidak dapat menumbuhkan atau memberikan kecukupan terhadap tingkat pembangunannya seperti penyediaan bahan dasar pokok, lapangan pekerjaan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat. Tulisan dari Ulrich Schneckener "*Fragile Statehood, Armed Non-State actors and Security Governance*" juga menguatkan pandangan Rotberg terhadap negara gagal atau *failed states*. Hampir semua tulisan mengenai *failed states* berhubungan dengan negara dunia ketiga atau negara yang mengalami konflik. Hal itu juga yang menjadi dasar atau alasan sebuah negara menjadi gagal. Menurut Francis Fukuyama dalam "*State Building: Governance and World Order in the 21st Century*", 2004 bahwa kurangnya kemampuan negara khususnya di negara-negara miskin untuk menanggulangi dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dunia, seperti AIDS, terorisme, sampai masalah keamanan lainnya mulai dikhawatirkan oleh negara-negara maju lainnya. Pasca Perang Dingin telah melahirkan dan menimbulkan banyak negara-negara lemah dan gagal yang tersebar mulai dari daerah Balkan hingga Kaukasus, Timur Tengah, Asia bagian Tengah, Selatan dan Tenggara. Keruntuhan serta kelemahan negara-negara gagal telah menimbulkan berbagai masalah kemanusiaan yang ada seperti migrasi

¹⁷ Robert I. Rotberg, "*The New Nature of Nation-State Failure*", *The Washington Quarterly* vol.25 no.3 summer 2002, hal 86

sampai kriminalitas serta masalah hak azasi manusia¹⁸. Masalah persoalan negara gagal yang tadinya hanya dilihat sebagai masalah kemanusiaan dan hak-hak azasi manusia, sekarang menjadi atau memiliki suatu dimensi keamanan yang lebih besar yang menurut Michael Ignatieff dalam tulisannya "*The Burden*", 2003, merupakan kegagalan atau ketidakmampuan barat pasca Perang Dingin pada tahun 1990an, yang pada akhirnya menjadi suatu ancaman keamanan dalam negeri¹⁹.

Pandangan lain mengenai *failed states* juga diambil antara lain dari International Community of Red Cross Review oleh Daniel Thürer yang berjudul "*Der Wegfall effektiver Staatsgewalt: der 'Failed State'*", atau "*The Failed State and International Law*" yang diterbitkan pada tahun 1999 serta tulisan dari Noam Chomsky dalam bukunya "*Failed States: The Abuse of power and The Assault On democracy*", yang secara tidak terlalu jauh sama dengan konsep *failed states* yang ditawarkan oleh Rotberg, Khor maupun Schnechener bahwa negara gagal adalah negara yang tidak mampu melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan, tidak terjaminnya hak warga negara, lemahnya institusi demokrasi dan lembaga penegak hukum serta maraknya penyalahgunaan kekerasan.

c. How To Fix a Failed States?

Berbicara mengenai *failed states* tidak akan terlepas dari usaha negara-negara baik langsung maupun melalui komunitas internasional untuk membantu dan mencegah terjadinya sebuah negara gagal. Oleh karena itu *failed states* tidak akan pernah lepas dari sebuah *nation* atau *state building*. *Nation building* adalah salah satu cara untuk meningkatkan pemerintahan negara-negara lemah serta untuk mengukuhkan legitimasi demokrasi dan memperkuat lembaga-lembaga swadaya di negara tersebut. Menurut Chester Crocker dalam tulisannya, "*Engaging Failing States*", 2003, mengenai perlunya *nation building* bagi negara gagal karena sejak berakhirnya Perang Dingin, negara-negara lemah atau gagal dapat dikatakan menjadi satu-satunya persoalan paling penting bagi tatanan internasional²⁰. Berbagai bentuk dan program seperti *nation building* dan *peacekeeping*, masuk kedalam konflik tersebut dan berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun usaha tersebut tidak jarang berakhir dengan kegagalan karena dianggap sebagai sebuah usaha yang terlambat dan kadangkala dengan sumber daya yang terlalu sedikit. *Nation building* atau *state building* di definisikan oleh Mark T. Berger dalam tulisannya "*From Nation-Building to State-Building: The Geopolitics of*

¹⁸ Francis Fukuyama, "*State Building: Governance and World Order in the 21st Century*", (New York: Cornell University Press, 2004)

¹⁹ Michael Ignatieff, "*The Burden*", new York Times magazine 5 Januari 2003, hal 162

²⁰ Chester Crocker, "*Engaging Failing States*", Foreign Affairs 82, 2003 hal. 32-45

Development, the Nation-State System and the Changing Global Order" 2006, sebagai pendorong, penggerak atau fasilitas yang diberikan dari luar (bersifat eksternal) yang merupakan sebuah bentuk usaha untuk membentuk atau mengkonsolidasikan sebuah keadaan serta pemerintahan yang lebih stabil atau pemerintahan yang bersistem "demokrasi" terhadap negara-negara yang dianggap oleh dunia internasional, melalui PBB, sedang dalam keadaan krisis atau bermasalah. *Nation building* atau *state building* eksternal dapat meliputi okupasi militer secara resmi dan legal, *peacekeeping*, pembangunan atau rekonstruksi nasional, bantuan asing serta penggunaan atau bahkan pemaksaan stabilitasi dibawah pengawasan negara besar serta organisasi internasional dan regional²¹ seperti PBB, NATO, ASEAN dan lain-lain²². Berger menambahkan bahwa tujuan atau isu yang dari *nation building* saat ini lebih tertuju pada negara-negara yang menyanggah predikat seperti "*collapsed*", "*collapsing*", "*failed*" atau "*failing*" states. Meskipun tidak dapat dipungkiri usaha *nation building*, baik yang dilakukan oleh PBB maupun negara perseorangan seperti Amerika Serikat, di Vietnam tahun 1950an, Timor Timur tahun 1960an, serta Afghanistan dan Irak tidak lama ini, tidak selamanya berjalan baik, dengan kata lain *nation building* ada yang dapat dikatakan sukses namun tidak jarang juga sebuah usaha untuk *nation building* berakhir dengan kegagalan²³.

Menurut Ashraf Ghani dan Clare Lockhart dalam "*Fixing Failed States: a Framework for Rebuilding a Fracture World*", 2008 usaha *nation building* yang ada selama ini tidak pernah terlepas dari peran militer dan kadang kala pun pelaksanaan atau penerapan sebuah *nation building* sering kali dapat dipaksakan dengan kekerasan atau koersif, seperti yang terjadi di Rwanda, Bosnia dan Kosovo²⁴. Ashraf Ghani dan Clare Lockhart dalam bukunya juga menambahkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan dalam *nation building* untuk membantu sebuah negara keluar dari kegagalannya adalah dengan menguatkan fungsi utama negaranya²⁵.

²¹ K von Hippel, "*Democracy By Force: US Military Intervention in the Post-Cold War World*", (Cambridge: Cambridge University Press), 2000.

²² Mark T. Berger "*From Nation-Building to State-Building: The Geopolitics of Development, the Nation-State System and the Changing Global Order*" (Taylor and Francis Ltd) 2006,

²³ *Ibid.*

²⁴ Ashraf Ghani, Clare Lockhart, "*Fixing Failed States: a Framework for Rebuilding a Fracture World*", (New York, Oxford University Press) 2008

²⁵ *Ibid.*

Penutup

Perbedaan pemikiran dalam konsep *failed states* serta belum adanya kesamaan dalam pemberian definisi *failed states* menimbulkan sebuah dilema tersendiri. Yang dicoba dijelaskan dalam tulisan ini adalah agar pembaca melihat perbenturan kedua konsep ini, yaitu konsep *failed states* dan *functioning states* secara bersamaan dalam sebuah atau satu negara, di mana terdapat dua keadaan yang saling bertolak belakang antara status negara tersebut yang *failed states* dan juga sekaligus sebagai sebuah *functioning states*.

Dari sini dapat kita renungkan bahwa tidak semua negara kecil dan lemah merupakan negara gagal, namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa berdasarkan kenyataan sejarah negara kecil dan lemah cenderung untuk bergerak mengarah kepada kegagalan.

Namun perlu ada kajian lebih lanjut mengenai negara gagal sehingga dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh serta kesamaan konsep dalam sistem Internasional sehingga kedepannya dapat disesuaikan mengenai penanganan sebuah negara gagal yang tidak bertentangan dengan norma atau etika hukum internasional.

Daftar Pustaka

- Ashraf Ghani, Clare Lockhart, *“Fixing Failed States: a Framework for Rebuilding a Fracture World”*, (New York, Oxford University Press 2008)
- Barry Buzan, *The Idea of State and National Security*, dalam *Perspectives on World Politics*. (London: Harvester Wheatsheaf 1991)
- Chester Crocker, *“Engaging Failing States”*, *Foreign Affairs* 82, 2003
- Francis Fukuyama, *“State Building: Governance and World Order in the 21st Century”*, (New York: Cornell University Press, 2004)
- Fund For Peace Organization index 2008
- International Crisis Group index 2008
- K von Hippel, *“Democracy By Force: US Military Intervention in the Post-Cold War World”*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
- Mark T. Berger *“From Nation-Building to State-Building: The Geopolitics of Development, the Nation-State System and the Changing Global Order”* (Taylor and Francis Ltd 2006)
- Martin Khor, *“Failed States’ Theory Can Cause Global Anarchy”*, (2002)
- Michael Ignatieff, *“The Burden”*, *New York Times magazine* 5 Januari 2003

Mohammed Ayoob, *"Third World Security Predicaments"*, (Colorado, Lynne Rienner Publisher Inc, 1995)

Robert I. Rotberg, *"Failed States, Collapses States, Weak States: Causes And Indicators"*, (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2004)

-----, *"The New Nature of Nation-State Failure"*, The Washington Quarterly vol.25 no.3 summer 2002

Ulrich Schuechener, *"Fragile Statehood, Armed Non-State actors and Security Governance"*, editorial Alan Bryden and Marina Caparini, Private Actors and Security Governance (Jenewa, LIT & DCAF, 2006)

REPUBLIKANISME, HANTU KEDAULATAN, DAN PRIMASI PERLAWANAN DEMOKRATIS

Hizkia Yosias S. Polimpung¹
yosieprodigy@live.com

Abstract

Robertus Robet's Republicanisme dan Keindonesiaan book has a significant importance, as this article will make clear, that exceeds the initial aim of the author when he begins to write it – that is to clarifying the concept of republicanism, particularly in its relations to democracy and Indonesianess (Keindonesiaan). The importance concerned is that it, wittingly or unwittingly, urges its reader to also rethink the conception of the state, a political entity toward which republicanism is directed. In discussing this, the article begins with a short detour to explicate the emergence of the state until the time when the notion of republicanism gives rise and merges with democracy. It is after this section that Robet's book be reviewed within this context. The argument being put forward is that we have to take seriously Robet's challenge to rethink the notion of republicanism, even beyond what has been done by Robet. This is so since Robet himself got entrapped in a dilemma: namely the incompatibility of the sovereignty of the republican state with the plural aspiration in democracy. This article concludes, by taking a slightly different trajectory than that of Robet, that republicanism could only be relevant in the sphere of democracy insofar it gives space for the primacy of democratic resistance against its own self, despite the republic's democratic constitution. With the absence of resistance, republicanism will be nothing but "totalitarianism with human face."

Keywords : *Republicanism, State, Sovereignty, Democracy, Resistance*

Artikel ini mengemban setidaknya dua tugas. Pertama memberi uraian reflektif terhadap buku *Republicanisme dan Keindonesiaan* (RK) karya Robertus Robet, dan kedua, memberikan pandangan tentang gagasan republikanisme itu sendiri sekaligus desain kewargaan yang mengikutinya. Terkait tugas pertama, saya menyambut buku RK ini dalam salutasi. Hal ini demikian karena melalui buku RK yang relatif tipis ini, Bung Robet mampu melakukan tiga tugas sekaligus yang sekiranya penting dalam konteks ke-Indonesia-an hari-hari ini: mengklarifikasi gagasan kenegaraan di tengah "penyelewengan-penyelewengan kenegaraan" yang kerap terjadi

¹ Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur

hari ini; mengekstrak dan menekankan primasi beberapa tema-tema seputar republikanisme – politik, kebebasan, distingsi publik/privat – yang sebenarnya memang sedang diperlukan Indonesia saat-saat ini; dan terakhir, memformulasikan gagasan republikanisme yang khas Indonesia, dalam hal ini melalui pijar pemikiran Mohammad Hatta.

Namun demikian salutasi ini tidak mencegah saya untuk tidak memberi beberapa catatan bagi RK. Bagi saya, RK seharusnya menjadi bacaan *wajib* bagi siapapun yang terlibat dalam pemerintahan – eksekutif, legislatif dan yudikatif. Buku RK ini cocok untuk menjadi juklak (petunjuk pelaksanaan) bagi mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka dalam mengurus negara, yang notabene dibayar dengan sangat sangat mahal. Bahkan, jika memungkinkan, saya menyarankan Bung Robet untuk memberi semacam “P4” bagi setiap pejabat pemerintahan di hari ia dilantik. Namun demikian, menjadi problem saat buku RK ini dibaca oleh orang-orang non-elit. Sesaat setelah menghabiskan RK, mereka akan tercerahkan dengan pemahaman-pemahaman kenegaraan yang selama ini diterimanya secara “*taken for granted*” seolah-olah ia ada seketika dan begitu saja” (xi).² Sayangnya pencerahan ini akan disusul dengan ensembel kejengkelan, kekesalan, kemarahan dan kegeraman karena pada saat ia mengingat berita-berita yang didengarnya selama ini tentang pemerintah Indonesia, gambaran yang didapatnya adalah jungkir balik dari yang disketsakan di RK. Lalu proposal Bung Robet mengenai “politik kebudayaan” (140) pun masih saya anggap sebagai hutang semenjak uraian praksis – baik strategis maupun taktis – tidak saya temukan di RK.

Catatan kedua, sekaligus inti dari tulisan kali ini, adalah bahwa terdapat hal penting dan krusial yang kurang, jika bukan luput, mendapat sorotan dari pembahasan RK, yaitu asal-usul negara dan kapitalisme global. Hal ini amat disayangkan karena pengabaian dua hal ini akan membawa pada pemahaman fetistik mengenai negara – yaitu bahwa negara adalah tidak terelakkan, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa negara, bahwa kita harus membela negara tanpa *tedeng aling*, dan seterusnya; dan mengabaikan apa yang beberapa tahun silam Romo B. Herry Priyono, yang juga ikut memberi apresiasi di sampul belakang RK, sebut sebagai Leviathan baru, yaitu korporasi.³ Tepat pada dua titik inilah saya mencoba menyelipkan kontribusi.

Untuk kepentingan sistematisasi penulisan, artikel ini akan terbagi kedalam tiga bagian besar. Bagian pertama mencoba melakukan pelacakan singkat bagi asal-usul terbentuknya negara sedari Abad Pertengahan. Pelacakan ini mencoba menunjukkan satu hal yang konstan dikandung

² Untuk seterusnya, kutipan dari buku *Republikanisme dan Keindonesiaan* ditulis langsung halamannya dalam tanda kurung.

³ B. Herry Priyono, “Memahami Leviathan Baru,” *Kompas* (5/5/2002).

oleh bentuk-bentuk institusi dan pengorganisasian kekuasaan sedari Abad Pertengahan sampai masa terbentuknya negara modern, bahkan negara (neo)liberal demokratis. Upaya ini penting untuk menyediakan kontekstualisasi sebelum pada bagian berikutnya masuk pada gagasan republikanisme, terutama yang menjadi inti pembahasan Robet di RK. Bagian terakhir mencoba memberikan evaluasi bagi konsep republikanisme ala Robet, sembari menarik implikasinya pada praktik kenegaraan Republik Indonesia yang, sekalipun bisa diperdebatkan, demokratis.

Argumentasi yang memandu pembahasan pada artikel ini adalah bahwa negara adalah suatu produk historis-politis yang akan selalu membawa aspirasi purbanya, yaitu kekekalan kedaulatan bagi pemimpinnya (raja/presiden). Aspirasi ini penting untuk disadari, dan senantiasa disadari, bahwa ia tidak akan pernah kompatibel dengan gagasan demokrasi yang mencoba mentransfer kedaulatan tersebut ke rakyat. Republikanisme modern berdiri tepat di ambang kontradiksi antagonistik antara kedaulatan dan demokrasi. Artinya, ia harus mampu untuk menjadi “penengah” bagi aspirasi berdaulat pemimpin (dan mereka-mereka yang berebut menjadi pemimpin) dan perlawanan dari rakyat dalam merebut kedaulatan mereka. Sayangnya, pemahaman demokrasi di Indonesia dewasa ini telah melupakan aspek perlawanan demokratis ini, yang akhirnya beresiko, dan bahkan telah, mereduksi demokrasi menjadi tidak lebih dari sekedar label bagi pemerintah untuk berkuasa dan melanggengkan kedaulatannya.

Menolak lupa asal-usul negara

Terkait negara. Apakah negara? Menurut hafalan yang umumnya diberikan saat SMA, negara adalah kesatuan wilayah yang memiliki rakyat, teritori terbatas, pemerintahan berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.⁴ Hanya saja, sejak kapan negara didefinisikan seperti itu? Seperti apakah dunia sebelum ada negara? Apa yang terjadi pada dunia pra-negara sehingga ia digantikan dengan dunia negara-sentris? Kondisi apa yang memungkinkan transisi tersebut berlangsung? Apapun pertanyaannya, saya kira hanya orang “kurang kerjaan” yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini hari-hari ini. Biasanya pertanyaan ini segera ditolak dengan seruan, “jangan pikirkan apa yang sudah negara berikan kepadamu, pikirkan apa yang sudah kamu berikan untuk negara.”⁵ Repetisi abadi akan penolakan ini pada gilirannya akan mengangkat

⁴ Definisi ini mengacu pada Konvensi Montevideo 1933. Dokumen dapat diakses melalui “Montevideo Convention on the Rights and Duties of States - Council on Foreign Relations,” *Council for Foreign Relations* (26 Desember 1933), diakses pada 14 Maret 2011 melalui <http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897>.

⁵ Seruan terkenal John F. Kennedy, mantan presiden AS.

negara ke status sakral fetistik yang haram hukumnya untuk dipertanyakan. Namun, krisis sistem negara modern—yaitu maraknya penyalahgunaan kekuasaan atas nama kedaulatan— telah mendorong banyak orang untuk berani, bukan hanya bertanya, tapi mempertanyakan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang tersentak sadar bahwa, “*we thought we were dying for fatherland. We realized quickly it was for the bank vaults.*”⁶

Negara adalah sebuah kontainer, atau dalam bahasa sosiologi historis, sistem pengorganisasian sosial berbasis teritorial.⁷ Negara adalah *salah satu* dan *bukan* satu-satunya sistem pengorganisasian teritorial yang pernah dimiliki oleh sejarah. Sistem pengorganisasian lain yang pernah berjaya di Eropa, misalkan, adalah Gereja (*Res Publica Christiana*), Kekaisaran/Imperium, sistem vassal (upeti), liga kota dagang (di Jerman, yaitu Liga Hanseatic), dan negara-kota. Berbeda dengan sistem pengorganisasian lainnya, negara dicirikan dengan kedaulatan. Semenjak 1648, pertama kali negara modern dicetuskan melalui perjanjian Westphalia, sampai saat ini kedaulatan ini telah dan akan terus mengalami evolusi. Di perjanjian Westphalia (1648), ia berarti sentralisasi kekuasaan teritorial, eksklusivitas kekuasaan non-negara (gereja, bandit, ksatria, liga, dst.), dan pengakuan kedaulatan antar negara. Di Kongres Wina (1814), ia mendapat dimensi teritorial terbatasnya. Di Konvensi Jenewa (1864, 1906, 1929, 1949), ia diatur oleh Hukum Internasional. Di Konvensi Montevideo (1933), ia dibakukan sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa negara adalah *produk sejarah*, sehingga tidak perlu diatributkan predikat ahistoris sebagaimana umumnya dilakukan terhadap Tuhan—bagi yang melakukan, untuk kemudian disakralkan, tidak dipertanyakan lagi, bahkan dipatuhi tanpa sikap kritis. Perkara pada saat ini hanya negara yang “tersisa”—sekalipun masih bisa diperdebatkan—adalah perkara lain yang justru memikat analisis kritis dari berbagai akademisi, termasuk saya sendiri.

Sayangnya, sejarah tidak pernah berjalan lurus. Jika sejarah seolah terlihat lurus, bisa dipastikan kita sedang berada pada pengaruh kekuasaan tertentu, semenjak ada adagium, “*those who control the past control the future and those who control the present control the past.*”⁸ Jadi, kesadaran historis adalah penting di sini. Kesadaran historis adalah perjuangan menolak lupa.

⁶ Nukilan dari puisi Anatole France, penyair Perancis yang banya menyoroti sisi gelap pendirian republik modern Perancis, dikutip dari Michael Hardt & Antonio Negri, *Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard Uni Press, 2000), hal. 93.

⁷ Tiga teks seminalnya bisa dilihat pada Joseph Strayer, *On the Medieval Origins of the Modern State* (NJ: Princeton Uni, 1970); Charles Tilly, *Coercion, Capital and European States, AD 990-1992* (NJ: Princeton Uni, 1992); dan Hendrik Spruyt, *The Sovereign State and Its Competitoy* (NJ, Princeton: Princeton Uni Press, 1994)

⁸ Kutipan terkenal dari George Orwell, di novelnya, 1984.

Di sini, saya ingin mencoba membagikan ingatan saya secara sekilas tentang sejarah pendirian negara, dan satu hal yang tidak akan pernah saya lupa dari upaya yang pernah dan terus saya lakukan untuk mengingat asal-usul negara, yaitu bahwa **negara tidak pernah didirikan untuk rakyat, sedari mula ia didirikan atas aspirasi egois dari pemimpinnya – Paus/kaisar/raja/pangeran/presiden. Ironisnya, rakyat adalah kategori imajiner yang selalu diasumsikan, dan juga selalu dibawa-bawa untuk menjustifikasi pendirian negara sekaligus kekuasaan yang dinisbatkan kepada pemimpinnya.**

Asal-usul negara tidak bisa dilepaskan dari asal-usul kedaulatan. Kedaulatan adalah fitur utama sistem pengorganisasian ini. Kedaulatan bisa dilacak dari saat Paus mencoba mentransfer kedaulatan ilahi pada dirinya untuk menjustifikasi kekuasaannya atas Eropa pasca serangan barbarian di sekitar abad 8-9. Kaisar Romawi Agung cemburu; ia ingin mendapat kekuasaan besar seperti itu. Jadilah perseteruan di antara mereka di sekitar abad 10-13. Doktrin dua pedang setidaknya mampu sedikit meredakan ketegangan tersebut: Paus memegang 'pedang religius' sebagai tanda kekuasaan atas kehidupan agamawi rakyat; sementara Kaisar memegang 'pedang sekuler' sebagai tanda kekuasaan atas kehidupan duniawi rakyat. Sekitar abad 13 dan 14, baik Gereja maupun Kekaisaran mengalami krisis.⁹ Akibatnya, kekuasaan yang tadinya dikira kekal tersebut, ternyata terbukti keropos. Akhirnya mulailah raja-raja dan pangeran-pangeran (yang secara hirarkis saat itu berada di bawah kekuasaan Paus dan Kaisar) melirik ide kedaulatan, dan "bersekongkol" untuk menyingkirkan Paus dan Kaisar secara sistematis. Jadilah perjanjian Westphalia yang melaluinya kekuasaan paus dan Kaisar dipangkas habis. Pembagian wilayah misalnya, sudah jelas berupaya mencacah-cacah kekaisaran Romawi Agung saat itu. Lalu pengakuan kedaulatan eksklusif, jelas merupakan upaya untuk saling melegitimasi diri seraya mendeligitimasi yang lain yang tidak sejenis – Kaisar dan Paus (dan bandit, dan liga, dst.). Bahkan aspek aspek persekongkolan tersebut terlihat jelas dengan tidak adanya representasi Gereja, Liga Hanseatic, dan pemimpin Bandit yang saat itu berperan penting pada politik Eropa. Melalui Perjanjian Westphalia, Eropa hanya mengenal (secara *de jure*) negara berdaulat sebagai satu-satunya pengorganisasian teritorial.¹⁰ Apa yang mereka (raja/presiden) lakukan saat (merasa) mendapat kekuasaan ini?

⁹ Di sisi Gereja terjadi *Skisma Besar*, saat terdapat dua paus yang saling menegasikan, dan tentu saja, reformasi protestanisme. Di sisi Kekaisaran, terdapat perang-perang sipil sektarian dan etnik yang turut menyumbang keroposnya Kekaisaran, belum lagi bentrok-bentrok berdarah yang dilakukan para petani atas ketidak-adilan penguasanya.

¹⁰ Uraian lebih komprehensif dan detil mengenai ini telah saya bahas di Hizkia Yosie Polimpung, *Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008) [Tesis Magister].

Machiavelli sudah menekankan, hanya dua—*mempertahkannya* dan *mengatur* siapapun yang menjadi subyek kekuasaannya.¹¹ Upaya mempertahankan ini dilakukan dengan memagari kekuasaannya supaya tidak “dicuri” orang lain. Diciptakanlah ritual-ritual (yang di-)sakral(-kan) seperti pemahkotaan, pembaptisan raja, perayaan hari-hari tertentu. Benda-benda (yang di-)sakral(-kan) juga dibuat: tongkat, mahkota, tempat tidur, peti mati, dst. Apa tujuannya? Tidak lain adalah menjaga kesinambungan trah-nya di tahta kerajaan. Jadi, melalui hal-hal sakral ini, kerajaan (atau nantinya negara) diangkat statusnya ke taraf sakral, atau obyek yang sublim.¹² Ritual-ritual sakral, berikutnya akan memastikan bahwa hanya keturunan rajalah, sebagai orang yang (merasa) ditunjuk Tuhan untuk berkuasa di dunia, yang dapat menempati tahta sublim ini. Dengan kata lain, tahta sublim ini ditujukan untuk menjamin kontinuitas kekuasaan duniawi raja melalui suksepsi tubuh-tubuh yang non-sublim (fana, bisa mati) di tahta kerajaan. Lalu, dimana rakyat dalam narasi kekuasaan raja ini? Rakyat selalu ada untuk mengelu-elukan rajanya, membersihkan kamar raja, menyandang senjata untuk berperang, atau paling banter menjadi badut istana; tidak lebih.¹³

Sampai sini sekiranya ingin ditegaskan satu hal: proses estafet kedaulatan sampai pada penciptaan ritual kerajaan yang mengada-ada tadi telah melahirkan satu obyek kajian historis baru: yaitu suatu obyek sublim bernama *negara berdaulat*. Obyek sublim, jika dibedah secara psikoanalisis Lacanian, maka tidak bisa tidak, ia adalah bentuk sublimasi fantasi raja akan keutuhan dan kesinambungan eksistensinya. Kemustahilan hasrat akan eksistensi yang kekal—maksudnya, raja bisa saja mati saat tersedak tulang swikee, bukan?—diproeksikan pada suatu obyek fetis yang (dikira) mampu mengakomodasi hasrat tersebut: negara berdaulat.¹⁴ Negara berdaulat diharapkan raja mampu untuk selamanya menjaga kekuasaannya dan keturunannya.

Namun demikian, catatan penting perlu dibubuhkan bahwa **negara bukan hanya merupakan monopoli muara proyeksi fantasi raja akan**

¹¹ Lihat karyanya, Nicollo Machiavelli, *The Prince*, terj. D. Bondanella (Oxford: Oxford Uni Press, 2005).

¹² Meminjam Slavoj Zizek, *The Sublime Object of Ideology* (Verso, 1989).

¹³ Uraian sakralitas kekuasaan abad pertengahan ini amat berhutang pada karya Ernst Kantorowicz, *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology* (Princeton Uni, 1957).

¹⁴ Bagi mereka yang familiar dengan psikoanalisis Lacanian akan segera menyadari bahwa negara berdaulat merupakan obyek hasrat yang mengkristalkan sebuah obyek-penyebab-hasrat (*objet petit a*) bernama kedaulatan. Dan kedaulatan ini merupakan jawaban bagi kegegaran subyek saat itu, yaitu raja (\$). Lalu obyek yang telah selalu hilang (*Lamella*) tidak lain adalah fantasi *pervert* akan kekekalan eksistensi.

kekekalan eksistensi, melainkan ia juga sama-sama merupakan muara proyeksi fantasi rakyat akan kontinuitas eksistensinya. Hal ini demikian, karena dalam kampanye dan orasi publiknya, selalu raja menjanjikan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya. Hal ini menjawab, bahasa Althusser menginterpelasi, hasrat rakyat akan ketiga hal tersebut. Akibatnya, rakyat rela memproyeksikan hasratnya pada negara; atau dalam bahasa ilmu politik, rakyat memberi legitimasi bagi pemerintahan rajanya,¹⁵ dan ini pada gilirannya akan menimbulkan masalah besar, sangat besar.

Pada revolusi Perancis, fantasi raja dan fantasi rakyat terbukti tidak bisa berbagi muara; salah satu harus menyingkir. Sejarah membuktikan, pisau *guillotine* menjadi tanda dimana fantasi rajalah yang harus mengalah. Laksana bendungan bocor, demokrasi menjadi aliran deras fantasi rakyat untuk mengisi tahta kerajaan sepeninggalan raja monark. Bak sekawanan budak yang berhasil membunuh tuan tirannya, mereka kini berjingkrak-jingkrak di tempat tidur sakral, mempermainkan tongkat sakral raja, dan mungkin memakaikan mahkota raja ke kambing piaraan mereka. Tapi apakah benar *guillotine* telah sukses memenggal kepala raja, sekali untuk selamanya? Kembali ke penekanan saya sebelumnya, tubuh raja bisa saja mati, tapi obyek sublim tidak! Inilah yang disebut teologi/metafisika politik. Hantu kedaulatan membayangi demokrasi belia Eropa (Perancis) saat itu. Sekali lagi saya ingatkan, kedaulatan hanya hirau dua hal: mempertahankan dirinya (dengan cara apapun; ingat seni politik dan moralitas ganda Machiavelli) dan mengatur siapapun yang dikuasainya. Negara akan bangkit dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Ia akan merekrut personil baru untuk menjalankan pemerintahannya. Bahkan yang paling penting, ia akan mereformulasi “teknik-teknik pemerintahannya” yang telah usang digerogoti krisis.

Saya kira tepat dari sinilah kita harus mulai mengkontekstualisasi pemikiran-pemikiran Republikanisme modern, termasuk yang dibahas Bung Robet dalam RK.

¹⁵ Hal ini sekaligus menunjukkan dimensi fasis dari masing-masing subyek, siapapun dia—raja atau rakyat atau Paus. Subyek rela memberi diri untuk ditundukkan oleh sebuah penguasaan, sepanjang hasratnya terpenuhi. Serat fasis ini, dalam psikoanalisis Lacanian, merupakan “hadiah” dari siapa saja yang menjalani proses kastrasi menuju kedewasaan (yaitu yang disebut Odipus Kompleks). Lihat Felix Guattari, “Everybody wants to be a fascist,” *Semiotext(e)*, II(3). Catatan ini sekaligus mengkritik pandangan RK tentang fasisme yang terlalu menekankan pada dimensi rasial. Ras dan rasisme hanyalah *salah satu* korelat yang dihasilkan dari suatu fantasi keutuhan, dan bukan satu-satunya.

Negara dan Politik (Neo)Liberal¹⁶

Memahami teknik pemerintahan, tidak dapat dilepaskan dari paradigma yang menjadi *guideline* atasnya. Michel Foucault menyebut paradigma pemerintahan ini sebagai rasionalitas pemerintahan (*governmental rationalities*, atau *governmentality*).¹⁷ Rasionalitas pemerintahan adalah sebuah basis legitimasi moral bagi suatu aktivitas memerintah. Legitimasi yang dimaksud bukanlah dalam pengertian legal yuridis; jauh lebih dalam, ia adalah yang membuat praktik pemerintahan menjadi mungkin, normal, dianggap perlu, terpikirkan, bahkan menjadi tidak terelakkan keberadaannya. Sasaran pemerintahan demikian, lanjut Foucault, adalah untuk mengamati, memonitor, membentuk, mengendalikan, dan mengarahkan sikap, opini, perilaku, tindakan, pandangan, bahkan mental dan keyakinan sekelompok orang tertentu yang menjadi subyek pemerintahannya. Legitimasi ini memiliki bobot moral, dalam hal ia menjadi acuan universal bagi jalan pemerintahan sebagaimana dipaparkan ini. Hal ini menggoda Colin Gordon menyebut pemerintahan ini sebagai “pemerintahan atas nama kebenaran.”¹⁸

Dari perspektif rasionalitas pemerintahan, desakan revolusioner (di Perancis) merupakan suatu tantangan bagi mode pemerintahan saat itu, yaitu monarki. Bagi pemerintahan ini masalahnya kemudian adalah bagaimana tetap menjalankan pemerintahan, dengan demikian menegakkan kedaulatan, sembari mengakomodasi tuntutan demokrasi dan liberalisme. Atau dengan kalimat berbeda, bagaimana mengatur dan memerintah rakyat yang telah terkontaminasi ide-ide liberal dan demokrasi tanpa melanggar aspirasi-aspirasinya. Jawaban dari problem ini adalah yang kemudian disebut sebagai “seni pemerintahan liberal.”¹⁹

Memahami seni pemerintahan liberal ini, penting kiranya untuk mengambil jalan memutar sejenak untuk melihat lebih detil bagaimana liberalisme masuk dalam kancah politik di Eropa. Liberalisme merupakan *respon* memuncaknya absolutisme monarki. Jadi sekali lagi, ia tidak hadir begitu saja dari dalam; ia dipicu.

¹⁶ Subbagian ini disadur dari sebagian laporan riset penulis (dan tim) baru-baru ini tentang *Globalitas Demokrasi: Faktor Global dalam Over-dominasi Tradisi Libertarian dalam Reproduksi Wacana Demokrasi di Indonesia melalui Media-Massa*, Center for International Relations Studies (CIReS), Universitas Indonesia, 2011.

¹⁷ Uraian paling sistematis mengenai pemerintahan, lihat Michel Foucault, “Governmentality,” dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (peny.), *The Foucault Effect* (Chicago: The University of Chicago Press, 1991), hal 87-104. Untuk elaborasi yang lebih komprehensif, Michel Foucault, *The Birth of Biopolitics*, terj. G. Burchell (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008).

¹⁸ Colin Gordon, “Governmental Rationality: An Introduction,” dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (peny.), *The Foucault Effect*.

¹⁹ Foucault, *The Birth of Biopolitics*, hal. 2.

Seuniversal dan setransenden apapun gagasan yang (dikira) dikandung liberalisme, tetap saja ia butuh prakondisi imanen untuk memicunya. Berikutnya, respon ini dilakukannya dengan berusaha mengenakan batasan bagi pemerintahan yang ada. Hal ini demikian karena bagi liberal, pemerintah telah selalu “memerintah terlalu banyak” (*govern too much*).²⁰ Pemerintahan yang eksekutif ini dikuatirkan (bahkan telah disesalkan) berdampak negatif pada kebebasan individu rakyat untuk mengaktualisasikan diri mereka. Pemerintahan yang eksekutif yang membelenggu aktualisasi individu ini misalnya pada sistem wajib militer, penyeragaman agraria dan industri, dan pajak *estate* yang berlebihan.

Singkat cerita, seri revolusi di Perancis mampu menumbangkan penguasa/pemerintah saat itu, dan menggantinya dengan orang-orang baru yang liberal dan demokratis. Namun sekali lagi, “kutukan” teologi politik belum tersentuh. Logika pemerintahan tetap akan “menghantui” siapapun yang menduduki tahta pemerintahan, apapun ideologinya, berapapun banyaknya. Sekali lagi, dalam pengaruh sihir teologi politik, pemerintah bisa saja dikudeta, namun rasionalitas pemerintahan tidak akan bisa tersentuh. Sintesis antara rasionalitas pemerintahan dan liberalisme kemudian menghasilkan yang barusan disebut seni pemerintahan liberal. Pemerintahan liberal ini tentu tidak ingin mengulangi pemerintahan monarki yang eksekutif. Namun, inilah tantangannya: bagaimana memerintah tidak secara *eksekutif*, namun tetap *efektif*?

Investigasi Foucault membawanya pada kesimpulan jawaban: natur (*nature*). Adalah natur yang menjadi kata kunci bagi pemerintahan liberal. Yang dimaksud natur bukanlah suatu area tertentu yang bebas dari jaman manusia; ia adalah sifat alamiah dari masyarakat itu sendiri: yaitu sebagai individu rasional yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Natur alamiah ini membuat para ekonom klasik seperti Adam Smith menyebut manusia sebagai, tidak hanya *homo sapiens*, namun juga *homo economicus*. *Homo economicus* adalah manusia alami, manusia rasional, ... manusia yang “dibutuhkan” pemerintahan liberal. Jelas bahwa natur, oleh libertarianisme, dipandang dalam koridor ekonomi. Natur inilah yang menjadi situs dan/atau sumber kebenaran (*site of truth*) bagi pemerintahan liberal. Kembali mempertimbangkan seloroh Colin Gordon, sekali lagi, kebenaran natur inilah yang di-atas-namakan oleh pemerintahan liberal, yang dengan demikian, pada gilirannya, menjustifikasi secara moril keberadaannya. Sehingga jauh berkebalikan dari anggapan umum bahwa natur adalah zona yang tidak/belum tersentuh kekuasaan manusia, natur dalam

²⁰ *Ibid.*, hal. 13.

kosakata libertarian adalah telah selalu berada dalam kekuasaan manusia – pemerintah liberal – bahkan, ia ada semata-mata oleh karenanya. Natur adalah efek pemerintahan liberal tersebut.

Lalu bagaimana tepatnya natur ini menyumbang bagi tegaknya pemerintahan liberal? Adalah politik ekonomi (*political economy*) yang digunakan pemerintah untuk menjadikan natur sebagai justifikasi pemerintahannya. Melalui politik ekonomi, pemerintah hadir sebagai administrator untuk menjaga dan mengatur natur tersebut. Obyek pemerintahan ini, sekaligus lokus manifestasi natur individu rasional ini, tak lain adalah pasar. Pasar merupakan lokus dimana mekanisme spontan setiap individu berlangsung. Dalam pasar, setiap individu mempraktikkan (*exert*) rasionalitas mereka. Melalui pasar, lagi-lagi, terjadi transaksi rasional antara penyuplai (produsen) dan konsumen. Mekanisme pasar yang efektif dan rasional ini – transaksi rasional dan spontanitas individu – hanya akan terjadi apabila pasar dibiarkan bebas. Bebas disini adalah bebas dari intervensi pemerintah (dalam kasus Revolusi Perancis: regulasi monarki Louis).

Tantangan terhadap rasionalitas pemerintahan mencuat: bagaimana menjaga kebebasan pasar, melainkan tetap memungkinkan adanya kehadiran pemerintah (intervensi). Disinilah kecerdikan pemerintahan liberal muncul: pemerintah hadir dengan cara menyediakan kondisi bagi kebebasan pasar tersebut. Pengkondisian kebebasan pasar tersebut dilakukan dengan rupa-rupa regulasi yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi agar pasar tetap menjadi pasar bebas, pasar yang rasional, pasar yang didalamnya mekanisme spontan natural individu berlangsung. Perlu ditekankan dan digaris-bawahi di sini: yang dienggani oleh liberal adalah *intervensi* pemerintah, DAN BUKAN *kapabilitas* pemerintah untuk melakukan intervensi! Liberalisme memerlukan negara yang kuat, sedemikian kuatnya untuk menjaga kebebasan pasar dan individu, sedemikian kuatnya untuk mengancam (dalam artian legal-yuridis) siapapun yang berusaha mengkorupsi dan memanipulasi kebebasan pasar tersebut.²¹ Bagi liberalisme, pasar yang sah dan legitim adalah pasar yang berada pada kondisi *bebas*.

Kebebasan pasar ini penting karena hanya pasar yang demikian yang mampu menghasilkan profit ganda – bagi penjual dan pembeli. Dengan kata lain, adalah suatu pengayaan bersama (*mutual enrichment*) yang dicoba direalisasikan oleh liberal melalui pasar bebas.²² Di sini kekayaan orang lain di dipahami secara “rasional,” dan bukan “altruis”: orang lain penting untuk juga diperkaya karena kekayaannya merupakan

²¹ David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (NY: Oxford Uni Press, 2005).

²² Dalam *The Wealth of Nation*, Adam Smith mendetilkkan penjelasan ini dengan mekanisme tangan tak terlihat (*invisible hand*).

faktor penting bagi kekayaan saya. Kaum liberal percaya, dengan menjaga kebebasan, mekanisme spontan pasar akan membuat para partisipannya kaya.²³ Semakin pasar tersebut ramai, maka semakin besar kekayaan yang bisa dikeruk. Inilah yang menjadi *rational* bagi ekspansi pasar bebas keluar Eropa. Sampai sini bisa dipahami bahwa globalisasi pasar (yang pertama kali terjadi pada era kolonialisme) terjadi dalam rangka memperluas cakupan pasar bebas ke wilayah non-Eropa, dan menjadikannya lebih menguntungkan dan menghasilkan kekayaan bagi partisipannya mula-mula – Eropa.

Di sinilah sebenarnya gagasan ‘kepentingan nasional’ muncul untuk pertama kalinya, setidaknya dalam rasio ekonomi. Kepentingan nasional diukur dari kondisi pasar yang kondusif yang tercipta dari hasil upaya pemerintah. Atau dengan lain kata, kepentingan nasional dilihat dari ada tidaknya pasar bebas. Kata “nasional” tersebut merefleksikan sekumpulan individu yang menjadi subyek bagi setiap regulasi pemerintah, sekumpulan individu yang diantaranya terjadi proses pengayaan bersama melalui pasar. Sehingga siapapun yang mengancam mulusnya pasar bebas ini, ia menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Pada titik ini pula muncul konsep ‘keamanan’, setidaknya untuk pertama kalinya dalam rasio ekonomi. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan kepentingan nasional, dengan kata lain, keamanan mekanisme pasar bebas – suatu kondisi yang memungkinkan setiap warga negara melakukan aktivitas ekonomi dengan *bebas*.

Sehingga terkait kebebasan, penting untuk ditekankan bahwa libertarian menggadang-gadang kebebasan *bukan* demi kebebasan itu sendiri, melainkan karena kebebasan itu memberi justifikasi bagi pemerintahan liberal untuk memerintah. Liberalisme tidak berkepentingan dengan kebebasan individu masyarakat, melainkan ia berkepentingan dengan *penyediaan* kebebasan tersebut. Dengan kata lain, kebebasan adalah korelat dari pemerintahan liberal. Kutipan dari Foucault sekiranya memperjelas ini.

“If I employ the world “liberal,” it is first of all because this governmental practice in the process of establishing itself is not satisfied with respecting this or that freedom, with guaranteeing this or that freedom. More profoundly, it is a consumer of freedom. It is a consumer of freedom inasmuch as it can only function insofar as a number of freedoms actually exist: freedom of the market, freedom to buy and sell, the free exercise of property rights, freedom of discussion, possible freedom of expression, and so on. The new governmental reason needs freedom therefore, the new art of government consumes freedom.

²³ Orang-orang yang dibicarakan disini tentunya adalah orang-orang yang, terutama, memiliki modal.

It consumes freedom, which means that it must produce it. It must produce it, it must organize it. The new art of government therefore appears as the management of freedom, not in the sense of the imperative: "be free," with the immediate contradiction that this imperative may contain. **The formula of liberalism is not "be free." Liberalism formulates simply the following: I am going to produce what you need to be free. I am going to see to it that you are free to be free.**"²⁴

Kepemerintahan Neo-Liberal

Apabila diamati lebih seksama, maka akan nampak suatu paradoks di sini: untuk menjaga kebebasan pasar, maka pemerintah harus melakukan pembatasan-pembatasan berupa regulasi, legislasi dan peraturan. Politik keamanan dilakukan dengan menciptakan hukum-hukum yang interventif. Aparatus pemerintah disebar sedemikian rupa sampai mengepung masyarakat. Sampai titik tertentu, paradoks ini berakibat pada kembalinya operasi ala monarki abad pertengahan ke kehidupan modern, hanya saja kali ini mengambil rupa rezim-rezim Sosialis Terpimpin, bahkan Fasisme/Nazisme. Inilah krisis rasionalitas pemerintahan liberal: keinginannya untuk menjaga kebebasan (pasar), justru berakibat pada pembatasan kebebasan itu sendiri.²⁵ Jawaban terhadap tantangan krisis inilah yang membuat liberalisme berevolusi menjadi *neoliberalisme*.

Munculnya neoliberalisme²⁶ setidaknya ditandai dengan manuver dari empat figur pada tahun 1978-80: 1) Kebijakan kapitalisasi Cina oleh Deng Xiao Ping pada 1978; 2) Tangan besi Margaret Thatcher dalam menekan serikat buruh pada Mei 1979; 3) kebijakan kurs mengambang Paul Volcker, Presiden Bank Sentral AS (The FED), pada Juli 1979, dan 4) dukungan presiden AS Ronald Reagan terhadap kebijakan Volcker ditambah "racikan" kebijakannya untuk mengekang serikat buruh,

²⁴ Foucault, *The Birth of Biopolitics*, hal.63, cetak tebal dari penulis.

²⁵ Pemaparan ini juga pada gilirannya mempertanyakan penjelasan rasis tentang kemunculan Nazisme Hitler yang selalu menekankan faktor-faktor identitas kultural. Jauh dari itu, Fasisme merupakan capaian ekstrim dari liberalisme. Hal serupa hari-hari ini dapat disaksikan pada tuduhan kepada pemerintah AS yang liberal sebagai sosialisme terselubung akibat keputusannya memberi *bailout* yang sangat besar saat krisis finansial 2008-9 silam.

²⁶ Salah satu bentuk neoliberalisme, sebelum neoliberalisme yang kami bahas, adalah neoliberalisme ala Jerman yang populer dengan sebutan Sosial-Demokrasi (Sosdem). Disebut neoliberal, oleh Foucault, karena ia berupaya menjawab tantangan krisis pemerintahan liberal yang berujung pada totalitarianisme. Solusi bagi krisis tersebut, menurut sosdem, adalah dengan menciptakan suatu pasar sosial. Intinya, sosdem berusaha meminimalisiri intervensi dengan hanya meregulasi harga. Namun demikian jawaban ini kurang mampu menjawab beberapa efek samping yang diciptakannya seperti *moral hazard* dst. Lebih lanjut lihat Foucault, *The Birth of Biopolitics*, bab 4-6.

menderegulasi industri, dan yang paling terkenal, menabuh gong bagi era kapitalisme finansial. Setidaknya keempat preseden ini menjadi sumbu bagi gelombang neoliberalisasi di belahan dunia lainnya, yang tentunya bukan menjadi kompetensi studi ini untuk memaparkan.²⁷

Ciri khas neoliberalisme, apabila diabstraksikan dari fenomena-fenomena neoliberalisasi pada tahun-tahun tersebut (sampai hari ini) tampak pada gesturnya dalam “men-demokratisasi-kan” logika ekonomi kapitalisme. Dengan demokratisasi ini yang dimaksudkan adalah suatu upaya untuk menyebar-luaskan logika ekonomi ke seluruh lapisan/ elemen masyarakat, dari yang tadinya hanya terpusat pada para kapitalis, pemerintah dan pimpinan-pimpinan perusahaan. Tidak hanya itu, neoliberalisme berupaya memperluas cakupan logika ekonomi kapitalis ke domain-domain yang tadinya bukan ekonomi: pendidikan, kesehatan, seni, kebudayaan, hiburan, dan yang menjadi sorotan studi ini, politik.

Gestur neoliberalisasi ini tidak seharusnya dilihat dalam kaitannya dengan kebijakan dan (de)regulasi pemerintahan semata. Jauh lebih intim, gestur ini mencapai pada apa yang disebut Foucault sebagai produksi subyek neoliberal: *homo economicus*. Produksi subyek neoliberal ini dilakukan sedemikian rupa untuk men-convert masyarakatnya menjadi masyarakat yang *dengan sendirinya* akan menjaga rasionalitas dan kebebasan pasar. Hal ini akan “meringankan” tugas pemerintah dalam menjaga distorsi dan manipulasi mekanisme pasar. Hal ini demikian karena *homo economicus* adalah subyek yang bertindak rasional, dan setiap upayanya ditujukan untuk menjaga sistem yang darinya ia memperoleh kenyamanan ekonomis. Dengan kata lain, dengan neoliberalisasi, libertarian berusaha menyebar-luaskan rasa kepemilikan sistem (ekonomi kapitalis) kepada seluruh elemen masyarakat. Hal ini dilakukan dengan selalu menyuntikkan jargon-jargon yang mengesankan bahwa sistem inilah satu-satunya jalan untuk mencapai kemakmuran. Tidak kebetulan pula salah satu jargon Thatcher adalah TINA – *there is no alternative*.

Upaya untuk memerintah (*govern*) yang tadinya hanya berdimensi legal-institusional, kini bertransformasi dengan mulai merambah rana-ranah mental.²⁸ Apabila sebelumnya pemerintah memerintah dengan cara mengatur regulasi, aturan dan institusi, kini bertambah yang diaturnya, yaitu “jalan hidup” masyarakatnya. Pemerintah terus menyampaikan himbuan, iklan layanan masyarakat, petuah dan nasihat kepada masyarakatnya yang secara tidak langsung, mengarahkan masyarakatnya

²⁷ Uraian ekstensif dapat dilihat dari David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, dan Giovanni Arrighi, *Adam Smith in Beijing* (London: Verso, 2007).

²⁸ Marx pernah menyitir ini bahwa suatu saat, kapitalisme akan tegak dengan sendirinya saat mental umum (*general intellect*) kapitalis sudah “diidap” oleh seluruh elemen masyarakat.

untuk menjawab tantangan sistem—ketimbang mempertanyakannya. Proliferasi buku-buku motivasi, beserta sekumpulan organisasi dan nabi-nabi motivator bermunculan untuk ikut-ikutan meneguhkan arah “jalan hidup” masyarakat. Dan yang terpenting: semua ini berjalan dengan spontan! Titik inilah yang dituju oleh pemerintahan neoliberal saat pengaturan pemerintah telah menjadi swa-pengaturan (yang berkedok swa-bantu, *self-help*) masyarakat itu sendiri. Tujuannya tidak lain adalah menciptakan subyek-subyek yang dapat menjaga kelanggengan sistem tersebut: para *homo economicus*.

Republik, Demokrasi dan Perlawanan

Saya kira saya sudah sampai pada penghujung ingatan tentang asal-usul gagasan negara berdaulat itu sendiri. Satu ungkapan yang kiranya mampu merangkum pembahasan di atas adalah pada gagasan ‘**logika kedaulatan**’. Logika kedaulatan adalah kalkulasi matematis yang ada di kepala *siapapun* yang menempati posisi pemerintah berdaulat negara yang membawanya untuk pertama-tama mempertahankan kedaulatannya dengan aktif mengkomodifikasi gagasan-gagasan universal dan menjualnya kepada rakyat untuk kemudian ditukar dengan kepatuhan dan legitimasi. Jadi, dalam matematika kedaulatan, rakyat hanyalah sumber penopang legitimasinya dalam memerintah, dan janji-janji seperti keadilan, kemakmuran dan keamanan adalah gula-gula untuk merayu rakyat tadi. Jadi, apabila negara memprogramkan pengentasan kemiskinan, maka sebenarnya itu bukan ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan untuk menekankan eksistensinya sebagai *pengentas* kemiskinan. Lainnya, apabila presiden menyelenggarakan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), maka sebenarnya tujuannya bukan untuk meringankan beban pendidikan rakyatnya, melainkan *menunjukkan bahwa negara ada* dan siap membantu rakyat. Akhirnya, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh negara berdaulat, pada dasarnya dimotivasi untuk memperkuat dan memperkokoh eksistensinya sendiri sebagai sang berdaulat. Semakin intim jangkauan pengaturan negara, maka semakin berdaulatlah ia. Hal ini sekiranya cukup untuk mengklarifikasi anggapan normatif bahwa negara adalah diciptakan untuk rakyat. Sebaliknya, negara tidak pernah tertarik untuk menyejahterakan rakyat *demi* rakyatnya, kecuali demi *status quo*-nya. Sehingga saat negara dirasa tidak menyediakannya kesejahteraan, maka hal itu jangan dianggap sebagai penyimpangan atau krisis kepemimpinan, dan lantas berpikir bahwa mengganti orang yang duduk dalam sistem akan menjawab permasalahan tadi: singkatnya, negara berdaulat akan bermasalah saat orang-orang yang

duduk di pemerintahannya jahat. Padahal sebaliknya, negara berdaulat itu jahat karena memang ia bermasalah sejak awal.²⁹

Yang ingin ditawarkan di sini adalah untuk tidak membuang “bayi bersamaan dengan air kotor bekas mandinya.” Negara memang “terkutuk” sedari awal, namun pergelutan saya dalam dunia hubungan internasional selama ini tidak memberikan saya opsi lain paling rasional selain negara.³⁰ Namun tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja asal-usul dan kutukan negara berdaulat. Yang perlu dibuang—jika bisa—adalah ekses-ekses fasisnya, dan bukan negaranya. Lalu, *quo vadis* negara? Di sinilah saya ingin mengkontekstualisasikan gagasan republikanisme.

Jadi, sebelum masuk dalam pemahaman dasar republikanisme sebagaimana dipaparkan secara cergas oleh Bung Robet dalam RK, sebaiknya ia terlebih dahulu dipandang sebagai orientasi bagi sebuah sistem pengorganisasian teritorial bernama negara berdaulat. Jika kedaulatan adalah inti dari negara, maka republikanisme adalah kedaulatan *in action*. Orientasi lain yang menempati negara berdaulat, bisa saja berupa monarki, junta, khilafah, dst. Seperti apakah orientasi tersebut? Saya kira buku RK lebih kompeten untuk menjawab ini secara lebih komprehensif ketimbang ulasan saya diawal tulisan ini. Karena hanya melalui penegasan seperti ini kita bisa mengutak-atik negara.

Terkait negara, tawaran saya adalah untuk memperlakukan negara tidak lebih sebagai “pegawai” yang kita bayar untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan, penyejahteraan yang entah itu diupayakan melalui upaya-upaya politional maupun diplomatik. Tidak lebih. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila kita melucuti atributasi-atributasi transendental yang selama ini kita lekatkan pada negara. Negara bukan Tuhan yang harus disembah—bagi yang percaya. Ia bukan pula telos sejarah yang harus diperjuangkan. Ia hanyalah alat, mesin, titik. Bedakan negara dari ‘bangsa’ (nasion) yang merupakan produk dari perjumpaan di antara masyarakat yang tak mengenal paripurna. Jangan biarkan negara memonopoli, mengeksploitasi dan memanipulasi ide-ide kebangsaan, apalagi dipergunakannya untuk melegitimasi kekuasaannya. Pada pemerintah, katakan “anda hanya perlu berbicara mempertanggung-jawabkan kemajuan-kemajuan (atau kemandekan) yang sudah anda capai selama ini tentang memberikan kesejahteraan bagi kami, selain itu: tutup mulut!”. Enigma lain adalah terkait status demokrasi. Apabila republik adalah orientasi

²⁹ Permainan kata ini terinspirasi dari teman baik saya, Martin Suryajaya, saat mengatakan bahwa “kapitalisme itu bermasalah karena ia jahat. Padahal kapitalisme itu jahat karena ia bermasalah, dan bukan sebaliknya.”

³⁰ Apabila dibawa ke konteks sistem internasional, naiknya neokonservatisme Amerika, dan proses-proses internasional yang mensyaratkan negara berdaulat, saya kira alasan ini menjadi sangat rasional. Keterbatasan membuat saya harus menunda pembahasan tentang ini.

pemerintahan yang membuka partisipasi politik luas, maka saya kira hanya demokrasi yang mampu memfasilitasi ini. Sampai di sini saya kira saya sepakat dengan Bung Robet dalam RK. Namun seperti yang saya tekankan di awal, saya tidak menemukan setidaknya *guideline* praktis seperti apakah partisipasi yang dimaksud selain kisi-kisi etis normatif—mementingkan kepentingan bersama, mengutamakan kebaikan, tanggung jawab, dst. Hal ini saya kira penting mengingat pemerintahan yang sekarang telah jauh dari yang digariskan dalam buku RK. Apa yang bisa dilakukan rakyat?

Modal rakyat hanya dua: republik dan demokrasi. Republik menjamin “partisipasi maksimum” (118) rakyat, dan demokrasi memfasilitasi partisipasi tersebut (101). Apabila kita sepakat bahwa negara berdaulat, pasca absolutisme monarki, adalah ruang kosong,³¹ dan hantu kedaulatan tetap menggentayangi *siapapun* yang menduduki tahta kedaulatan, dan menjadikannya sebagai matematikawan kekuasaan yang hanya peduli pada *status quo*-nya, maka hal yang wajib untuk segera dilakukan bukanlah berdoa meminta pemimpin yang sayang rakyat, bermoral dan jujur, melainkan adalah segera mengkonsolidasikan barisan warga negara yang siap mengawal demokrasi untuk menjaga agar ruang kedaulatan tetap kosong.³² Saya ingin mendetilkkan upaya partisipasi politik dalam pengawalan demokrasi ini. Satu kuncinya: **perlawanan terhadap seluruh rezim (sekalipun ia terpilih secara) demokratis.**³³

Demokrasi membolongi kedaulatan negara: sama seperti hasrat irasional yang-Real dalam psikoanalisis membolongi pengetahuan. Jamak dan beragamnya rakyat (*demos*)—dalam hal identitas, artikulasi kepentingan, dan seruan-seruan politiknya—merupakan simptom yang selalu menghantui segala absolutisasi kedaulatan. Adalah mustahil bagi sang berdaulat untuk mampu mengakomodasi kepentingan *demos*, sehingga hal ini akan membawa kita untuk menalar sisi lain dari kenyataan ini, yaitu adalah logis bahwa akan terdapat sebagian dari *demos* yang merasa bukan bagian dari pemerintahan sang berdaulat. Logis pula apabila yang sebagian dari *demos* ini melakukan protes dan perlawanan terhadap pemerintahan sang berdaulat ini. Tepat di sinilah perlawanan dari sebagian

³¹ Untuk ini lihat juga tulisan Robertus Robet, “Yang-Politik dan Demokrasi sebagai Ruang Kosong,” dalam *Kembalinya Politik*, (Marjin Kiri, 2008), hal. 49-51.

³² Saya amat bersepakat dengan proposisi tentang mengawal ruang kosong yang ditawarkan Bung Robet dalam *Ibid.*, namun lagi-lagi saya tidak menjumpai uraian praksis selain proposisi-proposisi etis-normatif. Saya kira adalah penting bagi Bung Robet untuk memberi klarifikasi tentang program-programnya untuk mengawal demokrasi ini. Setidaknya supaya beliau tidak berjuang sendiri.

³³ Bagian akhir ini juga sekaligus berupaya meneruskan provokasi Bung Robet dalam *Ibid.*, hal 56, “[D]emokrasi akan menjadi lebih demokratis manakala politik demokratis terus diarahkan menantang *rezim demokratis*.” (Penekanan pada naskah asli.)

demos ini akan mengganggu, jika bukan mengacaukan (*disrupt*), kemulusan dan ke-normal-an pemerintahan incumbent. Jauh dari mengapresiasi negatif bentuk-bentuk protes disruptif ini, justru disrupsi ini menandakan *masih* ada demokrasi di republik tersebut.

Memahami perlawanan sebagian demos ini sama halnya dengan, dalam tradisi psikoanalisis yang saya kampanyekan, memahami suatu hal yang tak terpahami, yang akan selalu menolak penjelasan-penjelasan intelek-rasional.³⁴ Terhadap tindakan semacam ini, Negara selalu memiliki nama buruk untuknya: anarkis, separatist, dst., Psikologi menyebutnya: skizofren atau gila, Sosiologi menyebutnya: perilaku menyimpang, Sains menyebutnya: irasional, agama menyebutnya: bid'ah. Stigmatisasi semacam ini saya kira cukup menandakan satu hal: diskriminasi atas artikulasi yang sah. Dalam politik kenegaraan, hal ini bisa berbahaya karena ia justru meniadakan demokrasi. Apa artinya demokrasi jika seluruh rakyat tunduk pada konsensus bersama dan tidak ada pemberontakan? Thomas Jefferson, seorang tokoh republikan dari Amerika Serikat mengatakan,

"The spirit of resistance to government is so valuable on certain occasions, that I wish to be always kept alive. It will often be exercised when wrong, but better so than not to be exercised at all. I like a little rebellion now and then. It is like a storm in the Atmosphere."³⁵

Memang benar terkadang rakyat bertindak secara spontan dan emosional, tapi walau bagaimanapun juga, itu merupakan hasil dari kerja pemikiran mereka yang terbatas itu. Seperti ditegaskan Jacques Ranciere, "*everyone thinks,*" dan perlawanan pertama-tama dan utamanya merupakan "*a staging of reasons and ways of speaking.*" Dalam *Disagreement*, Ranciere menegaskan tentang perlawanan politik sebagai persoalan

"[P]erforming or playing, in the theatrical sense of the word, the gap between a place where the *demos* exist and a place where it does not ... Politics consists in playing or acting out this relationship, ..."³⁶

³⁴ Pembaca Jacques Lacan (dan Lacanian lainnya) akan segera tahu bahwa saya sedang membicarakan yang-Riil, yaitu yang kata Lacan, "*that which resists symbolization,*"; "*what is strictly unthinkable.*" Uraian yang lumayan komprehensif mengenai yang-Riil, lihat Jacques Lacan, *Seminar XXII of Jacques Lacan, R.S.I., 1974-75*, peny. Jacques-Alain Miller, terj. Jack W. Stone dari transkrip utama milik Editions Du Seuil, hal. vii.

³⁵ Thomas Jefferson, *Writings*, ed. Merrill Peterson (Washington, D.C.: Library of America, 1984), hal 889-90.

³⁶ Jacques Ranciere, *Disagreement*, terj., Julie Rose (Minneapolis, 1999), ha. 88.

Perlawanan merupakan apa yang psikoanalisis sebut sebagai simptom dimana keretakan kedaulatan itu tidak dapat disembunyikan lagi melalui jargon-jargon muluk retorik pemerintah. Sehingga dari perspektif republikan yang membuka partisipasi politik maksimum bagi rakyat, maka seluruh perlawanan adalah *sah* dan *legitim*, terlepas apakah itu dilakukan atas dasar yang jelas atau tidak. Yang ingin saya tekankan di sini adalah status dari perlawanan tersebut; ia adalah hal yang penting dan primer bagi pendirian republik dan pengawalan demokrasi. Primasi perlawanan adalah imperatif republik demokratis. Jefferson juga menekankan bahwa perlawanan menandakan bahwa *masih* terdapat kebebasan dalam suatu negara.

“If they remain quiet under such misconceptions it is a lethargy, the forerunner of death to the public liberty ... Let them take arms. God forbid we should ever be 20 years without rebellion ... The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is it's natural manure”³⁷

Saya kira sudah saatnya rakyat tidak hanya merayakan perlawanan demokratis – dan mengutipnya berulang-ulang melalui *facebook* dan *twitter*, melainkan mulai memprogram perlawanan seperti apakah yang dituju. Politik hanya memiliki dua ujung: institusi atau propaganda.³⁸ Tidak ada yang salah dalam keduanya, sepanjang program-programnya dirumuskan dengan jelas dan visioner. Yang pasti, sudah saatnya rakyat berhenti menaruh harapan pada orang lain di jalanan sana yang akan membantu segala kesusahan yang kita hadapi yang diakibatkan oleh ulah negara. Waspada dengan siapapun yang berusaha “mewakikan” perlawanan rakyat. Bisa saja ia ingin mengalihkan energi perlawanan rakyat kepada hal-hal yang justru hanya membawa keuntungan baginya semata. Tiba waktunya bagi rakyat untuk bangkit dan melawan, dengan segala keterbatasannya, memikirkan strategi dan taktik yang terbaik. Satu hal yang pasti, “‘Freedom is not free’ is true. No outside force is coming to give oppressed people the freedom they so much want. People will have to learn how to take that freedom themselves.”³⁹

³⁷ Jefferson, *Ibid.*, hal 911

³⁸ Adalah kawan saya Anom Astika yang selalu memperingatkan tentang hal ini.

³⁹ Gene Sharp, *From Dictatorship to Democracy* (The Albert Einstein Institute, 2010), hal 78.

*Versi terdahulu artikel ini disajikan pada Forum Diskusi “Republikanisme sebagai paradigma pikir kewargaan yang baik” dan Bedah Buku Republikanisme dan Keindonesiaan (karya Robertus Robet), Citizen Institute dan PUSDIMA UNJ, Universitas Negeri Jakarta, 16 Maret 2011.

*Penulis adalah peneliti dan Manajer Program di Center for Global Civil Society Studies (PACIVIS), Universitas Indonesia; mengajar Hubungan Internasional di beberapa kampus di Jakarta; aktif dalam kajian Teori dan Metodologi HI, tata-dunia, dan Kapitalisme Pasca-Fordis dari perspektif Psikoanalisis; saat ini sedang mempersiapkan disertasi doctoral untuk Departemen Filsafat, Universitas Indonesia. Kontak: yosieprodigy@live.com

Daftar Pustaka

- Arrighi, Giovanni, *Adam Smith in Beijing* (London: Verso, 2007).
- Foucault, Michel, “Governmentality,” dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (peny.), *The Foucault Effect* (Chicago: The University of Chicago Press, 1991).
- Foucault, Michel, *The Birth of Biopolitics*, terj. G. Burchell (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008).
- Gordon, Colin, “Governmental Rationality: An Introduction,” dalam G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (peny.), *The Foucault Effect*.
- Guattari, Felix, “Everybody wants to be a fascist,” *Semiotext(e)*, II(3).
- Hardt, Michael & Antonio Negri, *Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard Uni Press, 2000), hal. 93.
- Harvey, David, *A Brief History of Neoliberalism* (NY: Oxford Uni Press, 2005).
- Jefferson, Thomas, *Writings*, ed. Merrill Peterson (Washington, D.C.: Library of America, 1984), hal 889-90.
- Kantorowicz, Ernst, *The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology* (Princeton Uni, 1957).
- Lacan, Jacques, *Seminar XXII of Jacques Lacan, R.S.I., 1974-75*, peny. Jacques-Alain Miller, terj. Jack W. Stone dari transkrip utama milik Editions Du Seuil, hal. vii.
- Machiavelli, Nicollo, *The Prince*, terj. D. Bondanella (Oxford: Oxford Uni Press, 2005).
- “Montevideo Convention on the Rights and Duties of States - Council on Foreign Relations,” *Council for Foreign Relations* (26 Desember 1933), diakses pada 14 Maret 2011 melalui <http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897>.

- Polimpung, Hizkia Yosie, *Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008) [Tesis Magister].
- Priono, B. Herry, "Memahami Leviathan Baru," *Kompas* (5/5/2002).
- Ranciere, Jacques, *Disagreement*, terj., Julie Rose (Minneapolis, 1999), ha. 88.
- Robet, Robertus, *Republikanisme dan Keindonesiaan* (Jakarta: Marjin Kiri, 2006)
- Robet, Robertus, "Yang-Politik dan Demokrasi sebagai Ruang Kosong," dalam R. Robet & R. Agustinus, peny., *Kembalinya Politik*, (Marjin Kiri, 2008)
- Sharp, Gene, *From Dictatorship to Democracy* (The Albert Einstein Institute, 2010), hal 78.
- Spruyt, Hendrik, *The Sovereign State and Its Competitoy* (NJ, Princeton: Princeton Uni Press, 1994)
- Strayer, Joseph, *On the Medieval Origis of the Modern State* (NJ: Princeton Uni, 1970).
- Subono, Nur Iman & Hizkia Yosie Polimpung *Globalitas Demokrasi: Faktor Global dalam Over-dominasi Tradisi Libertarian dalam Reproduksi Wacana Demokrasi di Indonesia melalui Media-Massa* (Depok: Center for International Relations Studies (CIReS), Universitas Indonesia, 2011).
- Tilly, Charles, *Coercion, Capital and European States, AD 990-1992* (NJ: Princeton Uni, 1992).
- Zizek, Slavoj, *The Sublime Object of Ideology* (Verso, 1989).

TELAAH NEOLIBERALISME DALAM MEMAHAMI REAKSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP NASIONALISASI PERUSAHAAN MINYAK DI VENEZUELA

Yusran, S.IP, M.Si¹
yusran@budiluhur.ac.id

Abstract

Essential contradictions of economic and political perspective adopted by countries in the world has resulted in disparities of perspectives in analyzing an issue. This paper aims to understand the reaction of the United States against the nationalization of oil companies in Venezuela, viewed from the perspective of neoliberalism. This explanative study uses qualitative methods. Several forms of reaction by the U.S. against the nationalization of oil companies in Venezuela is to support the efforts of pro-liberal groups in Venezuela to depose the Chavez government, and encourage the efforts of their multinational companies such as ExxonMobile and ConocoPhillips to bring the dispute to international arbitration with Venezuela. There are several reasons that indicate the U.S. reaction against the nationalization of oil companies in Venezuela, namely: (a) the derivation of privatization due to the progression of nationalization, (b) the threat of deregulation because of the diminishing role of the market and obstruction of efforts to achieve maximum profitability, and (c) reduce the imaging neo-liberal institutions and the defuncting of the two main pillars of the Washington Consensus. Thus, the negative reaction of the U.S. (as thr pioneer of neoliberalism) against the nationalisation of Venezuela's oil is to maintain its existence and development of neoliberalism in the world.

Keywords : *Nationalization, Neoliberalism, Privatization dan Multinacional Corporational (MNC).*

Pendahuluan

Pasang surut perspektif pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan politik turut melengkapi dinamika hubungan internasional. Keunggulan-keunggulan yang hanya bersifat parsial menjadi hipotesis awal untuk memahami fluktuasi pemikiran yang terjadi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing pemikiran merupakan realita untuk menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat perspektif pembangunan yang benar-benar sempurna. Perbedaan-perbedaan substansi secara prinsipil juga menyulut terjadinya 'benturan' antar

¹ Dosen dan Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur.

pemikiran. Sehingga, mengakibatkan perselisihan diantara negara-negara penganut perspektif yang saling beroposisi.

Bagi masyarakat ekonomi kapitalis, neoliberalisme adalah pandangan ekonomi mutakhir. Neoliberalisme merupakan bentuk baru dari paham ekonomi yang menjunjung tinggi kebebasan dan individualitas. Oleh karena itu, liberalisasi, deregulasi dan privatisasi merupakan bagian dari prinsip dan agenda utama yang hendak dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi.²

Bagi Amerika Serikat (AS) – negara *super power* dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia terutama setelah berakhirnya Perang Dingin – kapitalisme merupakan nilai fundamental.³ Menegakkan dan mengembangkan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia adalah tujuan penting bagi AS, selaku pelopor neoliberalisme bersama Inggris. Namun untuk mencapai tujuan itu, AS tentunya akan berhadapan dengan paham-paham ekonomi lainnya yang berseberangan prinsip, atau bahkan menjadi rival bagi neoliberalisme. AS juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai bentuk pertentangan yang dapat meminimalisir eksistensi neoliberalisme. Hal ini penting mengingat bahwa perkembangan paham-paham ekonomi yang asimetris terhadap neoliberalisme, tidak dapat diredam bahkan dapat muncul dengan wujud dan tingkat resistensi yang baru pula.

Perkembangan yang terjadi di Venezuela bersama presiden revolusionernya Presiden Hugo Chavez (selanjutnya dibaca Chavez) dapat merepresentasikan bentuk ancaman bagi eksistensi neoliberalisme AS. Akhir-akhir ini Venezuela menjadi sorotan dunia internasional atas konsep sosialisme yang diusung dalam pembangunannya.⁴ Venezuela seringkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan kaum neoliberal AS, terutama nasionalisasi yang dilakukan Chavez.

Proyek-proyek nasionalisasi (terutama perusahaan minyak) yang direalisasikan oleh Chavez, menyulut AS untuk menunjukkan reaksi negatif. Pasalnya, proyek-proyek nasionalisasi itu bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi politik AS baik di Venezuela maupun di Amerika Latin.⁵ Lebih dari itu, jika ditelaah dari sudut pandang prinsip, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Chavez seolah menentang prinsip-prinsip mendasar dalam neoliberalisme yang begitu dijunjung tinggi AS. Reaksi-reaksi AS terhadap kebijakan Chavez dapat dipahami secara tersirat maupun kasat mata melalui tindakan-tindakan yang ditunjukkan AS.

² Bonnie Setiawan, *Menggugat Globalisasi*, (Jakarta: INFID dan IGJ, 2001), 2-5.

³ Nurani Soyomukti, *Hugo Chavez Vs Amerika Serikat*. (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 12.

⁴ *Ibid.*

⁵ Alan Woods, "Nasionalisasi di Venezuela – Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?" dalam *International Marxist Tendency Journal*, Mei, 2007.

Mendukung perusahaan multinasionalnya (ExxonMobile dan ConocoPhilip) untuk mengajukan gugatan ke arbitrase internasional, dan memberikan dukungan penuh kepada kelompok oposisi Venezuela untuk menjatuhkan kekuasaan Chavez, adalah representasi dari reaksi negatif AS terhadap kebijakan “kiri” Venezuela.

Uraian di atas menjadi persoalan yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini akan meninjau mengenai kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak yang dilakukan Chavez yang berseberangan secara prinsip dengan neoliberalisme. Selanjutnya penelitian ini akan melihat reaksi yang ditunjukkan AS dalam menyikapi kebijakan nasionalisasi Chavez. Sebagai penekanan permasalahan terpenting dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplanasikan alasan-alasan AS memberikan reaksi negatif terhadap Chavez. Penulis akan mengeksplanasikan persoalan tersebut dengan melakukan telaah dari sudut pandang neoliberalisme.

Neoliberalisme: Anti Nasionalisasi

Neoliberalisme sebenarnya bukanlah paham yang benar-benar baru, namun sebuah bentuk revisi terbaru dari sistem ekonomi pasar yang pernah dianut AS sebelumnya yaitu sistem ekonomi liberal klasik. Neoliberalisme dapat eksis menguasai paham ekonomi global karena dipelopori oleh negara industri maju yang mempunyai pengaruh besar di dunia, yakni Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan negara Uni Eropa lainnya. Dalam perjalanannya, neoliberalisme beriringan dengan perkembangan globalisasi.⁶ Neoliberalisme disebut-sebut sebagai mesin penggerak globalisasi yang dikembangkan AS dalam menguasai tatanan ekonomi politik global. Untuk menciptakan hegemoninya, globalisasi pun telah dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan suatu negara yang diidentikkan dengan kemajuan teknologi dan industri.⁷

Asumsi dasar neoliberalisme adalah paham pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada mekanisme pasar dan perkembangan arus modal untuk mencapai keuntungan maksimal. Dalam upayanya menumbuhkembangkan perekonomian, neoliberalisme sangat meminimalisir bahkan tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Pemerintah hanya dibutuhkan untuk membuat regulasi-regulasi yang berpihak pada prinsip-prinsip neo-liberal. Pemerintah hanya difungsikan sebagai tatanan dan *power* politik yang harus mampu mendukung perkembangan sistem neoliberalisme untuk mempermudah tujuan ekonomi neo-liberal.⁸ Dalam neoliberalisme yang

⁶ Elizabeth Martinez and Arnoldo García, “What is “Neo-Liberalism?” dalam Jurnal *Third World Resurgence* No. 99/1998, 14.

⁷ David C. Korten, *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 33.

⁸ Bonnie Setiawan, *Mengugat Globalisasi*, (Jakarta: INFID dan IGJ, 2001), hal. 2-5.

menjadi penentu utama kehidupan sebuah negara adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah.⁹

Secara umum perspektif ekonomi neoliberal memiliki tiga komponen pokok, diantaranya: (1) Mengangkat peran pasar di atas peran negara, *civil society* dan sistem demokrasi partisipatoris dalam menata ekonomi dan arus barang dan modal; (2) Menjunjung tinggi peran dan cakupan sektor privat dan kepemilikan privat di atas kepentingan publik; (3) Menganggap bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya dapat dicapai melalui pasar.¹⁰

Dalam mengembangkan paham ekonomi politik secara global, neoliberalisme secara fundamental dijalankan melalui beberapa aturan pokok dan prinsip dasar sebagai berikut: (1) Aturan pasar, yakni dengan membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah; (2) Pemotongan pengeluaran publik dan pelayanan sosial seperti untuk pendidikan dan kesehatan, pengurangan *safety-net* untuk rakyat miskin, dan dana bantuan untuk sarana umum seperti jalan, jembatan dan penyediaan air bersih, karena subsidi pemerintah dan pajak hanya diperbolehkan untuk keperluan bisnis dan *benefit*; (3) Deregulasi, dengan mengurangi regulasi pemerintah pada setiap hal yang sifatnya dapat mengurangi keuntungan, termasuk kelestarian lingkungan dan keamanan dalam bekerja; (4) Privatisasi, dengan menjual perusahaan pemerintah, barang dan jasa pada investor pribadi atau kelompok yang dalam pengertian lain dapat dikatakan sebagai swastanisasi BUMN; (5) Dihapusnya konsep barang publik atau pun komunitas yang diganti dengan tanggung jawab individual. Dengan tegas dinyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat, minimnya pendidikan dan lemahnya kesehatan adalah karena ulah mereka sendiri, dan adalah kesalahan mereka jika mereka gagal dan merupakan bentuk dari kemalasan.¹¹

Neoliberalisme menyatukan kebijakan ekonomi dan politik dalam satu ranah kebijakan, dan untuk mengkombinasikannya harus melalui penyesuaian. Penyesuaian itu disebut Program Penyesuaian Struktural. Untuk melakukan program penyesuaian struktural, neoliberalisme didukung oleh beberapa lembaga yang dikenal dengan institusi-institusi neo-liberal yang terdiri dari (*International Monetary Fund*) IMF, *World Bank* (WB), dan *World Trade Organization* (WTO). Lembaga-lembaga ini difungsikan sebagai *surveillance system*, yang artinya untuk memastikan dan mengontrol agar negara-negara di dunia tetap melaksanakan agenda-agenda neo-liberal.¹² Program penyesuaian struktural, merupakan paket kebijakan yang termuat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ilham M. Wijaya, "Alternatif Globalisasi Neoliberal", dalam *Kompas*, 24 Januari 2007.

¹¹ Martinez, "What is "Neo-Liberalism?", 17.

¹² Korten, *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, 33.

dalam Konsensus Washington. Pada dasarnya, Konsensus Washington bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan paham neoliberalisme secara global.¹³

Neoliberalisasi bersama globalisasi juga memunculkan beberapa komponen pendukung baru yang memiliki tingkat kekuasaan lintas negara. (*Multinational Corporation*) MNC adalah salah satu pendukung terpenting bagi neo-liberal. MNC merupakan kekuatan nyata yang memiliki aset kekayaan lebih besar dari pada negara-negara miskin dan berkembang di dunia. MNC ini rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju - AS, negara-negara Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia - penganut neoliberalisme.¹⁴ Neoliberalisme dan globalisasi mampu mendorong pertumbuhan dan penyebaran MNC negara maju ke seluruh penjuru dunia. Didorong oleh motif mengejar keuntungan global, memperoleh suplay bahan mentah, melayani pasar secara langsung, meminimalkan biaya, dan mengikuti tahap evolutif dalam internasionalisasi bisnis, serta didukung oleh kemampuan memindahkan modal dan keuntungan, MNC kini membentuk dan mewarnai konfigurasi ekonomi politik global.¹⁵

Dari penjelasan-penjelasan neoliberalisme secara konseptual di atas, penulis menganalisis beberapa poin penekanan dalam neoliberalisme. Neoliberalisme melalui agenda globalisasinya sangat mengedepankan nilai-nilai individualitas dengan mengutamakan peranan sektor privat. Sehingga, privatisasi merupakan kebijakan mendasar dari eksistensi neoliberalisme. Selain itu, neoliberalisme juga memiliki lembaga-lembaga internasional terutama IMF, WB dan WTO yang berperan penting untuk memantau 'loyalitas' negara-negara di dunia dalam mengikuti tata aturan dan prinsip-prinsip neo-liberal. Selanjutnya, neoliberalisme pun memiliki MNC sebagai komponen pendukung yang memungkinkan untuk memiliki kekuasaan lintas negara, sehingga negara maju pemilik MNC itu dapat terus memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari negara-negara tempat MNC beroperasi. Hal itu tentunya berbeda, bahkan bertentangan dengan substansi yang terdapat dalam nasionalisasi. Untuk memperlihatkan pertentangan antara prinsip-prinsip itu, penulis akan menjelaskan sekelumit tentang nasionalisasi.

Secara sederhana, nasionalisasi merupakan konsep *reversal*, atau yang berlawanan dengan privatisasi. Privatisasi pada dasarnya dapat dijalankan dalam berbagai macam bentuk, yaitu berkisar dari penjualan

¹³ Jeff Haynes, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000), 112.

¹⁴ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 216-219.

¹⁵ Anggito Abimanyu, "Liberalisasi Perdagangan dan Biaya Lingkungan", dalam *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: PT Tirta Wacana, 1995), 19-20.

penyedia dari saham milik pemerintah, penjualan secara parsial, pemberian konsesi kontrak sewa, kontrak manajemen, penjualan aktivitas bisnis yang hanya bersifat penunjang, pembukaan sektor yang semula direstriksi kepada pihak privat dan lain sebagainya. Sedangkan Nasionalisasi adalah pengambilalihan kepemilikan swasta dalam sektor-sektor ekonomi, industri, keuangan, atau lembaga-lembaga pelayanan oleh pemerintah. Negara yang berdaulat mempunyai hak yang sah atas pengambilan kebijakan nasionalisasi dan mempunyai hak inheren dalam penanganan harta maupun usaha yang ada di wilayahnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak ada perjanjian internasional atau jaminan pemerintah terhadap modal asing, negara bebas menasionalisasi harta kekayaan asing manapun dengan pembayaran kompensasi.¹⁶

Penjelasan tentang nasionalisasi di atas, menunjukkan perbedaan esensi teramat signifikan dengan neoliberalisme. Nasionalisasi adalah kebijakan yang jelas berseberangan dengan prinsip-prinsip neoliberalisme, terutama privatisasi. Nasionalisasi juga akan memperkuat peran negara, sehingga deregulasi tidak akan tercapai. Selain itu, nasionalisasi juga akan mengurangi keuntungan MNC-MNC negara maju yang berinvestasi di Venezuela. Sehingga, wajar saja jika AS memberikan reaksi negatif terhadap kebijakan-kebijakan nasionalisasi yang dilakukan Chavez di Venezuela. Catatan inilah yang akan menjadi dasar penulis untuk menelaah reaksi negatif AS terhadap kebijakan nasionalisasi yang diterapkan Venezuela.

Nasionalisasi Perusahaan Minyak Venezuela

Venezuela adalah negara yang terletak di Benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan. WB mengidentifikasi Venezuela sebagai negara berkembang berpendapatan menengah ke atas dengan GDP perkapita sebesar 6,070 US (2006). Pada tahun 2006, minyak menjadi sektor utama negara ini, dan menyumbangkan sekitar sepertiga GDP.¹⁷ Tetapi, pengelolaan minyak Venezuela menarik perhatian internasional karena dilakukan dengan perspektif yang tidak populis bagi neoliberalisme selaku perspektif pembangunan yang dominan dewasa ini. Keberanian Chavez menasionalisasikan perusahaan-perusahaan minyak di Venezuela berbenturan kepentingan AS sebagai pemilik beberapa MNC tingkat atas dunia, yang beroperasi di ladang minyak Venezuela. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran tentang sosok Chavez – pelopor nasionalisi

¹⁶ M.Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Liberty,1990), 51.

¹⁷ Woods, "Nasionalisasi di Venezuela – Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?"

Venezuela - dan kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak yang dilakukannya.

a. Hugo Chavez: pelopor nasionalisasi Venezuela

Hugo Rafael Chávez Frías atau yang dikenal dengan Hugo Chavez lahir pada tanggal 28 Juli 1954, dan merupakan Presiden Venezuela yang ke-53 (sedang menjabat saat ini). Chavez adalah Presiden Venezuela yang kontroversial di mata kaum neoliberal, karena dia merupakan pimpinan Revolusi Bolivar yang mempromotori visi demokrasi sosialis, dengan mengintegrasikan Amerika Latin, anti-imperialisme, dan anti-neoliberalisme. Chavez amat mengkritik globalisasi neoliberal dan kebijakan luar negeri AS, dan sikap anti-AS itu telah dimilikinya sejak sebelum menjadi presiden. Chavez telah menjabat sebagai presiden Venezuela sejak tahun 1998, saat ini adalah masa jabatannya yang ketiga, dan akan membawanya sampai tahun 2013. Setelah terpilih sebagai presiden, ia berkali-kali mengalami guncangan pemerintahan. Hal itu dikarenakan Chavez menunjukkan sikap kirinya, yang membela kepentingan rakyat miskin di negerinya, dan melawan kapitalisme internasional.¹⁸

Chavez mendasarkan politik pemerintahannya menurut cita-cita dan prinsip-prinsip Simon Bolivar, tokoh nasionalis revolusioner anti penjajahan Spanyol, yang dikagumi oleh rakyat-rakyat berbagai negeri Amerika Latin. Kemudian Chavez mengembangkannya menjadi garis revolusioner yang bertujuan untuk mengubah keadaan pemerintahan dan masyarakat Venezuela. Sosialisme yang diusung Chavez saat ini bukanlah sosialisme tradisional seperti yang sudah lama ada, melainkan sosialisme abad 21 yang menekankan tentang demokratis dan humanis. Sosialisme abad 21 merujuk pada Revolusi Bolivarian dalam tingkat perkembangan dunia sekarang ini. Konsep baru presiden Hugo Chavez diimplementasikan dengan menarik sejarah sosialisme yang kaya teoritik, menganalisa pengalaman yang baik dan yang buruk. Revolusi Bolivarian ini mengedepankan pembangunan kesatuan ekonomi baru yang dibiayai negara yang berkebalikan dengan model kapitalis. Salah satu sikap Chavez dalam melawan neoliberalisme adalah kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak swasta di Venezuela, dan hal ini sangat didukung oleh rakyatnya.¹⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Chavez bukanlah seorang sosialis sejati layaknya para sosialis tradisional terdahulu.

¹⁸ Santhi Margaretha, "Bangkitnya Amerika Latin" diperoleh dari http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1106&type=4 diakses tanggal 29 Juni 2011.

¹⁹ Nurani Soyomukti *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dalam Politik Radikal*, (Yogyakarta : Resist Book, 2007), 26-38.

Chavez mengembangkan sosialisme baru yang disebutnya sebagai sosialisme abad 21. Kendati demikian, esensi kebijakan-kebijakan Chavez tetap berseberangan dengan neoliberalisme.

b. Nasionalisasi perusahaan minyak di Venezuela

Venezuela termasuk salah satu negara pendiri OPEC, eksportir dan penghasil minyak terbesar ke-5 di dunia. Cadangan minyak Venezuela diperkirakan mencapai 1,3 triliun barrel, yang berarti jumlah ini sama dengan seluruh jumlah persediaan minyak di dunia. Sektor minyak juga diketahui menyumbangkan 80 persen dari total ekspornya. Produksi minyak mentah Venezuela setiap harinya sekitar 3 juta barel dan 75 persennya menjadi komoditas ekspor. Sekitar 12 sampai 14 persen kebutuhan minyak AS tiap harinya disupply dari negara ini.²⁰ Jadi, jelaslah bahwa minyak merupakan sektor terpenting dalam perekonomian Venezuela, dan ekspor minyaknya juga menutupi kebutuhan minyak AS.

Venezuela telah mengalami kemiskinan karena imperialisme atau kapitalisme global setelah presiden Perez Jimenes pada tahun 1989 menempuh kebijakan kapitalis neoliberal. Hal itu juga menjadikan Venezuela sebagai peminjam dana dari IMF dan WB. Lembaga tersebut kemudian memberikan saran yang akhirnya ditempuh Venezuela yaitu restrukturisasi ekonomi ala neoliberalisme. Hal itu mengakibatkan dampak serius terhadap perekonomian Venezuela. Kemiskinan umum meningkat, padahal sumber daya alam Venezuela sangat banyak yang bisa dimanfaatkan.²¹

Atas kondisi seperti itu, setelah menjabat sebagai presiden, Chavez melakukan reformasi secara masif dengan melakukan kebijakan nasionalisasi. Nasionalisasi yang dilakukan Chavez adalah dalam upayanya mengembalikan semua aset strategis negara yang telah dijual dalam proyek privatisasi oleh rejim pemerintahan pro-liberalisme sebelum Chavez. Namun di tengah program nasionalisasi berbagai perusahaan, Chavez masih memberikan kesempatan perusahaan asing untuk ikut mengelola proyek minyak di cekungan sungai Orinoco. Tetapi, Chavez menekankan bahwa negara harus tetap mengontrol proyek yang menguntungkan itu. Dalam bidang minyak, Chavez memang tidak sepenuhnya melakukan nasionalisasi karena masih melibatkan perusahaan asing.²² Pada esensinya, nasionalisasi yang sedang dilakukan Chavez masih dalam taraf mengubah status kepemilikan swasta atau *privat*

²⁰ Margaretha, "Bangkitnya Amerika Latin"

²¹ Soyomukti, Hugo Chavez Vs Amerika Serikat, .55-56.

²² Woods, "Nasionalisasi di Venezuela - Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?"

menjadi kepemilikan negara, dan bukannya penyitaan atau pengambilalihan radikal (ekspropriasi) atas aset yang dikuasai kapitalis, untuk dikuasai oleh kelas pekerja. Untuk itu, nasionalisasi di Venezuela pun tidak menghadirkan sebuah 'negasi atas negasi' dari kapitalisme untuk menyulut transformasi menuju tatanan baru. Apa yang dilakukan Chavez justru adalah membeli perusahaan-perusahaan tersebut, disertai kompensasi kepada pemilik lama.²³ Venezuela pun masih belum memutuskan hubungan dengan kapitalisme.²⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan nasionalisasi Chavez memang sebuah alternatif baru yang jauh dari syarat-syarat neoliberalisme. Kendati demikian, nasionalisasi yang dilakukan Chavez tidaklah sepenuhnya berada dalam koridor sosialisme. Hal itulah yang barangkali disebutnya sebagai Sosialisme Abad-21.

Sejak menjabat presiden Chavez merombak Undang-Undang Dasar negara dan menjadikan Venezuela sebagai negara sosialis, karena menganggap liberal tidak bisa memperbaiki pemerintahan Venezuela dan hanya menyebabkan ketergantungan terhadap AS.²⁵ Diantara reformasi yang dilakukan Chavez, kebijakan terpenting dan mengundang kontroversi dari kalangan neoliberal adalah nasionalisasi perusahaan minyak. Pada tanggal 1 Mei 2001, perusahaan-perusahaan minyak swasta yang masih tersisa di negara itu diambil alih atau di nasionalisasi oleh Chavez. *Orinoco Belt Project* sebelumnya dikontrol oleh enam perusahaan asing: ConocoPhillips, Chevron dan Exxon Mobil dari AS, bekerjasama dengan BP dari Inggris, Statoil dari Norwegia dan Total dari Prancis. Perusahaan-perusahaan tersebut sebelumnya bertujuan untuk membangun salah satu cadangan minyak terbesar dunia. Akan tetapi angan-angan perusahaan-perusahaan tersebut dibatasi oleh Chavez, dimana perusahaan minyak negara, Petroleos de Venezuela (PDVSA) lah yang akan mengendalikan sekurang-kurangnya 60 persen dari proyek-proyek tersebut.²⁶ Melalui nasionalisasi itu, pada tahun 2003 PDVSA resmi menjadi perusahaan minyak negara, dan tindakan ini berpengaruh pada semakin kuatnya perekonomian Venezuela karena membuat negara mampu membiayai rakyatnya menuju kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, sebelumnya PDVSA selalu merugi.²⁷

Pada Desember 2006, setelah terpilih untuk kalinya sebagai Presiden Venezuela, Chavez segera menasionalisasi dua lapangan minyak

²³ Geri Smith, "A Love-Hate Relationship With Chavez" *Business Week*, Juni 2007.

²⁴ Diperoleh dari <http://www.marxist.com/nasionalisasi-venezuela-sosialis.htm> diakses tanggal 29 Juni 2011

²⁵ Woods, "Nasionalisasi di Venezuela - Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?"

²⁶ Soyomukti, *Hugo Chavez Vs Amerika Serikat*

²⁷ Woods, "Nasionalisasi di Venezuela - Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?"

di Venezuela yang dikelola TOTAL SA (Perancis) dan ENI (Italia).²⁸ Selanjutnya, Chavez juga mengharuskan beberapa puluh maskapai minyak asing yang beroperasi di Venezuela untuk meninjau kembali atau memperbarui kontraknya atau mendirikan perusahaan *joint-venture*. Chavez mengatakan bahwa kalau maskapai-maskapai asing itu tidak setuju dengan perubahan-perubahan kontrak yang diusulkan pemerintahan Venezuela, maka mereka dipersilahkan untuk keluar dari Venezuela.²⁹

Belum selesai keterkejutan internasional atas nasionalisasi minyaknya, Chavez pada Januari 2007 mengumumkan rencananya untuk kembali menasionalisasikan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikuasai swasta. Sektor listrik dan telekomunikasi menjadi target terdekat Chavez. Program ini akan mempengaruhi perusahaan penyuplai listrik, *Electricidad de Caracas* yang dimiliki sebuah perusahaan asal AS. Chavez juga menasionalisasi perusahaan *Nacional Telefonos de Venezuela* (CANTV) yang telah diprivatisasi sejak 1991 oleh AS.³⁰

Selanjutnya menyusul pula nasionalisasi cadangan minyak Sabuk Sungai Orinoco pada bulan Mei 2007, pemerintah Venezuela mengharuskan negara memegang setidaknya 60 persen saham dalam proyek perminyakan. Sejak nasionalisasi, partisipasi negara dalam Sabuk Sungai Orinoco meningkat dari 39 persen menjadi 78 persen, dan Venezuela tetap menjadi penghasil minyak mentah terbesar di Amerika Latin, dengan hampir setengah minyaknya diekspor ke AS. Dengan selesainya sertifikasi cadangan minyak terbesarnya di Sungai Orinoco, Venezuela sekarang menjadi produsen minyak terbesar di dunia setelah menambah cadangan minyaknya dari 77 miliar barel menjadi 312 miliar barel, melampaui cadangan minyak terbesar dunia di Arab Saudi sebesar 260 miliar barrel.³¹ Rentetan keijakan nasionalisasi yang dilakukan Chavez terhadap perusahaan-perusahaan minyak di Venezuela memang mengundang perhatian dunia internasional. Namun negosiasi yang ditawarkan Chavez tidak sepenuhnya membuat MNC-MNC yang beroperasi di sana lantas meninggalkan Venezuela. Hanya ExxonMobil dan ConocoPhillips asal AS yang menolak kebijakana tersebut.

Reaksi AS terhadap Kebijakan Hugo Chavez

Naiknya Chavez sebagai presiden Venezuela dengan kebijakannya yang anti-neoliberal, tentunya mengundang reaksi negatif dari AS. Terlebih lagi setelah kebijakan-kebijakan nasionalisasi yang diterapkannya

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wandy N Tuturoong "Belajar dari 'Nasionalisasi' Migas Venezuela" Kompas, Kamis, 30 Juni 2011.

terhadap perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Venezuela. Betapa tidak, selain menyinggung kepentingan AS, lebih jauh lagi kebijakan-kebijakan Chavez dapat mengancam perkembangan neoliberalisme dalam menguasai ekonomi politik di jagad raya. Berikut ini adalah bentuk reaksi negatif yang ditunjukkan AS terhadap kebijakan Chavez di Venezuela.

a. Mendukung upaya pro-liberal Venezuela untuk menurunkan Chavez

Pandangan-pandangan anti-neoliberal dan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional AS yang diterapkan oleh Chavez, menyulut reaksi negatif dari AS. AS mulai membangun strategi guna menggagalkan Revolusi Bolivarian yang digagas oleh Chavez. AS berupaya menghimpun kelompok-kelompok anti Chavitas, seperti Fedecamaras (kelompok pengusaha), CTV (serikat buruh yang berafiliasi dengan AD), partai-partai oposisi (COPEL, AD, dan MAS). Kelompok-kelompok ini adalah pro-liberal yang mengalami kerugian akibat perubahan sosial-politik dan ekonomi secara radikal yang dilakukan oleh Chavez.³²

Sejak tahun 2000, *National Endowment for Democracy* (NED), sebuah perusahaan nirlaba AS telah menyalurkan dana kepada kepada *American Center for International Labor Solidarity* (ACILS). Sejak tahun 1990-an ACILS mempunyai hubungan baik dengan CTV. ACILS memberikan rata-rata dana sebesar 60 ribu USD kepada para serikat pekerja di Venezuela. Tapi pada tahun 2001, terjadi peningkatan pemberian dana kepada ACILS sebesar 154,375 USD, karena adanya misi dan peranan baru terhadap pergerakan serikat dalam membangun negeri. Misi dan peranan baru tersebut merupakan usaha bersama dengan para pemimpin Fedecamaras, untuk membangun pergerakan yang mampu melengserkan pemerintahan Chavez. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, NED sebagai pemodal utama, meskipun sebenarnya dana NED itu berasal dari USAID.³³

Selain melakukan konsolidasi dengan kelompok anti Chavitas, AS juga melakukan koordinasi dengan sejumlah panglima militer yang anti terhadap pemerintahan Chavez guna mengatur penggulingan pemerintahan Chavez. Pada tanggal 25 Februari 2002, AS mengirimkan duta besar baru - Charles Shapiro yang menggantikan Donna Hrinak - untuk mendukung kudeta dengan mengupayakan konsolidasi dengan oposisi guna melakukan strategi menjatuhkan pemerintahan Chavez. Charles Shapiro berhasil membujuk pihak gereja, hingga akhirnya pada 31 Januari 2002 gereja Katolik memberikan dukungan terhadap oposisi.

³² Eva Golinger, *The Chavez Code: Cracking US Intervention in Venezuela* (London: Pluto Press, 2007), 32.

³³ *Ibid.*, 49.

Pihak gereja juga menolak untuk berdialog dengan pemerintah dan bahkan mengekspresikan dukungan bagi gerakan oposisi.

Pada tanggal 11 April 2002, CTV, Fedecamaras, dan partai-partai oposisi yang didukung NED menyelenggarakan pawai dan demonstrasi besar-besaran di Istana Presiden yang menuntut pengundiran diri Chavez sebagai Presiden Venezuela. Pada waktu yang bersamaan para pendukung Chavez juga melakukan unjuk rasa guna mendukung pemerintahan Chavez. Pada saat itu terjadi bentrokan antara pendukung anti Chavez dengan polisi anti huru hara yang mengakibatkan sedikitnya 12 orang tewas dan sebanyak 100 orang lagi cedera ketika polisi anti-huru hara membubarkan kerumunan orang yang menentang Chavez.³⁴

Akibat kejadian itu Chavez dipaksa mundur oleh para pemimpin militer.³⁵ Militer menunjuk Pedro Carmona sebagai Presiden baru sebelum pemilihan umum digelar. Setelah diangkat menjadi presiden, Carmona kemudian membubarkan Kongres, Mahkamah Agung, Konstitusi, dan institusi lainnya. Tindakan tersebut justru menurunkan dukungan terhadap Carmona. Kudeta hanya berlangsung 48 jam, dan Chavez kembali ke kekuasaannya setelah Mahkamah Agung mengumumkan bahwa kudeta itu tidak sah.³⁶

AS diduga terlibat dalam kudeta yang terjadi di Venezuela. Hal ini terlihat dari pernyataan juru bicara Presiden Bush, Ari Fleischer yang mengumumkan pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan kepada "pemerintah Carmona" dan hukuman atas "mantan Presiden" Chavez yang telah menggunakan kekerasan yang memaksa Chavez untuk mengundurkan diri. AS merupakan salah satu negara di dunia yang buru-buru untuk menilai peristiwa kekacauan 11 April dan secara terbuka memuji dan mengakui Carmona sebagai presiden yang sah.³⁷

Kegagalan kudeta tidak membuat AS lantas putus asa. Pada tahun 2002, kelompok oposisi bekerjasama dengan pemerintah AS membentuk *Sumate*, sebuah asosiasi masyarakat sukarelawan Venezuela. NED memberikan dana sebesar 31,000 USD kepada *Sumate* untuk memberikan "pendidikan politik" kepada pemilih Venezuela. Pendidikan politik ini dimaksudkan untuk mempromosikan mengenai proses referendum konstitusional.

³⁴ *Ibid.*, 73.

³⁵ Diperoleh dari <http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?p=442> diakses tanggal 29 Juni 2011.

³⁶ "Rangkain Pemberitaan Media Soal Kudeta Kontra-revolusi Terhadap Pemerintahan Revolusioner Chavez" diperoleh dari <http://lmnd.wordpress.com/2007/08/12/rangkainpemberitaan-media-soal-kudeta-kontra-revolusi-terhadap-pemerintahan-revolusioner-chavez/>, diakses tanggal 29 Juni 2011.

³⁷ Golinger, 73.

Chavez mengetahui *Sumate* mendapat dana dari Kongres Amerika Serikat.³⁸ *Sumate* mengumpulkan petisi yang ditandatangani oleh rakyat Venezuela. Pada tahun 2003, *Sumate* telah berhasil mengumpulkan sebanyak 3,2 juta tandatangan dari pemilih Venezuela. Petisi tersebut diberikan kepada *National Electoral Council* (CNE). Setelah melalui verifikasi, petisi tersebut disahkan dan diadakanlah pemanggilan referendum pada tanggal 15 Agustus 2004.³⁹ Referendum ini diawasi oleh *Carter Center* dari AS dan badan pengawas internasional lainnya. Lebih dari 30 persen masyarakat Venezuela tidak mengikuti referendum ini, dan dari sejumlah masyarakat yang mengikuti 59 persen menginginkan Chavez tetap menjadi presiden.⁴⁰

Tindakan-tindakan yang dilakukan AS di atas, cukup untuk menunjukkan bahwa AS memberikan reaksi negatif terhadap eksistensi Venezuela bersama Chavez selaku presiden revolusionernya. Mulai dari peristiwa kudeta hingga referendum terlihat dukungan penuh dari AS. Dukungan yang diberikan tidak hanya masalah pendanaan, selain itu juga dengan menunjuk orang-orang yang dapat bekerjasama dengan AS. AS juga bekerjasama secara institusi dengan kelompok-kelompok yang pro-liberalis di Venezuela.

b. Mendukung perusahaan multinasionalnya mengajukan gugatan ke arbitrase internasional

Chavez telah merencanakan nasionalisasi semenjak awal pemerintahannya. Tahap demi tahap nasionalisasi perusahaan minyak juga telah dilakukan. Sebelumnya, nasionalisasi berlangsung tanpa adanya gugatan, karena MNC-MNC yang beroperasi di sana bersedia menerima negosiasi yang ditawarkan Chavez. Belakangan, nasionalisasi yang dilakukan semakin masif, hingga menimbulkan rasa tidak puas dari beberapa MNC AS yang terpaksa harus rela melepaskan keuntungannya di Venezuela.

Tahap nasionalisasi yang diumumkan Juni 2007 memaksa perusahaan minyak multinasional memberikan minimal 60 persen dari modal operasinya di Venezuela kepada perusahaan migas milik pemerintah, PDVSA. Empat perusahaan mau menerima aturan pemerintah Venezuela dan memutuskan untuk tetap beroperasi di negara tersebut,

³⁸ Robert Jensen, "U.S. Supports Anti-democratic Forces In Venezuela Recall" Diperoleh dari <http://www.venezuelanalysis.com/2004/0811/p07s01-woam.html> diakses tanggal 29 Juni 2011.

³⁹ Julian Borger, "Violence Needed Against Chavez, Venezuela Opposition Leader Says Dictatorship Must Follow", diperoleh dari <http://www.venezuelanalysis.com/2004/0811/p07s01-woam.html>, diakses tanggal 29 Juni 2011.

⁴⁰ CNE, "Referendum Presidencial 2004" diperoleh dari http://www.cne.gov.ve/referendum_presidencial2004/ diakses tanggal 29 Juni 2011.

yaitu Total Perancis, Statoil Norwegia, British Petroleum, dan Chevron dari AS. Namun, dua perusahaan multinasional AS yakni ExxonMobil dan ConocoPhillips, enggan mengikuti aturan itu dan memilih keluar dari Venezuela.

Dengan keluarnya Exxon Mobil dan Conoco Phillips dari Venezuela, pemerintah Chavez berkonsekuensi untuk membayar kompensasi. Chavez mengatakan, Caracas akan membayar kompensasi kepada perusahaan-perusahaan multinasional atas dasar harga buku untuk aset-aset yang ditinggalkan dan bukan mengacu kepada harga pasar saat ini. Keputusan Chavez tidak disetujui oleh pihak ExxonMobil, karena mereka meminta kompensasi aset-aset afiliasinya di Venezuela sesuai dengan harga saat ini. Dikarenakan tak kunjung mencapai kesepakatan, pihak ExxonMobil kecewa dan mengambil keputusan untuk mengajukan kasus itu ke arbitrase serta Pusat Perselisihan Investasi Internasional (ICSID). ICSID adalah lembaga otonomi dalam Bank Dunia yang bekerja untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan investor swasta asing. Pada 6 September 2007, kasus tersebut resmi dilaporkan oleh ExxonMobil. Keputusan ExxonMobil mengajukan kasus itu ke ICSID mendapatkan dukungan dari pemerintah AS.⁴¹

Atas dukungan dari AS, pengadilan di New York 3 Februari 2008, mengeluarkan keputusan memenangkan ExxonMobil dan sekaligus membekukan aset PDVSA sebesar USD 315 juta.⁴² ExxonMobil juga telah meminta pengadilan di Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Dutch Antilles untuk membekukan aset PDVSA senilai 12 miliar dollar AS. Exxon Mobil juga memenangkan gugatan yang diajukan ke beberapa mahkamah internasional di London Belanda untuk membekukan aset PDVSA senilai miliaran dolar. Sementara itu, pengadilan di Inggris untuk sementara juga memutuskan pembekuan aset PDVSA senilai USD 12 miliar sebagai jaminan atas kompensasi yang harus dibayarkan terhadap ExxonMobil.⁴³

Tindakan ExxonMobil itu memicu aksi balasan dari Venezuela, dimana pada 12 Februari, Venezuela menghentikan pasokan minyaknya ke ExxonMobil. Chavez juga mengancam akan menghentikan pengiriman minyak ke AS untuk dukungan publiknya terhadap langkah ExxonMobil. Venezuela mengatakan keputusan-keputusan pengadilan itu adalah

⁴¹ Redaksi, "Chavez: Terbesar dalam Industri Migas," Suara Karya, Selasa, 25 September 2007.

⁴² James Suggett, "Keputusan Pengadilan London Memenangkan Venezuela dalam Perseteruannya Dengan Exxon", diperoleh dari <http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?p=84> diakses tanggal 29 Juni 2011.

⁴³ "Chavez Melunak pada Exxon", Kompas, Sabtu, 23 Februari 2008.

sementara dan tidak memiliki dampak pada pasokan, operasional dan keuangan PDVSA.⁴⁴

Akan tetapi, tidak lama waktu berselang, pada 18 Maret 2008 hakim Inggris Paul Walker mengumumkan dalam ruang pengadilan di London bahwa pembekuan aset perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, sejumlah USD 12 milyar harus dicabut.⁴⁵ Sebagai hasil keputusan ini, Exxon diharuskan membayar biaya pengadilan PDVSA, yang menurutnya mencapai USD 766.000. PDVSA juga menuntut kompensasi terhadap kerugian lainnya, seperti devaluasi surat-surat hutangnya (*bonds*), peningkatan biaya pinjaman, dan ketakmampuannya berinvestasi dalam kilang-kilang pada masa pembekuan.⁴⁶ Sementara, PDVSA akan mendapatkan kembali kendali penuh atas aset-asetnya di Inggris Raya, tapi pembekuan aset yang dilakukan Exxon di Belanda dan New York untuk sementara belum berubah.⁴⁷ Walaupun pada akhirnya persengketaan itu dimenangkan oleh Venezuela, namun dukungan yang diberikan AS terhadap dua MNCnya sudah cukup untuk menunjukkan bentuk reaksi negatif AS atas kebijakan-kebijakan Venezuela.

Telaah Neoliberalisme dalam Memahami Reaksi AS terhadap Nasionalisasi Perusahaan Minyak Venezuela

Dorongan terhadap kudeta dan referendum guna melengserkan Chavez, serta dukungan terhadap arbitrase ExxonMobile di atas menunjukkan implemetasi dari reaksi negatif AS terhadap kebijakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintahan Chavez. Reaksi-reaksi itu tentulah dilandasi oleh alasan-alasan ataupun indikasi-indikasi yang relatif sangat rasional bagi AS selaku penganut neoliberalisme. Telaah berikut ini adalah untuk menganalisis alasan-alasan AS menunjukkan reaksi negatif terhadap nasionalisasi minyak Venezuela, dengan menggunakan sudut pandang perspektif neoliberalisme.

a. Derivasi privatisasi akibat progresifitas nasionalisasi

Nasionalisasi yang dilakukan Chavez tentunya tidak hanya dapat dicermati dari esensinya yang berseberangan dengan prinsip-prinsipnya neoliberalisme. Lebih jauh, nasionalisasi yang dilakukan Chavez dapat merangsang kembali upaya-upaya maksimalisasi peran negara yang dapat

⁴⁴ "Venezuela Bayar 1,8 Miliar Dollar AS kepada Perusahaan Minyak Asing" Kompas, Kamis, 21 Februari 2008.

⁴⁵ James Suggett, "Keputusan Pengadilan London Memenangkan Venezuela dalam Perseteruannya Dengan Exxon", diperoleh dari <http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?p=84> diakses tanggal 29 Juni 2011.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

menjalar ke negara-negara lain di Amerika Latin, bahkan di dunia. Keberhasilan Venezuela bisa membuat negara-negara lain pemilik sumber daya akan dapat belajar dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Venezuela. Jika hal itu terjadi, maka tentunya akan menjadi preseden buruk bagi masa depan neoliberalisme ke depan.

- **Terjadinya efek domino nasionalisasi**

Nasionalisasi yang dilakukan Chavez bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan pengaruh dominan AS di Venezuela. Bukan hanya sampai di situ, Chavez mencita-citakan agar negara-negara di Amerika Latin dapat melakukan hal yang cenderung serupa dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh Venezuela. Harapan Chavez ini tampaknya mulai mendapatkan ruang dan peluang yang besar di kawasan Amerika Latin. Beberapa negara Amerika Latin lainnya seperti Kuba, Bolivia, dan Brazil mulai mempertimbangkan adaptasi terhadap kebijakan-kebijakan yang pro-negara. Bahkan, Bolivia juga telah mulai mengikuti tahap demi tahap nasionalisasi di negaranya⁴⁸

Chavez benar-benar menginginkan tatanan dunia multipolar yang sesungguhnya, tidak seperti saat ini, dimana AS selalu memposisikan dirinya sebagai pemimpin utama dalam unipolaritas yang dibangunnya. Dalam rangka terciptanya dunia yang multipolar dan meminimalisir ketergantungan terhadap AS, Chavez mendorong terbentuknya komunitas Amerika Latin dan menganjurkan perlawanan terhadap neo-liberalisme.⁴⁹ Pengaruh Chavez di hemisfer (belahan bumi) tersebut sudah dapat dirasakan di tingkat rakyat maupun diplomatik. Ia telah menjadi pahlawan bagi jutaan rakyat Amerika Latin yang tak diistimewakan. Pihak-pihak yang mengagumi keberaniannya telah dengan cermat mencatat keberhasilan-keberhasilan ekonomi dan politiknya.⁵⁰

Kekhawatiran akan terjadinya efek domino dari nasionalisasi yang dilakukan Chavez sudah mulai dirasakan.⁵¹ Pemerintah Venezuela menjual minyak kepada negara-negara Amerika Latin yang kurang mampu dengan potongan harga yang besar, sambil menunjukkan bahwa nasionalisasi yang dilakukan Venezuela telah membawa upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁵² Tindakan ini tentunya dilakukan agar negara-negara di Amerika Latin yang lain dapat mengadopsi langkah-langkah yang mirip dengan Venezuela.

⁴⁸ Woods, "Nasionalisasi di Venezuela - Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?"

⁴⁹ Robert E. Quirk, *Poros Setan: Kisah Empat Presiden Revolusioner*, (Yogyakarta: PrismaSophie, 2006), 191.

⁵⁰ Woods, "Nasionalisasi di Venezuela - Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?"

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Kecenderungan itu saat ini semakin jelas terlihat. Sejumlah tokoh kiri di negara Amerika Latin selain Chavez seperti: Michelle Bachelet di Chili, Luis Inacio Lula da Silva di Brasilia, Nestor Kirchner di Argentina, Tabare Vazquez di Uruguay, Ollanda Humala di Peru, Andres Manuel Lopez di Meksiko, Daniel Ortega di Nikaragua, dan baru-baru ini Evo Morales di Bolivia serta Rafael Correa di Ekuador saat ini menjadi semakin populer dan banyak di antara mereka yang terpilih sebagai presiden karena kebijakan-kebijakan mereka yang mulai mengkaji dan melaksanakan transisi kebijakan-kebijakan yang pro-negara. Hal ini sekaligus menandakan babak baru kebangkitan perpolitikan di Amerika Latin ke arah yang lebih “kiri”.⁵³

Mengingat realita di atas, dapatlah dipahami bahwa kebijakan nasionalisasi Chavez memang berpotensi mengakibatkan efek domino bagi kawasan Amerika Latin. Bahkan jika Chavez terus menunjukkan keberhasilan dalam menyejahterakan negaranya, tidak mustahil kebijakan Chavez akan menjadi salah satu alternatif bagi negara-negara berkembang pemilik sumber daya alam di dunia. Penjalaran eforia nasionalisasi di Amerika Latin merupakan ancaman serius bagi perkembangan neoliberalisme.

- **Terbukanya peluang regionalisme yang mempersempit ruang liberalisasi**

Selain berpotensi menjalar dan menjadi alternatif model bagi negara-negara lain baik di Amerika Latin maupun di dunia, kebijakan Chavez pada tahap berikutnya akan membuka peluang regionalisme. Regionalisme yang dibangun atas dasar-dasar penolakan terhadap paham liberal, tentunya akan mengancam eksistensi liberalisasi di kawasan Amerika Latin umumnya.

Untuk mempersempit ruang liberalisasi di Amerika Latin, Chavez melakukan reformasi radikal yang diantaranya menolak konsep pasar bebas NAFTA.⁵⁴ Selain itu, Venezuela bersama Kuba juga telah memprakarsai berdirinya aliansi tandingan untuk memperkuat eksistensi kebijakan pro-negara di Amerika Latin dan Karibia, yakni ALBA *Alternative Bolivariana Para Las Americanas* (ALBA).⁵⁵ ALBA didirikan sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi negara-negara

⁵³ Roberto Jorquera, “Cuba’s Path Out of Underdevelopment: A Historical Look at Cuba’s Economic Development”, dalam *Cuba as Alternative: An Introduction to Cuba’s Socialist Revolution*, (Australia: Resistance Book, 2000), 22.

⁵⁴ Zely Ariane. “Hugo Chavez Berhasil Melawan AS.” *Pikiran Rakyat*, 26 Mei 2006.

⁵⁵ Golinger, *The Chavez Code: Cracking US Intervention in Venezuela*, 32

miskin di hadapan negara-negara maju, terutama AS. ALBA dideklarasikan di Ibu Kota Cuba, Havana, 28 April 2005.⁵⁶

ALBA menyatakan diri sebagai alternatif terhadap FTAA (*Free Trade Area of Americas*) pada *Association of Caribbean States Summit* yang diprakarsai oleh AS. Pengkuhan ALBA sebagai kerjasama kawasan merupakan upaya integrasi ekonomi-politik yang berdasarkan prinsip-prinsip saling melengkapi (tidak berkompetisi), solidaritas (tidak dominasi), kerja bersama (tidak eksploitasi) dan penghormatan kedaulatan rakyat (menggantikan kekuasaan korporasi) bagi kemajuan tenaga-tenaga produktif negara-negara yang lebih miskin, sekaligus menjadi penyeimbang kerjasama kawasan yang telah ada. Tujuan ALBA adalah membangun masa depan Amerika Latin yang sejahtera, menghancurkan ketidaksetaraan sosial (*abhorrent social inequalities*) dan menjadikan wilayah ini sebagai kekuatan yang mampu menjalankan model perekonomian sendiri di tengah globalisasi, melalui strategi ekonomi, politik, sosial-budaya yang ada di kawasan Amerika Latin.⁵⁷

Terbentuknya ALBA atas prakarsa Venezuela bersama sekutunya Kuba (yang dimusuhi AS) membuka peluang bagi terciptanya regionalisme yang solid di wilayah Amerika Latin. Kesamaan kondisi akibat efek liberalisasi sangat memungkinkan ALBA untuk meminimalisir bahkan menyingkirkan FTAA yang digagas AS untuk meliberalisasikan pasar Amerika Latin. Eksistensi ALBA yang mengesampingkan kepentingan kaum liberal tentunya berpotensi mempersempit ruang liberalisasi melalui FTAA di Amerika Latin. Tak dapat disangkal lagi, kondisi seperti itu merupakan ancaman tersendiri bagi keberlangsungan perkembangan liberalisasi di Amerika Latin. Efek domino nasionalisasi dan terbukanya regionalisme yang menghalangi liberalisasi seperti yang dijelaskan di atas, tentunya akan menjadi ancaman tersendiri bagi pelaksanaan privatisasi sebagai aturan yang esensial dalam neoliberalisme. Jika nasionalisasi terus berlangsung secara progresif, privatisasi tidak akan mencapai momentum pelaksanaannya. Terpinggirkannya agenda privatisasi akan meminimalisir pengaruh neoliberalisme.

b. Ancaman terhadap deregulasi: berkurangnya peran pasar dan terhalangnya upaya mencapai keuntungan maksimal

Selaku penganut neoliberal, AS membangun ekonomi politik negaranya di atas penolakan intervensi negara dalam ekonomi. Penawaran neoliberalisme adalah mekanisme pasar menjanjikan banyak keuntungan.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Kebijakan nasionalisasi yang diterapkan Venezuela secara mendasar akan mengurangi peran privat dalam perekonomian, dan digantikan oleh peran negara yang semakin dominan. Meningkatnya peran negara akan menimbulkan konsekuensi logis berupa menurunnya otoritas pasar dalam mekanisme ekonomi. Bila peran privat (yang dalam neoliberalisme diwakili oleh MNC) mengalami penurunan, maka upaya mencapai keuntungan maksimal dan prinsip deregulasi seperti yang dianjurkan dalam neoliberalisme, akan terancam. Dominasi peran negara akan berakibat pada kerugian sektor-sektor privat, karena negara cenderung menerapkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat dengan memberikan subsidi dan jaminan-jaminan sosial lainnya. Oleh karena itu akan semakin mengurangi keuntungan privat.

- **Kerugian MNC akibat nasionalisasi yang memperkuat peran pemerintah**

Semenjak tahun 1977, sekitar 50 persen perusahaan-perusahaan raksasa di Venezuela sangat dikuasai modal AS.⁵⁸ Kekayaan AS meliputi hampir 50 persen berasal dari lebih 500 operasi MNC dan bank-bank besarnya yang terbesar dunia. Hampir mayoritas proyek pembangunan dan perekonomian AS ditopang oleh keuntungan-keuntungan operasi MNC.⁵⁹ Oleh karena itu penurunan keuntungan MNC dalam operasinya, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian AS selaku negara pemilik MNC.

Dari sekelumit fakta ini dan berdasarkan penelaahan tentang esensi neoliberalisme, maka nasionalisasi merupakan “momok” yang paling berbahaya. Betapa tidak, melalui nasionalisasi MNC tidak akan mampu mencapai keuntungan maksimal. Hal itu disebabkan karena berbagai bentuk pembatasan yang diberlakukan pemerintah melalui regulasi-regulasinya yang pro-rakyat. Peran pemerintah yang dominan akan mengurangi independensi pasar, dan pemerintah akan leluasa mengintervensi pasar atas alasan kepentingan rakyat. Walhasil, dominasi peran pemerintah akan menghambat MNC dalam memperoleh keuntungan maksimal.

Dalam persoalan penelitian ini, nasionalisasi *Orinoco Belt Project* yang dilakukan Venezuela bertujuan untuk membangun salah satu cadangan minyak terbesar dunia. Sebelumnya ladang minyak itu dikontrol oleh enam perusahaan asing: ConocoPhillips, Chevron dan ExxonMobil dari AS (perusahaan swasta migas terbesar di dunia), bekerjasama dengan

⁵⁸ “Revolusi di Venezuela Memecah Keheningan Sejarah”, diperoleh dari <http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?cat=3>, diakses tanggal 29 juni 2011.

⁵⁹ Wandy N Tuturoong, “Belajar dari ‘Nasionalisasi’ Migas Venezuela”, Kompas, Kamis, 30 Juni 2011

BP dari Inggris, Statoil dari Norwegia dan Total dari Prancis.⁶⁰ Artinya, setengah dari MNC-MNC yang berkuasa di sana adalah milik AS. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, proyek ini akan membuka peluang menjadi cadangan minyak terbesar di dunia. Keputusan Venezuela untuk menasionalisasi proyek ini jelas-jelas berpengaruh pada kerugian MNC-MNC yang sebelumnya menguasai proyek tersebut. Sehingga wajar jika Exxon Mobil dan Conoco Phillips yang tidak menyetujui keputusan pemerintah Venezuela.

Dalam bisnis internasional umumnya dan di bidang energi khususnya, MNC-MNC AS sangat berpengaruh dan merupakan *rule makers*, karena mereka menguasai industri dan pasar. Kekuasaan mereka akan merosot ketika Venezuela mengambil alih proyek tersebut. Dengan keluarnya ExxonMobil dan ConocoPhillips dari Venezuela, peluang AS untuk memperoleh keuntungan dari operasi ladang minyak itu mutlak menjadi nihil.

Dari sudut pandang neoliberalisme, kerugian MNC merupakan ancaman tersendiri. Secara mendasar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, MNC merupakan bagaian dari pilar penting eksistensi neoliberalisme dan negara-negara penganutnya. Tanpa keuntungan operasi MNC yang dialirkan ke negara industri maju pemiliknya, pengaruh neoliberalisme sebagai perspektif yang menjanjikan keuntungan dan kesejahteraan akan dipertanyakan. Hal itu terjadi karena keterbatasan MNC dalam mengalirkan keuntungan kepada negara pemiliknya dapat mempengaruhi kesejahteraan negara, karena pada hakikatnya negara liberal dapat eksis dari interaksi pasar, akumulasi modal dan keuntungan maksimal.

- **Besarnya subsidi untuk biaya sosial yang mengurangi keuntungan maksimal**

Dominasi peran negara akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan sosial. Popularitas Chavez di mata rakyat miskin meningkat setelah pemerintahannya menggunakan hasil penjualan minyaknya untuk program-program sosial bagi rakyat miskin. Pemerintahan Chavez sangat piawai memanfaatkan besarnya pendapatan dari sektor penjualan minyak dan gas alam yang melimpah di negaranya yang dinasionalisasinya, dengan mengadakan proyek-proyek sosial. Diantaranya, memberikan subsidi makanan bagi warga miskin, pendidikan

⁶⁰ Martin Saatdjian, "Intervensi Ekonomi Negara Kapitalis vs Sosialis" diperoleh dari http://www.un.org/ga/63/generaldebate/pdf/argentina_es.pdf diakses tanggal 29 Juni 2011.

gratis sampai universitas, dan memberikan bantuan bagi para ibu sebagai orang tua tunggal yang masih membesarkan anaknya.⁶¹

Chavez menekankan komitmennya pada perjuangan akar-rumput. Kemampuan Venezuela dalam mempengaruhi bangsa-bangsa di Amerika Latin bersandar pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan strategi Chavez. Dalam tahap ini, aspek terpenting dari nasionalisasi Venezuela adalah prioritas sosialnya yang telah diterjemahkan ke dalam program-program spesial di bidang kesehatan dan pendidikan.⁶²

Peningkatan biaya-biaya sosial yang dilakukan Chavez, menurut neoliberalisme adalah bentuk pemborosan. Dalam pandangan neoliberalisme, subsidi hanya bisa diperuntukkan terhadap upaya-upaya bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Meskipun aspek ini tidak signifikan dalam membangun rekasi negatif AS kepada Venezuela, namun tindakan Chavez ini dapat dikatakan kontroversial terhadap substansi neoliberalisme dalam memandang masalah-masalah sosial.

c. Menurunkan pencitraan neo-liberal dan defungsi dua institusi pilar utama Konsensus Washington

Kemampuan Chavez untuk terus-menerus menjalankan berbagai reformasi signifikan di tengah reaksi negatif AS kian memberikan pengaruh penting bagi perjuangan progresif di Amerika Latin. Kesuksesan Chavez meletakkan keraguan pada pandangan bahwa dalam dunia kapitalisme global saat ini tidak mungkin lagi bagi negeri-negeri Amerika Latin dan Karibia untuk secara efektif melawan tatanan neoliberal "pasar-bebas".⁶³ Chavez bermaksud untuk membuktikan bahwa kebijakan yang pro-negara dapat meminimalisir liberalisasi yang ditawarkan oleh neoliberalisme.

Jika ditelaah dari sudut pandang neoliberal, keberhasilan demi keberhasilan Chavez secara komprehensif dapat menurunkan pencitraan neoliberalisme di dunia. Terutama bagi negara-negara berkembang yang memilik kekayaan sumberdaya alam potensial yang terlanjur mengalami ketergantungan terhadap neoliberalisme. Kebijakan Chavez seolah mengingatkan kembali negara-negara di dunia untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab negara untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang tidak hanya berkonsentrasi terhadap aspek-aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan kesejahteraan. Tindakan Chavez yang dapat menjadi contoh penting bagi negara-negara berkembang adalah

⁶¹ Woods, "Nasionalisasi di Venezuela - Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?"

⁶² Steve Ellner, "Venezuela: Melawan Logika Globalisasi" *NACLA Report of the Americas, Empire & Dissent*, Vol. 39 No. 2 September/October 2005.

⁶³ Woods, "Nasionalisasi di Venezuela - Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?"

keputusannya untuk melepaskan negaranya dari keterikatan terhadap Konsensus Washington. Lebih jauh lagi, Chavez mampu memutus ketergantungannya terhadap dua institusi neoliberal (IMF dan WB) yang berpengaruh signifikan dalam ekonomi politik di dunia saat ini. IMF dan WB di mata Chavez adalah institusi 'lintah' yang telah menggiring negara-negara pendonor menuju kehancuran, tak terkecuali Venezuela. Pinjaman yang diberikan kepada negara penerima bukanlah gratis. Selain bunga, mereka juga menuntut adanya campur tangan mereka dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan titipan inilah yang kemudian justru semakin menurunkan kesejahteraan rakyat. Kenaikan pengangguran, meningkatnya kemiskinan, bertambahnya utang dan dominasi penguasaan sumberdaya alam adalah dampak negatif menjadi penerima utang IMF atau WB. IMF juga memberikan prediksi palsu mengenai pembangunan perekonomian mereka demi mendukung kepentingan dan ketergantungan negara penerima bantuan.⁶⁴ Argumen inilah yang dikeluarkan Chavez untuk menjawab latar belakang pemutusan hubungan Venezuela dengan kedua lembaga itu.

Oleh karena itu, segera setelah berkuasa pada tahun 1999 Chavez langsung membayar lunas utang Venezuela kepada IMF, kemudian diikuti pelunasan utang mereka pada WB pada tahun 2007. Venezuela juga telah melunasi utangnya kepada WB lima tahun lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Chavezpun merealisasikan impiannya yang lain, yaitu mendirikan *Banco Del Sur* (BDS). BDS adalah lembaga keuangan regional Amerika Selatan, yang mempunyai tugas seperti IMF. Lembaga ini bertugas memberikan pinjaman, tapi tanpa syarat intervensi kebijakan negara si peminjam. Dengan adanya lembaga yang sering disebut sebagai *Bank of South* ini diharapkan akan semakin mempermudah Chavez mempengaruhi negara sekitar guna meningkatkan semangat anti neoliberal.⁶⁵

Keluarnya Venezuela dari IMF dan WB disertai dengan tindakannya yang menyudutkan kedua lembaga itu, tentunya dapat berpengaruh terhadap turunnya pencitraan neoliberalisme di Amerika Latin bahkan di dunia. Analisis ini sangat beralasan, mengingat lembaga-lembaga itu merupakan institusi penting untuk menopang keberlangsungan neoliberalisme di dunia. Lembaga-lembaga itu juga menjadi spionase sekaligus "alat" negara maju seperti AS untuk dapat terus menguasai dan mempertahankan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap AS. Jika langkah memutuskan diri dari Konsensus Washington dan keluar dari IMF dan WB ditiru oleh negara-negara lain di

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Amerika Latin atau belahan dunia lainnya, maka terjadinya defungsi IMF dan WB sulit untuk dielakkan.

Kesimpulan

Naiknya Chavez sebagai presiden Venezuela yang notabene anti-neoliberal, memicu AS untuk memberikan reaksi negatif. Benar saja, belum lama menjabat sebagai presiden Chavez melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Sayangnya, kebijakan-kebijakan yang ditempuh Chavez sangat tidak populis terhadap perspektif pembangunan ala neoliberalisme yang dianut oleh AS dan negara-negara industri maju lainnya di dunia saat ini.

Kebijakan yang paling mendapat reaksi keras dari AS adalah nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Venezuela. Wajar saja AS memberikan reaksi negatif, mengingatnya tiga MNC besar AS (ExxonMobil, ConocoPhillips, dan Chevron) beroperasi di sana. Selain itu Venezuela juga merupakan salah satu eksportir minyak yang penting dalam memenuhi pasokan minyak AS.

Dengan melakukan telaah dari perspektif neoliberal, penulis menemukan "benang merah" yang dapat menjawab mengapa AS bereaksi negatif atas kepemimpinan Chavez, dan terutama atas kebijakan nasionalisasi yang dilakukan Chavez di Venezuela. Kepentingan AS untuk tetap menjaga hegemoni dan dominasinya di Venezuela khususnya dan Amerika Latin umumnya adalah alasan utama reaksi negatif yang ditunjukkan AS. Lebih jauh, alasan penting yang dapat dikemukakan dari tulisan ini adalah kepentingan AS untuk tetap mengedepankan eksistensi dan cengkraman neoliberalisme di dunia. Walau bagaimanapun seperti yang telah eksplanasi di atas, kebijakan nasionalisasi perusahaan minyak Venezuela oleh Chavez sangat bertentangan dengan nilai, prinsip, mekanisme, dan agenda-agenda neoliberalisme di dunia.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito, "Liberalisasi Perdagangan dan Biaya Lingkungan", dalam *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT Tirta Wacana, 1995.
- Alan, Woods, "Nasionalisasi di Venezuela - Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?" dalam *International Marxist Tendency Journal*, Mei, 2007.
- Ariane, Zely, "Hugo Chavez Berhasil Melawan AS." *Pikiran Rakyat*, 26 Mei 2006.
- Borger, Julian, "Violence Needed Against Chavez, Venezuela Opposition Leader Says Dictatorship Must Follow",

- <http://www.venezuelanalysis.com/2004/0811/p07s01-woam.html>,
CNE, "Referendum Presidencial 2004"
http://www.cne.gov.ve/referendum_presidencial2004/
- Ellner, Steve, "Venezuela: Melawan Logika Globalisasi" *NACLA Report of the Americas, Empire & Dissent*, Vol. 39 No. 2 September/October 2005.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Golinger, Eva, *The Chavez Code: Cracking US Intervention in Venezuela*, London: Pluto Press, 2007.
- Haynes, Jeff, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- <http://indonesia.handsoffvenezuela.org/?p=442>
http://www.un.org/ga/63/generaldebate/pdf/argentina_es.pdf
<http://lmnd.wordpress.com/2007/08/12/rangkainpemberitaan-media-soal-kudeta-kontra-revolusi-terhadap-pemerintahan-revolusioner-chavez/>,
- Jorquera, Roberto, "Cuba's Path Out of Underdevelopment: A Historical Look at Cuba's Economic Development", dalam *Cuba as Alternative: An Introduction to Cuba's Socialist Revolution*, Australia: Resistance Book, 2000.
- Soyomukti, Nurani, *Hugo Chavez Vs Amerika Serikat*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Korten, David, C., *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Martinez, Elizabeth, and Arnolando, García, "What is "Neo-Liberalism?" dalam *Jurnal Third World Resurgence* No. 99, 1998.
- Qurik, Robert, E., *Poros Setan: Kisah Empat Presiden Revolusioner*, Yogyakarta: PrismaSophie, 2006.
- Setiawan Bonnie, *Menggugat Globalisasi*, Jakarta: INFID dan IGJ, 2001.
- Smith, Geri, "A Love-Hate Relationship With Chavez" *Business Week*, Juni 2007.
- Soyomukti, Nurani *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dalam Politik Radikal*, Yogyakarta : Resist Book, 2007.
- Tsani, M., Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Tuturoong, Wandy, N., "Belajar dari 'Nasionalisasi' Migas Venezuela", Kompas, Kamis, 30 Juni 2011.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

Beberapa hal yang harus diperhatikan penulis dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut:

❑ **Maksud dan Tujuan**

Jurnal Transnasional diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lingkungan Universitas Budi Luhur maupun dari para peneliti lain.

❑ **Ruang Lingkup**

Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Nasional.

❑ **Bahasa**

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga Pembinaan Bahasa.

❑ **Bentuk Naskah**

Naskah diketik pada kertas jenis A4 putih pada satu permukaan dengan jarak 1,5 spasi. Tulisan mempunyai jarak 3cm dari Kanan dan kiri kertas, atas dan bawah kertas berjarak 2,5cm. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan jenis font Arial ukuran 11, naskah diketik dengan bentuk satu kolom.

❑ **Isi Naskah**

Naskah disusun dalam urutan: judul (Bahasa Indonesia); Nama penulis: lembaga/instansi: Abstrak (100-150 kata) dalam bahasa Inggris berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; Pendahuluan (berisi latar belakang; perumusan masalah; Tinjauan Pustaka; Tujuan penelitian); Metode penelitian (alat, bahan, cara dan metode Analisis); Hasil dan pembahasan; Kesimpulan; Daftar Pustaka, lampiran (jika ada).

❑ **Judul Karangan dan Nama Pengarang**

Judul karangan berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik penulisan.

❑ **Tabel dan Gambar**

Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,... dst).

❑ **Daftar Pustaka**

Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.

❑ **Alamat Redaksi**

Naskah dikirim dalam bentuk file(copy CD) dan 1 print out ke: Redaksi Jurnal Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petungkang Utara, Jakarta Selatan 12260, Telp. (021) 5853753 Ext. 252